



**KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI  
PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH  
DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH  
AGUS BUDIARTO  
B.002.93.0001**

**P E M B I M B I N G  
PROF.DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G**

**2001**

KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS SETELAH DISAHKAN  
SEBAGAI BADAN HUKUM

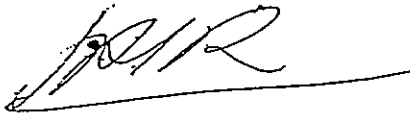
Disusun Oleh

AGUS BUDIARTO  
NIM.B.002.93.0001

Dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada tanggal 3 September 2001

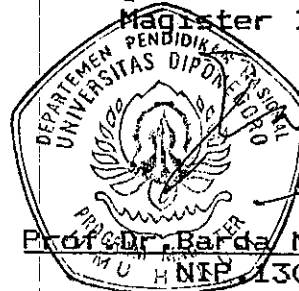
Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH  
NIP.130368053

Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP.130350519

## P R A K A T A

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan anugerah Nya, dengan melalui ujian yang menuntut kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati, penulisan tesis ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar magister ilmu hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Motivasi penulisan tesis yang berjudul KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERUSAHAAN PERSERDAN TERBATAS SETELAH DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM dikarenakan pemahaman pengertian badan hukum itu di masyarakat masih kurang yang berakibat menimbulkan kerancuan didalam mengimplementasikan kedudukan badan hukum itu didalam praktek. Terlebih lagi dengan keluarnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menghapus peraturan lama (KUHD) tentang perseroan terbatas penulis mengharapkan pula dapat ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan undang undang yang baru tersebut. Disamping itu penulis juga merasakan bahwa literatur mengenai hukum perusahaan masih sangat terbatas sehingga dengan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perusahaan.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun spirituil serta saran saran sehingga dapat terselesaikan.

kan penulisan tesis ini. Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
3. Bapak Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
5. Bapak Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
6. Bapak Wagiyo Hadiristiono Klaten, selaku Direktur PT Ganda Kekar Santosotex ;
7. Bapak Helmy Panigoro, selaku Direktur PT Medco Jakarta ;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini ;

yang telah banyak memberikan fasilitas dan data data guna keperluan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Semarang, 27 Agustus 2001

Penulis

## RINGKASAN

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya penulis tulis dengan singkatan UUPT) yang mulai berlaku setahun kemudian setelah diundangkan yaitu pada tanggal 7 Maret 1996, maka praktis ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang perseroan terbatas yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 56 KUHD tidak berlaku lagi. Namun demikian dalam Laporan Penelitian yang berjudul "KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM" ini ketentuan ketentuan tersebut masih dikemukakan sebagai pustaka sekedar sebagai pembandingan untuk memperjelas isi dalam pembahasannya.

Seperti diketahui bahwa sejak pembangunan ekonomi nasional digalakkan pada sekitar tahun 1967, semenjak itulah pertumbuhan dan pertambahan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas nampak mengalami peningkatan dalam jumlahnya. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru dalam penanaman modal asing dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang memberikan kemudahan kemudahan ataupun fasilitas bagi investor asing serta jaminan keamanan bagi mereka yang menanamkan modalnya di Indonesia, tak ayal banyak para investor asing dari berbagai negara melakukan kegiatan usahanya atau mengembangkan jaringan usahanya di Indonesia guna mencari pangsa pasar baru.

Dalam salah satu ketentuannya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tersebut, mensyaratkan atau mengharuskan bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha atau akan melakukan suatu kegiatan

usaha di Indonesia baik itu merupakan kerja sama dengan modal dalam negeri (joint ventura) ataupun murni dari modal asing maka bentuk badan usahanya adalah perseroan terbatas (PT). Disamping itu ternyata pula para usahawan dalam negeri banyak juga yang memilih bentuk perseroan terbatas dalam melakukan aktifitas usahanya, oleh karena itu tak heran bila pertumbuhan dan pertambahan badan usaha yang berbentuk PT ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Hal ini sangat beralasan karena PT mempunyai karakteristik yang berbeda dari badan usaha dalam bentuk lain, Firma misalnya. PT sebagai badan usaha merupakan badan hukum, artinya bahwa PT merupakan subjek hukum yang tak beda dengan orang yang mampu mendukung hak dan kewajibannya, dan mampu mengembangkan dirinya sebagai institusi yang mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari pengurus dan pemegang sahamnya. Disamping itu juga mampu mempertahankan hak dan kewajibannya dimuka pengadilan sebagai mana subjek hukum orang, pada dasarnya eksistensi PT sebagai subjek hukum diakui dalam lalu lintas hukum. Disamping itu dari sisi ekonomi, PT sebagai organisasi ekonomi yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan potensi sumber dana masyarakat melalui mekanisme pasar modal. Dengan demikian badan usaha yang bernama PT adalah merupakan wahana yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Itulah alasan mengapa para usahawan banyak memilih bentuk PT dalam melakukan kegiatan usahanya dibanding dengan bentuk usaha lainnya.

Namun seiring dengan perkembangan dunia usaha dengan berbagai permasalahannya ternyata PT pun tidak lepas dari persoalan persoalan yang menyentuh eksistensi PT itu sendiri. Fenomena yang dapat dilihat dalam persoalan tersebut ialah dengan terjadinya

perkara perkara di Pengadilan yang melibatkan pendiri perseroan dimana dapat dilihat bahwa ada asumsi pendiri perseroan identik dengan PT itu sendiri sehingga kepadanya dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT yang didirikannya itu.

Sebaliknya ada pula pendiri yang diwajibkan untuk membayar hutang hutang yang dilakukan atas nama perseroan seperti dalam perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu tentang dijatuhkannya putusan kepada pendiri untuk membayar hutang yang dibuatnya meskipun itu atas nama perseroan. Dan ada pula putusan pengadilan negeri yang membebaskan pendiri perseroan dari tuntutan pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu PT. Fenomena ini menunjukkan bahwa didalam praktek sehari hari ternyata ada anggapan bahwa tanggung jawab perseroan juga merupakan tanggung jawab pendirinya.

Berawal dari kenyataan tersebut diatas, thesis ini berupaya memaparkan secara deskriptif tanggung jawab pendiri PT (perseroan terbatas) secara pribadi dan tanggung jawab PT itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pendirian suatu PT meliputi beberapa tahap, tanggung jawab pendiri selalu berubah setiap tahapnya. Pada tahap persiapan pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas semua perbuatan hukumnya kecuali masalah yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan akan beralih pada PT yang didirikannya itu sepanjang memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUPT. Sedangkan Pasal 11 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan

disahkan sebagai badan hukum apabila perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pendiri, mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat oleh para pendiri, atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut, bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Demikian ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) UUPT.

Dalam tahap berikutnya, ketika perseroan telah disahkan menjadi badan hukum, sebagai akibat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pendiri wajib mengambil saham yang menjadi bagiannya pada saat perseroan didirikan maka kedudukan pendiri beralih menjadi pemegang saham dan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita PT sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) adalah terbatas yaitu tidak melebihi dari jumlah saham yang di milikinya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian sahamnya pada saat perseroan didirikan. Ini berarti bahwa pendiri adalah juga sebagai pemegang saham dalam perseroan yang didirikannya itu sehingga apabila PT telah disahkan sebagai badan hukum kepadanya diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas.



## ABSTRACT

One of the reason why The Limited Company mostly required by businessmen (entrepreneurships) in investments their capitals is such a type of company which its own legal certificate so that its operational activities are undoubtedly legal. The existence guarantees certificate of the Limited Company become the subject of law as it happens to some one who is capable of supporting his legal right and obligation. The only one requirement that a company become a subject of law if its legal certificate, in which its operational rules are stated, has been legalized and approved by the Minister of Justice.

The position and responsibility of the businessmen who set up a Limited Company are flexible depends on each stage of the company. The position and responsibility of the founding fathers would be different when the company has become legal institution and the company has not. Before a company become a legal institution, the founding fathers position as founding fathers and have to responsible individually to all of the effects of their law acts for company interest. Meanwhile, the position of the founding fathers after the company become a legal institution as share holders and their responsibility toward the lost of the company as limited to the amount of the share they hold ; they are not responsible individually toward any deal performed on behalf of the company.

\_\_\_\_&&&\_\_\_\_

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA .....	iii
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Metodologi.....	17
1. Materi Penelitian.....	18
1.a. Bahan Hukum Primer.....	18
1.b. Bahan Hukum Sekunder.....	19
1.c. Bahan Hukum Tertier.....	19
2. Metode Pendekatan.....	20
3. Lokasi Dan Subyek Penelitian.....	21
4. Alat Pengumpulan Data.....	22
4.a. Dokumen.....	22
4.b. Wawancara.....	23
5. Metode Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisis Data.....	24
F. Kerangka Pemikiran.....	25
G. Sistematika Uraian.....	30

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Perseroan Terbatas.....	32
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	32
2. PT Merupakan Badan Hukum.....	35
3. Pendirian PT Berdasarkan Perjanjian.....	56
4. Modal Perseroan .....	71
5. Saham Perseroan.....	85
B. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri .....	93

C. Organ Perseroan.....	116
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	116
1.a. Kedudukan Hukum RUPS.....	116
1.b. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS.....	119
1.c. Wewenang RUPS.....	123
2. Direksi.....	125
2.a. Kedudukan Hukum Direksi.....	125
2.b. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.....	128
3.c. Hubungan Antara Kedudukan Hukum RUPS dengan Kedudukan Hukum Direksi.....	138
3. Komisaris.....	142
3.a. Kedudukan Hukum Komisaris.....	142
3.b. Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris.....	145
3.c. Hubungan Antara Tugas Dan Kewajiban Komisaris Dan Direksi.....	148
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	151
A. Hasil Penelitian .....	151
1. Pembetulan terhadap tanggung jawab yang di bebaskan kepada pendiri perseroan dalam kaitan nya dengan eksistensi PT sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 yo pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 .....	151
1.a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	151
1.b. Tinjauan Pelaksana Pelaku Usaha .....	160
1.c. Tinjauan oleh Notaris.....	161
2. Tanggung jawab pendiri terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan yang telah disahkan sebagai badan hukum dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Direksi se bagaimana diatur dalam ketentuan pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.....	162
2.a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	162
2.b. Tinjauan Pelaksana Pelaku Usaha.....	165
2.c. Tinjauan Oleh Notaris.....	165

3. Pengaruh penyimpangan yang dilakukan pendiri terhadap perkembangan perseroan.....	166
B. Pembahasan .....	169
1. Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri....	169
a. Pada saat sebelum perseroan didirikan.....	169
b. Pada saat sesudah perseroan didirikan tapi belum disahkan sebagai badan hukum....	174
2. Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum.....	178
3. Pengaruh penyimpangan yang dilakukan pendiri terhadap perkembangan perseroan.....	210
BAB IV : PENUTUP .....	229
A. Kesimpulan.....	229
B. Saran.....	230
DAFTAR PUSTAKA.....	233
LAMPIRAN	

\_\_\_\_&&&\_\_\_\_

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. LATAR BELAKANG DAN MASALAH

Semenjak tahun 1967 yaitu ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing (dengan diterbitkannya Undang Undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing) banyak orang berlomba lomba mendirikan perusahaan perseroan terbatas (PT) baik itu perusahaan joint venture maupun perusahaan nasional yang mengakibatkan pula pertambahan badan usaha yang bernama perseroan terbatas (PT) ini juga mengalami peningkatan dalam kuantitasnya. Hal ini disamping Undang Undang No.1 Tahun 1967 memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam melakukan aktivitas usahanya. Pemilihan itu tentunya bukan tidak beralasan karena PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya. Oleh karena itu dimasa mendatang perseroan terbatas (PT) masih akan tetap merupakan pilihan utama bagi pemodal dalam memilih dan menentukan bentuk badan usaha yang akan menggerakkan modalnya.

Mengapa badan usaha berbentuk perseroan terbatas ini banyak diminati oleh para pengusaha di Indonesia ?

Sri Rejeki Hartono<sup>1</sup> mengemukakan alasan sebagai berikut:

"PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini (PT) sangat diminati oleh masyarakat."

Pendapat ini mendasarkan pada kenyataan bahwa perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Ini bisa kita lihat dalam realita yang ada ditengah tengah kita, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki oleh para konglomerat yang menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah perseroan terbatas. Mula mula sebagai perusahaan yang biasa saja (kecil), lambat laun berkembang menjadi perusahaan raksasa, dia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan memberikan keuntungan bagi lembaganya maupun pemegang sahamnya.

Lebih lanjut Sri Redjeki Hartono<sup>2</sup> mengatakan bahwa :

"Masih terdapat beberapa alasan praktis, antara lain :

- Setiap jenis usaha yang mempunyai jangkauan relatif luas, pada ijin operasionalnya selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pasti Perseroan Terbatas) ;
- Setiap jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan disyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama adalah juga perseroan terbatas.
- Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan Bursa Modal hanyalah

---

1. Sri Redjeki Hartono, *Beberapa Aspek Permodalan Pada Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta, Seminar Nasional, 1995), hal.2

2. *Ibid* hal.6

Perseroan Terbatas, maka sangat wajar apabila peningkatan jumlah PT di Indonesia menjadi semakin besar".

Alasan tersebut sangat tepat sebab kenyataannya, kreditur dalam hal ini pihak perbankan didalam menyalurkan dana pinjaman jumlah besar mensyaratkan pula bahwa pihak debitur haruslah merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan status badan hukum ini dimiliki oleh PT. (Seperti yang terjadi didalam contoh kasus yang akan penulis kemukakan dibawah nanti, dimana PT Bank BAPINDO mensyaratkan kepada CV. Budi Santoso untuk merubah badan usahanya menjadi badan hukum (PT) apabila akan mengajukan permohonan pinjaman (kredit) pada bank tersebut). Disamping itu badan usaha yang melakukan kegiatan penggerakan dana masyarakat harus berbentuk hukum perseroan terbatas seperti misalnya badan usaha yang menjalankan usaha perbankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok Pokok Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992. Demikian pula berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ternyata pihak yang bisa melakukan penawaran umum melalui pasar modal (emiten) hanyalah perseroan terbatas. Disini PT mampu mengadakan kapitalisasi dengan menawarkan sahamnya di bursa modal.

Bila dibandingkan dengan badan usaha lainnya semisal firma maka kedudukan PT adalah lain sama sekali karena pendiri PT dapat mengalihkan tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kepada perseroan dan sekutu (pemegang saham) tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat oleh perseroan. Sebagai badan hukum PT merupakan

subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum orang, oleh karena itu eksistensi PT diakui dalam lalu lintas hukum.

Sebaliknya didalam firma bukan merupakan badan hukum maka setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan perikatan persekutuan.

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang Perseroan Terbatas) selanjutnya penulis sebut dengan singkatan UUPT, menyatakan :

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

memberi pengertian bahwa modal PT seluruhnya terbagi dalam saham yang dapat dimiliki oleh beberapa orang sebagai pemasok modal (pemodal) yang disebut pemegang saham.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat 1 UUPT yang bunyinya :

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya".

maka dapat disimpulkan bahwa pemegang saham tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari adanya perikatan yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga dan seandainyaupun perseroan mengalami kerugian maka pemegang saham tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham yang dimilikinya atau yang telah diambilnya. Inilah



resiko yang ditanggung oleh pemegang saham yang dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Oleh karena itu ditinjau dari segi keamanan bagi para pemasok modal (pemegang saham), PT lebih dapat meminimalkan resiko dibanding bentuk usaha lainnya.

Ketentuan didalam pasal 3 ayat 1 UUPT tersebut memberi batasan seberapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh pemasok modal (pemegang saham) apabila dia telah menyerahkan sejumlah uang sebagai sahamnya pada perseroan dan seandainya dikemudian hari perseroan mengalami kerugian. Ketentuan pasal ini mengatur masalah resiko kerugian bagi pemegang saham dan merupakan salah satu pertimbangan mengapa para usahawan memilih bentuk PT dalam melaksanakan aktivitas usahanya (bisnis), bukankah dalam dunia usaha dikenal motto menekan kerugian sekecil mungkin dan mengejar laba atau keuntungan sebesar besarnya.

Disisi lain, bagi pihak ketiga yang menjalin hubungan usaha dengan PT akan mendapat jaminan kepastian yang lebih tinggi karena PT merupakan institusi berbadan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari pengurus maupun pemegang sahamnya dan lagi kekayaan PT senantiasa dapat dipantau melalui neraca keuangannya yang dibuat setiap tahun sebagai laporan tahunan dari PT tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UUPT sehingga kredibilitas untuk memenuhi perikatan yang telah dibuatnya tidak diragukan.

Dibidang pengawasan lebih mudah untuk dilakukan pengontrolan dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya yaitu mencari keuntungan atau laba karena PT merupakan suatu bentuk organisasi yang teratur.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya. Para pendiri yang juga pemegang saham tidak dapat dibebani tanggung jawab yang melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. Disamping itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan sebelum perseroan didirikan yaitu pada saat pendiri melakukan persiapan persiapan untuk mendirikan suatu perseroan dan perbuatan hukum pendiri yang mengatas namakan perseroan setelah perseroan berdiri terbentuk dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, kesemuanya akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan manakala perseroan telah disahkan sebagai badan hukum. Dengan demikian hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban dari perseroan. Pendiri sudah terlepas dari hak dan kewajibannya yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap pihak ketiga. Inilah kelebihan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang tidak dimiliki oleh badan usaha dalam bentuk lainnya.

Namun didalam praktek sering terjadi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang tidak konsisten dengan tujuan di dirikannya sebuah perusahaan perseroan terbatas (PT) yang mengakibatkan tidak saja menghambat perkembangan perseroan itu sendiri akan tetapi juga merugikan pihak

ketiga. Tak jarang terjadi perseroan menolak tagihan dari pihak ketiga (kreditur) karena ternyata dana pinjaman tidak digunakan untuk kepentingan perseroan melainkan untuk kepentingan pribadi pendiri oleh karenanya perseroan merasa tidak wajib membayar pinjaman itu. Akibatnya timbul perselisihan antara perseroan dengan pihak ketiga (kreditur). Hal ini akan merugikan perseroan baik dari segi moril maupun materiel, dari segi moril dengan adanya perselisihan itu terlebih lagi bila akhirnya harus diselesaikan lewat pengadilan, akan menjadikan PT tidak kredibel dan menurunkan kepercayaan dari para kolega yang berakibat pula sangat merugikan di segi materiel, sehingga tujuan didirikan nya perseroan sebagai badan usaha yang akan mengejar keuntungan atau laba tidak tercapai bahkan cenderung merugikan pihak ketiga (kreditur) yang seharusnya hal ini tidak perlu terjadi.

Beberapa kasus tentang permasalahan tanggung jawab pendiri PT dapat ditemukan di beberapa tempat antara lain :

*1. Di Klaten Jawa Tengah.*

*Sebagaimana dilansir oleh Harian Yogya Post tanggal 23 Maret 1997, kasus ini telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 1996 yang amarnya antara lain berbunyi menghukum Joko Lampito (pendiri perseroan terbatas) secara pribadi untuk membayar pinjaman yang diatas namakan PT Ganda Kekar Santosotex kepada PT Bank BAPINDO.*

Menyimak dari kasus ini menarik untuk dikaji sebab pendiri perseroan tidak bisa begitu saja secara otomatis mengalihkan kewajibannya kepada perseroan sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukannya dengan pihak ketiga. Padahal ini merupakan salah satu keistimewaan dari perseroan terbatas yang memisahkan hak dan kewajiban pendiri dengan perseroan.

Dengan demikian terpisah pula antara harta pendiri dan harta kekayaan perseroan.

Berdasar pada putusan Mahkamah Agung itu, PT BAPINDO tidak lagi menagih pada PT Ganda Kekar Santosotex yang selama ini dianggap sebagai debiturnya, melainkan menagih pada Joko Lampito. Disini terjadi penerobosan tanggung jawab terhadap pemegang saham karena Joko Lampito disamping sebagai pendiri juga sebagai pemegang saham yang sekaligus juga sebagai pengurus dalam perseroan itu.

Kalau kita melihat pada tujuan didirikannya perseroan terbatas sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan, dengan adanya kasus tersebut jelas menimbulkan implikasi yang merugikan bagi perkembangan perseroan itu sendiri, setidaknya tidaknya akan menurunkan kredibilitas PT yang bersangkutan sehingga tujuan didirikannya sebuah perseroan terbatas tidak tercapai. Seperti terlihat dalam kasus ini, setelah putusan menjadi inkrah ternyata PT Ganda Kekar Santosotex malah menjadi mati (bangkrut) karena banyak energi yang terbuang percuma baik materiel maupun moril didalam menyelesaikan sengketa tersebut. Perusahaan tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya bahkan tidak bisa berjalan sama sekali sehingga 2000 karyawannya terkena PHK.

Dengan syarat syarat tertentu tanggung jawab pendiri memang bisa dialihkan kepada perseroan, sebagaimana PT Bank BAPINDO menagih kepada PT Ganda Kekar Santosotex, walaupun akhirnya gagal karena persyaratan tertentu tersebut tidak dipenuhi.

Sebagai subyek hukum perseroan mempunyai kedudukan man-

diri dan bertanggung jawab secara hukum atas semua yang dilakukannya. Tetapi disisi lain terjadi pula kasus dimana pendiri diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh perseroan. Kasus dibawah ini merupakan kebalikan dari kasus yang pertama diatas, kalau dalam kasus yang pertama pendiri melimpahkan tanggung jawabnya kepada perseroan, dalam kasus ini justru sebaliknya pendiri dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

*2. Demikian kasus yang terjadi di Jakarta.*

*Menurut berita yang dimuat Surat Kabar Kedaulatan Rakyat tanggal 6 Juli 1999, pengusaha minyak Arifin Panigoro yang berkedudukan sebagai pendiri, pemegang saham dan juga sebagai Komisaris Utama pada perusahaan PT Medco Jakarta diajukan kemuka pengadilan atas perkara korupsi yang dilakukan oleh PT Medco.*

Melihat dari contoh kasus yang telah disebutkan diatas, ternyata dalam lalu lintas hukum yang berjalan didalam masyarakat timbul perselisihan tentang masalah tanggung jawab pendiri, pemegang saham dari suatu PT, kapan sebenarnya pendiri, pemegang saham itu dapat dituntut secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT tersebut, dan sebaliknya kapan PT itu harus telah bertanggung jawab sendiri selaku badan hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya itu.

Seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan kapan tanggung jawab PT itu telah melekat pada PT itu sendiri selaku badan hukum dan kapan pendiri Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara pribadi. Tanggung jawab pendiri ini menurut UUPT dapat terbagai dalam dua fase yaitu fase pertama pada saat PT telah didirikan dengan akta notaris tapi belum disahkan sebagai

badan hukum dan fase kedua ialah pada saat setelah PT mendapat pengesahan sebagai badan hukum. Pada kedua fase tersebut sebenarnya tanggung jawab pendiri dalam arti segala perbuatan hukum dari para pendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban beralih pada perseroan manakala perseroan telah resmi berdiri dan telah mendapat pengesahannya sebagai badan hukum. Akan tetapi syarat untuk dapatnya beralih tanggung jawab pendiri menjadi tanggung jawab perseroan antara kedua fase tersebut masing masing berbeda.

Fase yang pertama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUPT yang menyatakan :

- <1>. "Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan disahkan menjadi badan hukum apabila :
- a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
  - b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
  - c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan".
- <2>. "Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat <1> tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul "

Maka dalam fase yang pertama ini syaratnya harus ada tindakan dari perseroan untuk menghilangkan tanggung jawab pendiri dan mengalihkannya pada perseroan. Tanpa adanya tindakan dari perseroan yang meliputi menerima, mengambil alih atau mengukuhkan perbuatan hukum pendiri maka pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Didalam fase yang kedua dimana perseroan telah disahkan sebagai badan hukum, kedudukan pendiri beralih sebagai pemegang saham. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 UUPT yang menyatakan :

"Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan".

Pada saat perseroan didirikan pendiri adalah pemegang saham yang pertama kali pada perseroan yang didirikannya tersebut. Dialah sebenarnya pemasok modal pertama yang menjadikan PT mempunyai kekayaan tersendiri.

Apabila Pasal 7 ayat 2 UUPT tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 3 ayat 1 UUPT yang berbunyi :

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya".

maka pendiri tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum perseroan dan hanya dibebani tanggung jawab sebatas nilai saham yang telah diambilnya itupun apabila perseroan mengalami kerugian. Dan untuk berlakunya ketentuan ini syaratnya ialah perseroan sudah disahkan sebagai badan hukum sebagaimana disebutkan dalam UUPT Pasal 3 ayat 2 huruf a yang menyatakan sebagai berikut :

"Ketentuan yang dimaksud dalam ayat <1> tidak berlaku apabila:  
a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;"

Jadi untuk dapat terlepas dari tanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan dan hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita per-

seroan sebatas nilai saham yang telah diambilnya maka syarat satu satunya ialah perseroan sudah harus disahkan sebagai badan hukum. Apabila perseroan belum disahkan sebagai badan hukum maka pendiri, pemegang saham akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.

Undang undang telah mengatur secara jelas tata cara pengalihan tanggung jawab dari pendiri kepada perseroan seperti diuraikan tersebut diatas namun didalam praktek masih sering terjadi perselisihan tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan perseroan, pendirinya ataukah perseroan.

Terjadinya perselisihan ini bisa disebabkan antara lain oleh adanya penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendiri yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi akan tetapi bisa juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan ketentuan yang melingkupi perseroan terbatas, khususnya mengenai kedudukan dan tanggung jawab pendiri. Sebab didalam proses pendirian suatu PT, sejak persiapan persiapan yang dilakukan oleh para pendiri sampai pada saat PT mendapat pengesahannya sebagai badan hukum, kedudukan para pendiri senantiasa berubah ubah. Perubahan kedudukan para pendiri ini mempunyai implikasi terhadap pertanggungjawabannya setiap fase pada proses pendirian suatu PT tersebut. Tanggung jawab pendiri pada fase persiapan yaitu sebelum akta pendirian dibuat oleh notaris, yang berarti PT belum berdiri, berbeda tanggung jawabnya ketika PT sudah berdiri namun belum mendapat



pengesahan sebagai badan hukum. Dan akan berbeda lagi tanggung jawab pendiri ketika PT sudah disahkan sebagai badan hukum. Ternyata didalam proses pendirian suatu PT, dalam kurun waktu tertentu, dari orang yang sama yaitu para pendiri kedudukan dan tanggung jawabnya berbeda beda pada setiap fase yang terjadi dalam proses pendirian PT.

Dengan telah diundangkannya Undang Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan undang undang lama (KUHD) kiranya hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, disamping itu perlu pula dilakukan sosialisasi ketentuan ketentuan undang undang tersebut kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi perbedaan pemahaman tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan. Disamping itu juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pendirian suatu PT yang tidak saja mematikan prospek PT itu sendiri melainkan juga merugikan pihak ketiga karena bagaimanapun juga pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi.

Penelitian yang berkaitan dengan perseroan terbatas pernah dilakukan antara lain ialah tentang Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas yang merupakan penelitian dalam rangka disertasi doktor dalam ilmu hukum dilakukan oleh Rudhy Prasetya dari Universitas Erlangga Surabaya. Penelitian tersebut membahas permasalahan sampai seberapa jauh kebenaran unsur kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas PT dalam hubungannya dengan asosiasi modal dan bagaimana penerimaan hukum publik atas kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas yang terkandung dalam diri PT yang diciptakan oleh hukum privat. Penelitian ini dilakukan sebelum

berlakunya Undang Undang Perseroan Terbatas yang baru (UU No.1 Tahun 1995) sehingga tidak disinggung tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri setelah PT disahkan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 10 dan 11 Undang Undang Perseroan Terbatas yang baru tersebut. Disamping penelitian itu masih ada penelitian lain yang berkaitan dengan perseroan terbatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nindyo Pramono dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga dalam rangka disertasi Doktor dalam ilmu hukum tentang Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas tentang kedudukan pemilik sertifikat saham dari PT Dana Reksa yang pada kesimpulannya pemilik sertifikat saham PT Dana Reksa merupakan pemilik saham secara ekonomis sedangkan pemilik saham secara yuridis berada pada PT Dana Reksa yang merupakan pemegang saham dari PT Go Public. Guna pemerataan pemilikan saham pada masyarakat, maka oleh PT Dana Reksa saham yang diperolehnya dari PT Go Public tersebut dipecah pecah menjadi sertifikat saham PT Dana Reksa dan dijual pada masyarakat luas. Disini nampak bahwa sebagai pemegang saham yang sesungguhnya dari PT Go Public adalah PT Dana Reksa oleh karenanya ialah pemegang saham secara yuridis. Sedangkan pemilik sertifikat saham dari PT Dana Reksa karena kepemilikannya berdasarkan pertimbangan ekonomis dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT Go Public maka ia adalah pemilik saham secara ekonomis. Dalam penelitian ini juga tidak disinggung tentang kedudukan hukum serta tanggung jawab pendiri PT setelah disahkan sebagai badan hukum.

Mengacu pada hal tersebut diatas, menurut hemat penulis perlu dilakukan pengkajian terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas khususnya dari salah satu aspek hukum tentang seberapa jauh tanggung jawab pendiri dalam eksistensi PT yang didirikannya itu dan mengangkatnya dalam suatu penelitian yang berjudul **"KEDUDUKAN HUKUH DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUH"**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Pembahasan penelitian akan dibatasi pada masalah masalah yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas setelah perseroan tersebut disahkan sebagai badan hukum. Oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sampai seberapa jauh pembenaran tanggung jawab yang dibebankan kepada pendiri perseroan dalam kaitannya dengan eksistensi PT sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 yo pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Direksi yang diatur dalam pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dapatkah pendiri perseroan yang telah disahkan sebagai badan hukum dituntut dimuka pengadilan akibat adanya dugaan perseroan telah melakukan pelanggaran yang merugikan pihak ketiga ?
3. Terhadap penyimpangan yang dilakukan pendiri itu apakah mempunyai pengaruh terhadap perkembangan perseroan ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas masalah masalah tentang :

1. Kedudukan hukum pendiri setelah perseroan disahkan menjadi badan hukum, apakah benar ia telah beralih kedudukan sebagai pemegang saham sehingga dengan demikian telah terbebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat perseroan dan hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang telah diambilnya atas kerugian perseroan ataukah ia tetap harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
2. Dapatkah pendiri di bebani tanggung jawab di bidang hukum publik atas sangkaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perseroan yang telah memenuhi syarat sebagai badan hukum?
3. Penyimpangan penyimpangan yang terjadi didalam praktek yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi pendiri apakah mempengaruhi tanggung jawabnya setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan usaha perseroan.

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman dari segi hukum bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perseroan terbatas, kapan tanggung jawab itu berada pada pendiri perseroan dan kapan tanggung jawab itu sudah beralih atau berada pada perseroan yang didirikannya itu.

Sehingga kedudukan dan tanggung jawab pendiri secara yuridis sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan bahan referensi pada chasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perusahaan sehingga didapat gambaran kongkret tentang hukum Perseroan Terbatas, ditinjau dari aspek yuridis tentang kedudukan dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas setelah disahkan sebagai badan hukum.

#### E. METODOLOGI

Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perusahaan Perseroan Terbatas Setelah Disahkan Sebagai Badan Hukum ini adalah suatu penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian kepustakaan yang berarti penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan, yang akan lebih banyak mengkaji dan menelaah data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.<sup>3</sup>

Sistematika dari perangkat kaidah hukum yang terhimpun di dalam kodifikasi atau peraturan perundang undangan tertentu yang ada hubungannya dengan Perseroan Terbatas, khususnya tanggung jawab pendiri dan kedudukannya menurut hukum dalam perseroan itu, merupakan fokus yang diteliti. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian terha-

---

3. Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hal.53  
Maria SW Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan, 1989), hal.16

dap asas asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>4</sup>

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran (deskripsi) mengenai kedudukan hukum pendiri perseroan dan tanggung jawabnya setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan maka metodologi penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Materi Penelitian**

#### **Penelitian Kepustakaan**

Sebagai penelitian hukum normatif, titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan terutama di bidang hukum dan tidak bermaksud menguji hipotesis, karena itu bahan bahan yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier<sup>5</sup>.

Bahan bahan tersebut adalah :

#### **1.a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ;
3. Kitab Undang Undang Hukum Dagang ;
4. Kitab Undang Undang hukum Perdata ;
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok

---

4. Soeryono Soekanto, *Ibid.* hal.5

5. Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, CV.Rajawali, 1990), hal.39

Pokok Perbankan ;

6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing ;
7. Berbagai peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah perseroan terbatas dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ;
8. Yurisprudensi-yurisprudensi yang ada hubungannya dengan masalah perseroan terbatas khususnya yang ada hubungannya dengan kedudukan hukum pendiri perseroan dan tanggung jawabnya setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum.

1.b. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

1. Hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah perseroan terbatas ;
2. Buku karangan para sarjana ;
3. Makalah makalah seminar dari para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas ;
4. Disertasi yang ada hubungannya dengan masalah perseroan terbatas ;
5. Kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah perseroan terbatas.

1.c. Bahan hukum tertier terdiri dari :

1. Kamus hukum ;
2. Bibliografi ;
3. Berbagai majalah dan surat kabar ;

Penelitian Lapangan

Meskipun titik berat penelitian ini adalah penelitian

kepuustakaan yang akan lebih banyak mengkaji data sekunder, akan tetapi untuk mendukung kajian dari data sekunder tersebut juga dilakukan penelitian lapangan. Dengan penelitian lapangan diharapkan diperoleh data primer dari nara sumber dan responden sebagai pendukung kajian data sekunder dalam membahas kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas setelah disahkan sebagai badan hukum.

Penelitian lapangan diarahkan kepada pendapat para pelaku yang terlibat langsung dalam pendirian suatu PT dan praktisi perbankan (selaku kreditur) yang pada umumnya banyak terlibat dalam hubungan bisnis dengan PT sebagai nara sumber atau sumber informasi (information resources). Oleh karena itu jumlah nara sumber bukan merupakan pertimbangan utama akan tetapi yang dititik beratkan disini adalah kualitas informasi itu sendiri yang berasal dari pelaku dan praktisi yang mengetahui permasalahan perseroan terbatas khususnya terhadap kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri PT.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam membahas permasalahan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena kajian dalam penelitian ini ditujukan untuk mencari kejelasan kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas setelah disahkan sebagai badan hukum. Oleh karena itu titik tolak analisis dalam penelitian ini lebih diarahkan pada peraturan perundang undangan tentang badan badan usaha yang berbadan hukum khususnya perseroan terbatas.



Dengan demikian pendekatan yuridis normatif merupakan upaya upaya untuk menemukan hukum *inconcreto*<sup>6</sup>.

### 3. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta. Obyek penelitian atau nara sumber ditentukan dari pihak pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. PT Medco Jakarta ;
2. PT Ganda Kekar Santosotex Yogyakarta ;
3. PT Bank Bapindo Cabang Yogyakarta ;
4. Notaris di Yogyakarta ;
5. Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
6. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari obyek penelitian atau nara sumber yang telah dipilih diharapkan diperoleh data tentang :

1. Prosedur pendirian PT ;
2. Akta pendirian PT ;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT ;
4. Pengesahan PT dari Menteri Kehakiman ;
5. Perikatan perikatan yang dibuat PT ;
6. Perjanjian kredit antara PT dengan Bank (kreditur) ;
7. Tata cara beralihnya tanggung jawab dari pendiri kepada PT ;
8. Kedudukan dan perbuatan hukum pendiri sebelum dan sesudah PT disahkan sebagai badan hukum ;

---

6. Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hal.12

9. Penyimpangan penyimpangan yang dilakukan sendiri dan akibat akibat yang ditimbulkannya ;

Dari keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian akan digunakan untuk menentukan arah yang benar terhadap kesimpulan yang akan ditarik dalam penelitian ini.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan permasalahan yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas, maka alat yang digunakan untuk pengumpulan data ialah :

##### **4.a. Dokumen**

Melalui studi dokumen terutama dari bahan hukum primer dan sekunder serta tertier seperti telah diuraikan diatas akan dikumpulkan dan dikaji data data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Langkah langkah yang ditempuh dalam studi dokumen ini yang juga merupakan penelitian terhadap data sekunder, antara lain penginventarisasian peraturan perundang undangan, penggalan berbagai asas asas dan konsep konsep hukum serta melakukan berbagai kategori hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil dari studi dokumen ini kemudian disusun secara sistimatis dan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

##### **4.b. Wawancara**

Wawancara ini dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data guna mendukung datasekunder yang berasal dari penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Wawancara ini dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pihak pihak yang dapat dijadikan nara sumber, dalam hal ini pihak pihak yang dalam pekerjaannya ada hubungannya dengan PT dan para eksekutif perbankan. Wawancara ini merupakan wawancara yang difokuskan (focused interview) yaitu wawancara yang ditujukan pada subyek yang mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada obyek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil wawancara ini merupakan data primer yang mendukung data sekunder.

##### **5. Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengambilan data dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu ditentukan jenis data yang akan dibutuhkan atau diperlukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.
2. Terhadap data primer, data yang berasal dari responden, yang merupakan sumber informasi atau sumber data, dipilih para pihak yang mempunyai kemampuan (kapabilitas) dibidangnya baik berupa pandangan pandangan, pendapat pendapat maupun dokumen dokumen yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

3. Terhadap data sekunder, yang berasal dari pengkajian berbagai bahan pustaka dan dokumen dokumen, terlebih dahulu dilakukan penyeleksian data sehingga menemukan data data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan pada alat pengumpulan data, dilakukan berbagai klasifikasi data, pengolahan serta analisis data sehingga sampai pada hasil yang sesuai dengan penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data Yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung data primer dianalisis dengan metode kualitatif. Hal ini erat kaitannya dengan tipe penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.

Penelitian kategori ini menurut Sumardjono<sup>7</sup> pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis.

Keseluruhan data yang diperoleh tersebut selanjutnya disusun secara sistimatis sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat tentang kedudukan hukum pendiri perseroan dan tanggung jawabnya setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum.

#### F. KERANGKA PEMIKIRAN

Seperti telah diuraikan dimuka, sejak dimulainya persiapan persiapan untuk mendirikan suatu perseroan sampai dengan pengesahannya sebagai badan hukum kedudukan dan tanggung jawab

---

7. Maria SW Soemardjono, *op.cit.* hal.28

pendiri perseroan terbatas senantiasa berubah ubah. Pada fase persiapan, para pendiri belum mempunyai kedudukan apapun karena perseroan belum berdiri, diantara mereka masing masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan dalam rangka pendirian PT tersebut. Tanggung jawab atas akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan ini yaitu perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi dari para pendiri kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUPT perbuatan hukum tersebut dicantumkan dalam akta pendiriannya dan naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum dimaksud dilekatkan menjadi satu dalam akta pendiriannya maka perseroan akan terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, demikian menurut Pasal 10 ayat (3) UUPT maka perbuatan hukum dari para pendiri tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan. Pada fase setelah perseroan berdiri, dalam arti bahwa telah dibuatkan akta pendirian oleh notaris namun belum disahkan sebagai badan hukum, kedudukan para pendiri adalah sebagai pemegang saham sebagaimana dapat disimpulkan dari bunyi pasal 7 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Jadi pada saat pendirian para pendiri adalah pemegang saham pada perseroan yang didirikannya itu namun belum dapat diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan

yang dibuat oleh perseroan dan tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya atas kerugian yang diderita perseroan, karena perseroan belum menjadi badan hukum. Dengan demikian para pendiri dalam fase ini masih harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya walaupun perbuatan hukum itu dilakukan untuk kepentingan perseroan. Tanggung jawab para pendiri ini menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUPT dapat dialihkan pada perseroan dengan syarat bahwa perseroan harus lebih dulu mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan perseroan melakukan tindakan secara tegas untuk menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri, mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Apabila perseroan tidak melakukan hal hal tersebut yaitu tidak menerima, tidak mengambil alih atau tidak mengukuhkan secara tertulis maka menurut Pasal 11 ayat (2) UUPT, masing masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Pada fase berikutnya, yaitu pada saat perseroan telah disahkan sebagai badan hukum para pendiri berkedudukan sebagai pemegang saham dengan menyelor penuh saham yang menjadi bagiannya karena menurut Pasal 26 ayat (3) UUPT pada saat pengesahan seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Pada fase ini kedudukan pendiri adalah pemegang saham dan tanggung jawabnya mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT

yang berbunyi :

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya".

Dari penjelasan diatas ternyata bahwa dalam kurun waktu tertentu yaitu sejak persiapan, pembuatan akta pendirian sampai pada pengesahannya yang menurut Pasal 9 ayat (2) UUPT adalah selama 60 hari setelah permohonan diterima oleh Menteri Kehakiman kedudukan para pendiri dan tanggung jawabnya senantiasa berubah ubah.

Ketentuan mengenai kedudukan dan tanggung jawab pendiri perseroan yang terdapat dalam UUPT ini lebih rinci bila dibandingkan dengan peraturan lama (KUHD) yang dapat memberi peluang munculnya PT dengan tanpa modal (PT Kosong). Hal ini karena didalam Pasal 50 dan 51 KUHD disamping memberikan kepada para pendiri batas waktu yang dapat diperpanjang terhadap penyetoran dari sisa modal yang ditempatkan, sehingga sampai kapanpun PT tidak mempunyai modal penuh yang disetor dari saham yang telah dikeluarkan karena selalu dapat dimintakan perpanjangan waktu pelunasannya, juga didalam praktek ternyata ada perbedaan penafsiran dari bunyi Pasal 50 dan 51 KUHD tersebut yang menjadi perdebatan para ahli yaitu mengenai jumlah modal yang harus ada pada saat perseroan itu disahkan sebagai badan hukum. Kedua pasal tersebut yang berbunyi:

Pasal 50 KUHD :

"Pembenaran yang dimaksud dalam pasal 36 tidak akan diberikan, kecuali bilamana terbukti bahwa pendiri-pendiri yang pertama bersama paling sedikit mewakili seperlima dari modal perseroan selanjutnya akan ditentukan sesuatu tenggang dalam mana sisa dari saham saham atau sero sero itu sudah harus ditempatkan.

Tenggang itu atas permintaan para pendiri selalu dapat diperpanjang oleh Menteri Kehakiman atau oleh penguasa yang berdasar pasal 39 ditunjuk oleh Menteri Kehakiman".

Pasal 51 KUHD :

"Perseroan tidak akan dapat mulai sebelum paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal perseroan sudah disetor".

mengandung maksud sebagai jaminan bagi para kreditur terhadap semua perikatan yang dibuat oleh perseroan. Namun didalam praktek, pendapat para ahli saling berbeda dalam menafsirkan Pasal 50 dan 51 KUHD tersebut.

Menurut Prasetya,<sup>8</sup> sudah seharusnya Menteri tidak memberikan pengesahan sebelum dipenuhi Pasal 51 KUHD tersebut. Sedangkan maksud Pasal 50 KUHD, bila suatu saat dengan harta kekayaan PT dari modal yang ditempatkan belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban PT pada pihak ketiga (kreditur) maka Direksi dapat meminta kepada para pemegang saham untuk segera melakukan penyetoran kekurangan saham yang ia sanggupkan untuk memenuhi kekurangan pembayaran atas tagihan dari pihak ketiga tersebut. Menurut Purwosutjipto<sup>9</sup>, didalam praktek, dari beberapa akta notaris tentang pendirian PT, kehendak Pasal 50 dan 51 KUHD tersebut sulit dipenuhi. Misalnya modal perseroan sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) maka menurut pasal 50 KUHD modal yang harus ditempatkan oleh para pendiri adalah  $1/5 \times \text{Rp.100.000.000.-} = \text{Rp.20.000.000.-}$  (dua puluh juta rupiah).

Dan menurut pasal 51 KUHD seharusnya ialah 10% X

---

8. Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas* (Surabaya, Airlangga University Press, 1983), hal.111

9. Purwosutjipto HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Bagian Pertama (Jakarta, Jambatan, 1980), hal.100



Rp.100.000.000.- = Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Akan tetapi didalam akta notaris dicantumkan pernyataan : " Atas tiap tiap saham mana disetor dengan uang tunai 10% (sepuluh persen) selambat lambatnya satu hari sebelum akta pendirian PT ini diberikan pengesahan dari Menteri Kehakiman". Ini berarti yang disetor sebesar 10% X Rp.20.000.000.- =Rp.2.000.000.- Jadi yang disetor bukan 10 % dari modal perseroan melainkan 10% dari modal yang disanggupi para pendiri.

Terhadap persoalan ini Purwosutjipto<sup>1</sup> berpendapat wajar, sebab kalau para pendiri sudah menyanggupi akan membayar Rp.20.000.000.- kepada perseroan, kiranya sudah selayaknya bila mereka harus menyelor 10% dari yang disanggupkan untuk modal kerja permulaan. Dengan ketentuan ini maka bagi PT yang permodalannya masih lemah, diberi kemungkinan untuk sambil berjalan memperkuat permodalannya dengan bekerja keras.

Sedangkan Nindyo<sup>11</sup> tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Purwosutjipto tersebut yang menyatakan wajar itu. Menurut Nindyo lebih setuju bila prinsip perimbangan persentase itu dihitung dari modal perseroan, bukan dari modal yang ditempatkan dengan alasan bahwa Pasal 51 KUHD sendiri menentukan demikian.

Bertitik tolak dari uraian diatas, berkaitan dengan kedudukan

---

1. *Ibid.*

11. Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997) hal.58

dan tanggung jawab pendiri atas keterlibatannya dalam proses pendirian suatu PT yang merupakan suatu badan usaha yang selama ini merupakan pilihan utama bagi para usahawan, pemilik modal, jika para pendiri bertindak secara profesionalisme dan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku tentunya akan meningkatkan citra PT dimasa masa yang akan datang dan penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan diri sendiri dapat dihindari. Dengan demikian kesan adanya PT kosong (tanpa modal) yang gulung tikar dengan meninggalkan banyak hutang yang cenderung merugikan pihak ketiga akan dapat pula dihilangkan.

#### G. SISTEMATIKA URAIAN

Setelah bab I diuraikan seperti tersebut diatas, selanjutnya penulisan tesis ini akan terdiri dari bab bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab II : Bab ini merupakan kajian teoritis atau kajian dari bahan kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh bahan teoritis yang akan dijadikan dasar menganalisis permasalahan yang ada.

Bab III : Pembahasan pada bab ini merupakan analisis hukum terhadap hasil penelitian atau mengungkapkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang ada, kemudian dievaluasi secara yuridis-normatif.

Bab IV : Kesimpulan Dan Saran. Bab ini tidak lain merupakan kesimpulan dari analisis pada bab bab terdahulu dan diberikan pula saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan temuan yang diperoleh dalam penelitian.

\*\*\*\*\*

## BAB II

### T I N J A U A N     P U S T A K A

#### A. GAMBARAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas.

Bila kita melihat kembali pada peraturan lama Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai Perseroan Terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal pasalnya. Namun demikian, menurut Sutantya dan Sumantoro<sup>12</sup> dari pasal pasal : 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai unsur unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan ;
- b. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan

---

12. RT Sutantya R Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Press, 1991), hal.40

hal hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain lain ;

- d. Adanya pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseoan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Demikian pula setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, juga tidak ditemukan secara tegas didalam pasal pasalnya dengan klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas.

Didalam Pasal 1 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

"Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan :  
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

hanya menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum. Dan untuk mendapat status badan hukum inipun juga masih harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT yang menyatakan sebagai berikut :

"Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri".

Jadi untuk sampai pada suatu hal yang disebut sebagai badan hukum maka badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk

perseroan terbatas, akan tetapi apa dan bagaimana bentuk perseroan terbatas itu sendiri tidak dengan jelas disebutkan didalam pasal pasal UUPT. Oleh karena itu UUPT hanya menekankan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum, padahal institusi badan usaha yang merupakan badan hukum bukan saja badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas melainkan juga yayasan dan koperasi. Boleh jadi perseroan terbatas adalah pasti merupakan badan hukum sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (1) UUPT tersebut diatas, walaupun masih bergantung pada syarat tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (ps.7 ayat 6 UUPT), tetapi badan hukum belum tentu merupakan perseroan terbatas. Akan tetapi bila kita perhatikan :

#### Pasal 7

(2). "Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan".

dapat dilihat bahwa sejak pertama didirikan perseroan telah mempunyai kekayaan (modal) yang didapat dari para pendirinya. Dan para pendiri inilah yang pertama kali sebagai pemegang saham pada perseroan yang baru didirikan itu.

Apabila Pasal 7 (2) ini kita kaitkan dengan :

#### Pasal 3.

(1). "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambalnya".

dapat disimpulkan bahwa para pendiri yang juga berkedudukan sebagai pemegang saham pada perseroan yang didirikannya itu tidak dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak dapat

dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya terhadap kerugian yang diderita perseroan. Dengan demikian terjadi pemisahan kekayaan antara pendiri, pemegang saham dengan perseroan. Bila kita perhatikan lagi Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan :

"Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi"

dan Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi :

"Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar".

dari ketentuan itu diatas dapat dikatakan bahwa PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasannya dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya.

Pasal pasal tersebut diatas memberi suatu pengertian bahwa perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur unsur :

- a. adanya kekayaan yang terpisah ;
- b. adanya pemegang saham ;
- c. adanya pengurus ;
- d. adanya kepentingan sendiri.

## **2. PT merupakan Badan hukum.**

Seperti telah dijelaskan dimuka, untuk dapat di sebut sebagai Perseroan Terbatas suatu badan usaha harus mempunyai ciri ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya

tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum baik diluar maupun didalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha yang disebut perseroan terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagai mana halnya dengan orang, yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurus nya.

Menurut Soemarti<sup>13</sup>, walaupun dalam peraturan lama tidak secara tegas menyatakan perseroan terbatas adalah badan hukum, namun dari Pasal 40 (2) KUHD yang mengatakan bahwa :

"Pesero pesero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham saham itu".

Dan dari bunyi Pasal 45 ayat (1) KUHD yang mengatakan :

"Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan perikatan yang dilakukan oleh perseroan".

dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Sementara itu peraturan diluar KUHD justru ada yang menunjuk secara tegas bahwa perseroan terbatas (PT) adalah

---

13. Siti Soemarti Hartono, *Perseroan Terbatas Dalam Pendirian*, (Yogyakarta, Kertas Kerja Dalam Seminar Sehari Hukum Perseroan Dan Hukum Pertanggungan (Assuransi) Dalam Kenyataan Dan Harapan, 1988), hal.6



merupakan badan hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (7) dan pasal 102 Peraturan Kepailitan yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (7) :

"Terhadap perseroan perseroan terbatas, perkumpulan saling menanggung, perkumpulan koperasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum dan terhadap yayasan yayasan untuk penerapan pasal ini berlakulah tempat dimana itu bertempat kedudukan sebagai tempat kediaman".

Pasal 102 :

"Dalam hal kepailitannya suatu perseroan terbatas, maskapai pertanggungan, atau penanggungan timbal balik, perkumpulan koperasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum atau suatu yayasan maka diperlakukanlah ketentuan ketentuan pasal pasal 84 sampai dengan 88 atas pengurusnya, ketentuan ketentuan dari pasal 101 ayat (1) atas para pengurus dan komisaris komisaris".

Dari kedua pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa perseroan terbatas dimasukkan dalam kelompok persekutuan yang berbadan hukum dan menjadi subyek hukum dalam lalu lintas hukum disamping orang.

Maka UUPT sekarang menyatakan dengan tegas didalam Pasal 1 ayat (1) seperti diatas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan demikian kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum tidak perlu lagi disimpulkan sebagaimana halnya dalam KUHD sebab telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Disamping itu pemakaian istilah Perseroan Terbatas disingkat PT yang selama ini hanya berdasarkan pada kebiasaan yang telah menjadi baku di masyarakat, telah pula resmi mendapat landasan hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan :

"Nama perseroan harus didahului dengan perkataan "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT".

Pernyataan Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum yang terja-  
di karena undang undang dengan tegas menyatakan demikian.  
Hal ini berbeda dari peraturan lama (KUHD) yang tidak dengan  
tegas menyatakan suatu perseroan merupakan badan hukum.

Akan tetapi baik didalam UUPT maupun dalam KUHD tidak  
didapati batasan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan  
badan hukum tersebut.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli  
mengenai badan hukum ini, menurut Rido<sup>14</sup> antara lain ialah :

- a. Teori fictie dari von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fictie saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
- b. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak hak itu. Apa yang kita namakan hak hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
- c. Teori organ dari Otto van Gierke, badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. Tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

---

14. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung, Alumni, 1986) hal.9

- d. Teori *Propriete collective* dari Planiol, menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama sama. Disamping hak milik pribadi hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota anggota tidak hanya dapat memiliki masing masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama sama untuk keseluruhan. Disini dapat dikatakan bahwa orang orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Manusia selaku pendukung hak yang mempunyai kepentingan perseorangan (*individueel*) dapat pula mempunyai kepentingan bersama dengan manusia lainnya. Mereka memperjuangkan suatu kepentingan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri, menciptakan sesuatu organisasi, memilih pengurus pengurusnya yang akan mewakili mereka, memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan dalam organisasi yang dibentuknya tersebut yang terpisah dari harta mereka masing masing dan akhirnya menetapkan peraturan peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain. Perkumpulan manusia yang mempunyai kepentingan bersama dan terbentuk dalam organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hak hak tersendiri terpisah dari hak hak para anggotanya dan mempunyai kewajiban sendiri yang terpisah dari kewajiban para anggotanya dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri didalam maupun diluar hukum. Dengan demikian perkumpulan yang terbentuk itu mampu menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum terlepas dari manusia manusia yang menjadi anggota kesatuan itu. Subyek hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang dimaksudkan dengan badan hukum.<sup>15</sup>

---

15. *Ibid.* hal.5

Teori teori mengenai badan hukum tersebut mencoba untuk menerangkan suatu gejala hukum yaitu adanya suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum orang. Disatu pihak, hanya oranglah yang dapat menyatakan kehendaknya tetapi dilain pihak dibutuhkan suatu bentuk kerja sama yang mempunyai hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh orang.

Dengan demikian dari berbagai teori itu dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu :

Pertama, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai "panca indera" sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.

Kedua, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Dibelakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya, kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri dibelakang badan hukum itu secara bersama sama.

Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar terhadap pemisahan pertanggung jawaban antara badan hukum dan orang orang yang berada di belakang badan hukum tersebut.

Misalnya, suatu perseroan terbatas dipanggil sebagai saksi didepan pengadilan, menurut stelsel hukum di Indonesia kesaksian diberikan mengenai hal hal yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung oleh saksi sendiri. Timbul persoalan, ketika dipanggil kedepan pengadilan, yang memberikan kesaksian adalah pengurus baru yang memberikan kesak-

sian berdasarkan catatan catatan perseroan yang bersangkutan. Sedangkan pengurus lama yang mengalami sendiri sudah meninggal dunia. Apakah kesaksian semacam ini diperbolehkan? Bila menganut teori yang pertama, badan hukum sebagai wujud yang nyata tentu kesaksian tersebut dapat diterima. Tetapi bila menganut teori yang kedua, tentu kesaksian ini tidak diperkenankan.

Misalnya lagi, apabila perseroan bertindak salah, menurut teori yang pertama perseroan dapat dipertanggung jawabkan karena perseroan diwakili oleh pengurusnya maka pengurus perseroan itulah yang dituntut.

Didalam praktek pernah terjadi<sup>16</sup>, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan hukuman kepada Barhum Suwandi, pimpinan perusahaan PT Genzo Vita Beverage yang dipersalahkan tidak membayar upah minimum dan tidak menyertakan pekerjaanya dalam program Astek. Dalam hal ini yang dihukum adalah Perusahaannya itu yang bernama PT Genzo Vita Beverage namun yang menjalani hukuman adalah pimpinannya yang mewakili perusahaan baik kedalam maupun keluar. Dalam kasus ini pengadilan menganut teori yang pertama yaitu menganggap badan hukum merupakan organ yang nyata.

Menurut doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*) pengertian tentang badan hukum haruslah memenuhi unsur unsur :

- a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah ;
- b. Mempunyai tujuan tertentu ;

---

16. Surat Kabar Harian *Kompas*, tanggal 24 April 1990

- c. Mempunyai kepentingan sendiri ;
- d. Mempunyai organisasi yang teratur ;

Bila unsur unsur yang terdapat dalam perseroan terbatas diperbandingkan dengan unsur unsur yang ada pada de heer-sende leer maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah.

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para peseronya. Dan didapat dari pemasukan para pesero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat misalnya dalam rangka membuat perjanjian perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga tersebut. Dengan demikian bila dikemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para pesero, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing masing pesero. Perbuatan hukum pribadi para pesero dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat :

1. Kreditur pribadi dari para pesero dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu.
  2. Para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga.
  3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan.
  4. Hubungan hukum, baik perikatan, maupun proses proses antara para pesero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.
  5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan tertentu dari suatu perseroan terbatas (PT) dapat diketahui didalam anggaran dasarnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 huruf b UUPT yang bunyinya sebagai berikut :

"Anggaran dasar memuat sekurang kurangnya : maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ".

Bahkan dari namanya dapat diketahui bahwa pemakaian nama perseroan dapat mencerminkan tujuan pokok dari perseroan, misalnya PT Bank Pembangunan Indonesia (PT BAPINDO). Dilihat dari namanya sudah dapat diketahui bahwa PT BAPINDO bergerak dibidang perbankan. Tujuan perseroan

bukan merupakan tujuan/kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang peseronya dan perjuangan untuk mencapai tujuan itu dilakukan oleh organ Perseroan yang disebut direksi. Jadi jelas bahwa unsur mempunyai tujuan tertentu yang terdapat dalam badan hukum dipunyai juga oleh perseroan terbatas.

c. Mempunyai kepentingan sendiri.

Dalam hubungannya dengan "mempunyai kekayaan sendiri" untuk usaha usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka perseroan terbatas mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak hak subyektifnya sebagai akibat dari peristiwa peristiwa hukum yang dialaminya dan kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Sebab itu perseroan terbatas yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

d. Mempunyai organisasi yang teratur.

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organnya. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia manusia yang duduk dalam organ dipilih, diganti dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggauta yang tidak lain ialah suatu pembagian



tugas. Dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi yang teratur dan merupakan suatu hal yang essentieel bagi badan hukum. Demikian pula halnya dengan perseroan terbatas, ia mempunyai anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendiriannya yang mencerminkan keberadaan suatu organisasi yang teratur. Dalam anggaran dasar ini ditentukan tata tertib organisasi dalam segala aktivitasnya dan bila ada hal hal yang belum tertampung dalam anggaran dasar ini dapat diatur melalui keputusan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini bisa dilihat dari bunyi pasal 8 ayat (1) UUPT dengan jelas menyatakan :

"Akta pendirian Perseroan Terbatas memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri ;
- b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komsaris yang pertama kali diangkat ; dan
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan atau nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor saat pendirian".

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) UUPT menentukan :

"Akta pendirian tidak boleh memuat :

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham ;
- b. ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain".

maka dari uraian diatas dapat dilihat bahwa unsur unsur yang terdapat dalam doktrin (de heersende leer) terdapat pula didalam perseroan terbatas, oleh karenanya perseroan terbatas tak lain adalah badan hukum .

Jadi dilihat dari sudut pandang de heersender leer tentang unsur unsur badan hukum maka perseroan terbatas adalah badan hukum.<sup>17</sup>

Felix S. Subagio<sup>18</sup> mengemukakan bahwa kriteria untuk menentukan suatu organisasi (perkumpulan) itu merupakan suatu badan hukum ialah apabila memenuhi syarat syarat tertentu yang dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok yaitu :

1. Syarat syarat menurut doktrin, sebagaimana telah diuraikan diatas ;
2. Syarat syarat menurut perundang undangan, sebagaimana telah disebut dengan jelas pada pasal 1 ayat 1 UUPT ;
3. Syarat syarat menurut kebiasaan atau yurisprudensi (keputusan keputusan pengadilan).

Dengan demikian sebagai badan hukum, perseroan terbatas telah memenuhi syarat syarat secara teoritis (doktrin) dan syarat syarat menurut perundang undangan.

Bila kita lihat Pasal 3 UUPT secara keseluruhan yang bunyinya sebagai berikut :

- (1). Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
- (2). Ketentuan saham yang dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila :
  - a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak dipenuhi ;
  - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata mata untuk kepentingan pribadi;

---

17. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.27

18. Felix S Subagio, *Himpunan Modul Pendidikan Praktisi Hukum Perusahaan*, Tidak Dipublikasikan, Tanpa Tahun, hal.9

- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan ; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

maka dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa masalah badan hukum sebenarnya adalah masalah pertanggung jawaban.

Pasal 3 ayat (2).a tersebut diatas menegaskan bahwa pemegang saham akan bertanggung jawab secara pribadi dan tak terbatas pada nilai saham yang dimilikinya atas perbuatan hukum perseroan terhadap pihak ketiga apabila perseroan belum atau tidak mendapatkan status sebagai badan hukum. Timbul persoalan, apakah sudah ada pemegang saham pada saat PT belum disahkan sebagai badan hukum ?

Bila kita mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) UUPT :

"setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan".

jawabnya *telah ada* pemegang saham dari perseroan terbatas sebelum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman yaitu para pendirinya. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) ini menegaskan bahwa saham yang harus diambil oleh para pendiri ialah pada saat *didirikan* bukan pada saat pengesahan. Dengan demikian pemegang saham sebelum perseroan terbatas disahkan menjadi badan hukum adalah para pendirinya yang harus bertanggung jawab secara pribadi dan tak terbatas pada jumlah nilai saham yang dimilikinya terhadap pihak ketiga atas perbuatan atau tindakan perseroan sebelum mendapat pengesahan sebagai badan hukum.

Walaupun didalam UUPT sudah jelas menentukan bahwa status badan hukum itu melekat pada PT setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (6) UUPT yang menyatakan :

"Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri".

namun ada baiknya kita melihat kebelakang, dimasa lalu untuk mengetahui saat saat kapan perseroan mendapatkan status badan hukumnya sebab menurut hemat penulis masih tetap relevan untuk diketahui baik sebagai latar belakang sejarah maupun sebagai pengetahuan untuk memahami motivasi dasar adanya konstruksi badan hukum seperti halnya PT.

Didalam praktek, sebelum berlakunya UUPT pernah timbul keragu ragan kapan sebenarnya status badan hukum itu melekat pada sebuah perseroan sehingga merupakan lembaga yang mandiri, berdiri sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak pernah secara tegas diketemukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang bagaimana status perseroan dalam periode setelah anggaran dasar tersebut dibuat oleh para pendiri sampai ia di publikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1971 Departemen Kehakiman pernah menyatakan bahwa suatu Perseroan Terbatas (PT) memperoleh status badan hukum setelah anggaran dasarnya mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

setempat dan diumumkan dalam Berita Negara R.I.<sup>19</sup>

Demikian pula dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 433/71/C/Bdg/Bantahan<sup>20</sup> dalam perkara Rama vs. H.Abas Ubadi Cs. juga mengikuti pandangan ini. Sengketa bermula dari keputusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara lain antara H.Abas Ubadi selaku penggugat dan Teja Sukmana sebagai tergugat. Penggugat telah minta sita jaminan atas sebuah mobil Chevrolet Impala untuk mengamankan gugatannya. Permohonan tersebut dikabulkan sehingga pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil tersebut pada tanggal 29 Mei 1971. Namun demikian PT Pudja dalam hal ini diwakili oleh Rama selaku Direktornya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk membatalkan penyitaan tersebut atas dasar, pertama, Teja Sukmana bukanlah pemilik mobil, kedua, pemilik mobil tersebut adalah PT Pudja sebagai suatu badan hukum. Sebelum membahas masalah masalah lainnya, dalam hal ini pengadilan, pertama tama hendak menentukan apakah PT Pudja telah merupakan suatu badan hukum sesuai dengan undang undang, dengan demikian mempunyai kekayaan yang terpisah dari individu individu dalam perseroan dan disamping itu mempunyai hak menggugat di pengadilan. Pengadilan menemukan bahwa pada tanggal 24 Oktober 1952 di Bandung telah didirikan suatu perseroan yang diberi nama NV.Sumber Motor. Pada tanggal 9 Februari 1957 rapat pemegang saham perseroan

---

19. Erman Rajagukguk, *"Indonesianisasi Saham"*, (Jakarta, Bina Aksara, 1995), hal.29

20. Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, (Bandung, Alumni, 1976), hal.299

tersebut telah mengubah pasal 1 dari anggaran dasarnya dengan mengganti nama perseroan menjadi PT. Pudja & Industrial Corporation. Ternyata anggaran dasar dari NV.Sumber Motor dan perubahannya belum didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung dan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengadilan mengatakan bahwa pasal 38 Kitab undang Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa para pendiri wajib mendaftarkan anggaran dasar perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan kemudian mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar juga harus mengikuti prosedur yang sama. Atas dasar ketentuan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa PT Pudja bukan merupakan badan hukum dengan alasan bahwa PT Pudja tidak memenuhi syarat syarat yang diminta pasal 38 KUHD maka ia tidak mempunyai status rechtspersoon, karena kalau tidak pernah dilakukannya pengumuman hanyalah diperlakukan sebagai suatu firma. Menimbang, pembantah tidak mempunyai status rechtspersoon maka tidak dapat maju ke pengadilan sebagai pihak yang akan mengajukan gugatan/bantahan oleh karenanya bantahannya harus ditolak.

Pengadilan Tinggi Bandung dalam tingkat banding dalam putusannya Nomor 171/1972/Perd/PTB<sup>21</sup>, memperkuat putusan pengadilan negeri Bandung, demikian pula Mahkamah Agung melalui keputusannya Nomor 1139/K/Sip/1973<sup>22</sup> membenarkan putusan pengadilan negeri Bandung.

---

21. *Ibid.* hal.296

22. *Ibid.* hal.291

Akan tetapi dibelakang hari, Mahkamah Agung dengan keputusannya Nomor 297K/Sip/1974<sup>23</sup> mengubah pandangan tentang status badan hukum suatu perseroan terbatas. Didalam perkara Tjhin Min Yoe vs. Hamlan Hs. Mahkamah Agung memutuskan bahwa status perseroan terbatas menjadi badan hukum yaitu pada saat anggaran dasarnya mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Namun sampai pendaftarannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pengumumannya di Berita Negara Republik Indonesia, para direktur perusahaan baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri bertanggung jawab pada pihak ketiga untuk tindakan tindakan yang dilakukan atas nama perseroan.

Perkara ini timbul dari persengketaan antara Hamlan Hs selaku Direktur Utama PT. Pancamitra sebagai penggugat dan Thio Guan Hoe selaku tergugat I dan Tjhin Min Yoe selaku tergugat II atas sebuah rumah di Jl.Mangga Besar No.124 Jakarta. Bahwa penggugat telah berperkara dengan ayah tergugat I di Banjarmasin, dalam perkara itu telah disita harta benda milik ayah tergugat I. Oleh karena jumlah barang barang yang disita di Banjarmasin masih belum cukup guna menjamin hak penggugat, maka melalui Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dimohonkan pensitaan rumah tersebut diatas. Akan tetapi pada saat pelelangan akan dilakukan ternyata rumah tersebut telah menjadi milik tergugat II yang membelinya dari tergugat I. Penggugat mendalilkan bahwa rumah tersebut yang dibeli oleh ayah tergugat I kemudian dibalik

---

23. *Ibid.* hal.310

nama menjadi atas nama tergugat I, dimaksudkan agar terlepas dari tuntutan hukum PT. Pancamitra yang mempunyai tagihan terhadap ayah tergugat I sehubungan dengan transaksi karet kualitas ekspor senilai Rp. 18.900.000.- perbuatan mana menurut penggugat telah merugikannya.

Pengadilan negeri sebelum sampai pada masalah-masalah lain pertama tama membahas apakah PT Pancamitra sudah merupakan badan hukum atau belum. Berdasarkan isi daftar penetapan Menteri Kehakiman di Jakarta tanggal 18 Juli 1961 No.J.A5/57/18, ternyata penetapan tersebut telah memberikan pengesahan atas anggaran dasar PT Pancamitra sebagai badan hukum.

Berdasarkan pertimbangan ini, pengadilan memutuskan dengan putusan Nomor 429/1970/G<sup>24</sup> menyatakan bahwa PT Pancamitra adalah badan hukum.

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya Nomor 119/1973/PT Pdt<sup>25</sup>, telah memperkuat pertimbangan pengadilan negeri dengan menolak dalil penggugat II pembanding, bahwa PT Pancamitra bukan merupakan suatu badan hukum karena belum didaftarkan pada pengadilan negeri yang bersangkutan dan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi menolak dalil ini dengan mengatakan bahwa dengan adanya pengesahan (bewilging) dari Menteri Kehakiman, suatu Perseroan Terbatas (PT) sudah merupakan suatu badan

---

24. *Ibid.* hal.324

25. *Ibid.* hal.318



hukum, sedangkan belum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman dari naskah (akte anggaran dasar) membawa akibat bagi pertanggungjawaban pengurus terhadap pihak ketiga (ps.39 Wv.K).

Mahkaman Agung dalam tingkat kasasi kemudian memperkuat juga pendapat Pengadilan Tinggi mengenai hal ini dengan mengatakan bahwa seandainya PT Pancamitra belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun hal ini tidak berarti bahwa PT tersebut belum merupakan suatu badan hukum melainkan hanya pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga adalah seperti diatur dalam pasal 39 Wv.K. Hal ini tidak mempunyai akibat hukum bahwa PT tersebut tidak mempunyai *persona standi in Iudicio*.

Pendapat ini pernah pula dianut oleh Pengadilan Negeri Semarang melalui putusannya Nomor 224/1950/Perdata<sup>26</sup> dalam perkara Roosman vs. NV.Sendiko.

Raden Roosman selaku bekas Presiden Direktur Perusahaan Otobis NV Sendiko telah menggugat NV Sendiko, karena tergugat telah lalai membayar honorarium penggugat sejak bulan Juli 1950 sampai dengan berhentinya penggugat dari perusahaan tersebut 1 Oktober 1950. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah masalah lain perlu memutuskan terlebih dahulu apakah NV Sendiko suatu badan hukum atau tidak, oleh sebab hal ini sangat penting artinya untuk dapat atau tidak diterimanya gugatan penggugat terhadap NV Sendiko.

---

26. Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang Di Indonesia*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982), hal.115

Menurut hakim, berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang pengesahan Menteri Kehakiman adalah suatu syarat mutlak bagi berdirinya suatu persekutuan sero (NV) sebagai badan hukum.

Dalam kenyataannya NV Sendiko belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum (rechtspersoon), sehingga menurut hemat pengadilan perseroan tadi hanya merupakan suatu perjanjian (Overeenskomst) belaka diantara pesero pesero berdasarkan akta pendirian yang dibuat dimuka wakil notaris. Dengan mengutip Pasal 39 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pengadilan kemudian berpendapat bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat selaku persekutuan sero adalah tidak tepat, sebab seharusnya yang digugat itu ialah semua orang orang (pesero pesero) yang telah menanda tangani perjanjian sebagaimana dibuat dimuka wakil notaris dan diangkat menjadi pengurus. Oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dari beberapa contoh kasus tersebut diatas, selama ini didalam praktek, sebelum berlakunya UUPT, dapatlah dikatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memperoleh status badan hukum jika anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Sebelum anggaran dasarnya mendapat persetujuan, semua pemegang saham dan pengurusnya secara bersama sama atau sendiri sendiri bertanggung jawab secara tak terbatas atas kewajiban kewajiban perseroan tersebut.

Sejak hari persetujuan dari anggaran dasar sampai dengan diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, Perseroan Terbatas sudah berkedu-

dukan sebagai badan hukum dengan tanggung jawab terbatas dari para pemegang sahamnya. Namun pengurus perseroan tersebut baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri bertanggung jawab terhadap kewajiban perseroan kepada pihak ketiga. Setelah anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, barulah para pemegang saham dan pengurusnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan kepada pihak ketiga.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, permasalahan status badan hukum sebenarnya adalah masalah pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, siapakah yang bertanggung jawab akibat perbuatan hukum perseroan sebelum dan sesudah mendapat status badan hukum. Uraian diatas telah menjelaskan seberapa jauh tanggung jawab pemegang saham pada saat perseroan belum maupun sudah berstatus badan hukum sebagaimana terlihat didalam pasal 3 UUPT. Sementara itu pasal 11 UUPT mengatur tentang tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan pada perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum para pendiri yang dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum yaitu melalui penerimaan secara tegas semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri, mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Selengkapnya bunyi Pasal 11 UUPT adalah sebagai berikut :

- (1). Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :
  - a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
  - b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan ; atau
  - c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
- (2). Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Dalam penjelasannya Pasal 11 UUPT, mengatakan bahwa kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas seharusnya merupakan kewenangan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi mengingat bahwa RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat pada pihak ketiga.

### 3. Pendirian perseroan berdasarkan perjanjian.

Suatu perseroan terbatas berdiri atau ada semata mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Demikian ditentukan dalam Pasal 7

ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :

"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT ini menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu Perseroan Terbatas. Tanpa adanya akta otentik ini akan meniadakan eksistensi Perseroan Terbatas sebab akta pendirian inilah nantinya yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Berbeda dengan Firma, walaupun pendiriannya menurut Pasal 22 KUHD diharuskan dengan suatu akta otentik, ketiadaan akta notaris tidak dapat dipakai sebagai alasan bahwa firma tidak ada. Dalam firma ketiadaan akta otentik tidak menghalangi keberadaan firma. Akta hanya merupakan alat bukti utama adanya firma. Kalau akta ini tidak ada masih dimungkinkan mempergunakan alat bukti lain tentang keberadaan firma.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa akta otentik bukanlah syarat mutlak untuk adanya suatu firma, karenanya menurut Nindyo<sup>27</sup> kata *harus* yang terdapat dalam pasal 22 KUHD tersebut mengandung arti *dapat*. Bila dibandingkan dengan rumusan dalam peraturan lama (KUHD) hal ini berlainan sekali sebab rumusan pasal 38 KUHD dengan tegas menyatakan bahwa pendirian Perseroan Terbatas haruslah dengan akta otentik, ketiadaan akta notaris ini dapat menyebabkan Perseroan Terbatas dianggap tidak ada (batal), sedangkan bagi Firma ketiadaan akta otentik tidak menjadikan Firma tak ada karena

---

27. Nindyo Pramono, op.cit. hal.22

bisa dibuktikan dengan bukti lainnya.

Hal demikian ditegaskan pula dalam UUPT Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1), (2) UUPT yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1). Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2). Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu perseroan terbatas haruslah di penuhi unsur unsur sebagai berikut :

- a. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan.
- b. Ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- c. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan notaris (notariel) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Sejak ditanda tangani akta pendirian perseroan oleh para pendirinya maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Agar suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak menurut Pasal 1320 KUH Perdata, harus dipenuhi empat persyaratan utama yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Perikatan harus mengenai sesuatu hal tertentu.
4. Perikatan harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Perikatan yang memenuhi unsur unsur tersebut diatas secara hukum mengikat para pihak. Demikian juga terlihat pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Sutomo vs. Ahyu Forestry Company Ltd.<sup>28</sup> Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dan membenarkan perjanjian (patungan) antara penggugat dan tergugat telah mengikat para pihak.

Perkara ini timbul dari adanya perjanjian (patungan)<sup>29</sup> antara Sutomo selaku Direktur Utama PT Balapan Jaya (Balapan), sebuah perusahaan Indonesia dan tergugat Ahyu Forestry Company Ltd. (Ahyu) sebuah perusahaan Korea sehubungan dengan pengusahaan hutan di Kalimantan Barat. Perjanjian (patungan) antara kedua belah pihak antara lain memuat

---

28. Putusan Mahkamah Agung No.294K/SIP/1981, sebagaimana dikutip Erman Rajagukguk, op.cit.hal.14

29. Pada tanggal 22 Januari 1974, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan baru dalam penanaman modal asing yaitu dengan tidak mengijinkan lagi 100 % pemilikan perusahaan oleh pihak asing dalam penanaman modal, dengan demikian kerjasama dengan modal nasional dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture) merupakan suatu keharusan. Satu satunya bentuk perusahaan patungan (joint venture) yang dapat didirikan adalah Perseroan Terbatas. Selanjutnya penyertaan modal nasional baik dalam investasi yang lama maupun yang baru setelah keluarnya kebijaksanaan ini harus menjadi 51 % dalam jangka waktu 10 tahun. (KEPUTUSAN SIDANG STABILISASI EKONOMI NASIONAL tanggal 22 Januari 1974 dan SURAT EDARAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NO.B-1195/A/BKPM/X/1974 tanggal 14 Oktober 1974)

ketentuan bahwa para pihak setuju untuk mendirikan suatu perusahaan patungan yang diberi nama PT Ahyu Balapan Timber. Setelah perselisihan timbul, Balapan mengajukan gugatan terhadap Ahyu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan mendalilkan bahwa tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan etiked baik. Penggugat mengatakan bahwa tergugat telah menjalankan perusahaan bertentangan dengan ketentuan dari Direktorat Jendral Kehutanan Departemen Pertanian RI antara lain tidak melaksanakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ekspor kayu pada tahun 1979. Ditambahkan pula bahwa tergugat tidak pernah menyerahkan bukti-bukti keuangan sehubungan dengan aktifitas perusahaan patungan kepada akuntan publik. Selanjutnya tergugat telah menolak untuk mengekspor sisa kayu yang ada, hal mana telah merugikan penggugat. Sebaliknya tergugat mengatakan bahwa Pengadilan sebenarnya tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 15 dari Akta Perjanjian Patungan. Menurut Pasal 15, suatu arbitrase akan dilaksanakan di International Chamber of Commerce (ICC) Paris, dalam hal terjadi perselisihan dan pertikaian antara para pihak. Namun Pengadilan Jakarta Utara berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa perkara ini, sejak para pihak gagal mencapai perdamaian yang diusahakan hakim. Selanjutnya Pengadilan Negeri memutuskan antara lain bahwa perusahaan patungan PT Ahyu Balapan Timber harus dijalankan oleh penggugat menggantikan tergugat. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam tingkat banding, menguatkan putusan ini tanpa memberikan uraian hukum. Sebaliknya Mahkamah Agung menerima dalil Ahyu (penggugat dalam kasasi) yang



menyatakan bahwa berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian telah mengikat para pihak, yaitu dalam hal ini segala persengketaan yang timbul dalam perjanjian patungan antara penggugat dan tergugat akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai kesepakatan yang tertuang dalam pasal 15 dari perjanjian patungan tersebut. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan pengadilan bawahan dalam perkara ini. Perikatan tidak akan berakhir atau diakhiri tanpa persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk membatalkan persetujuan tersebut. Dan selanjutnya perikatan harus dilaksanakan dengan etika baik.

Setelah diperolehnya status badan hukum maka perseroan adalah badan yang mandiri dan hubungan antara para pendiri tidak lagi merupakan hubungan kontraktual, pendiri sebagai pemegang saham tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Inilah ciri bentuk perusahaan perseroan terbatas, ia merupakan badan yang mandiri, didirikan berdasarkan perjanjian, modalnya terbagi dalam saham dan pemegang saham tidak dapat dituntut menanggung kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya. Namun walaupun demikian, dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas itu apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan semata-mata didirikan sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi pemegang saham.

Undang undang menetapkan bahwa pendirian perseroan adalah berdasarkan perjanjian. Karena berdasarkan perjanjian tentunya paling sedikit harus ada dua orang yang melakukan perjanjian. Dalam kaitan ini UUPT secara konsisten mempertahankan komposisi dua orang tersebut, seperti dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) yang menetapkan bahwa :

- (3). Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
- (4). Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

dengan demikian dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain dan apabila setelah lewat enam bulan pemegang saham masih tetap kurang dari dua orang maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Disini nampak bahwa undang undang tidak membolehkan saham perseroan berada dalam satu tangan, apabila hal ini dilanggar konsekwensinya pemegang saham tunggal akan bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga kendati perseroan telah berstatus sebagai badan hukum.

Penetapan pasal ini mengandung azas larangan pemegang saham tunggal dan secara konseptual larangan pemegang saham tunggal mengandung beberapa makna :<sup>30</sup>

- a. Menjamin unsur perjanjian dalam pendirian perseroan tetap tercermin.
- b. Menghindari penyelundupan tanggung jawab pribadi dari pemegang saham dengan menggunakan bentuk usaha perseroan terbatas. Disamping itu pemegang saham tunggal kurang mencerminkan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham saham yang dimaksudkan untuk mengikut sertakan pihak lain dengan sistem pertanggung jawaban terbatas.
- c. Mewujudkan dasar kekeluargaan yaitu terhadap pelanggaran atas larangan ini menyebabkan pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau tindakan perseroan kepada pihak ketiga.

Demikian dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21K/SIP/1973<sup>31</sup> yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara PT Tujuh belas antara O.Sibarani vs. PT Perusahaan Pelayaran Samudera "Gesuri Lloyd", dengan menyatakan membenarkan pendapat Pengadilan

---

30. Bagir Manan, *Interaksi, Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional, 1995), hal.13

31. Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia, Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions)*, Jilid 2, (Bandung, Aditya Bakti, 1992), hal.14

Tinggi Jakarta, karena PT Tujuh Belas merupakan Badan Hukum dan berdasarkan penilaian pembuktian, Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa PT Tujuh Belas adalah suatu PT yang praktisnya adalah suatu perusahaan milik satu orang yaitu milik pelawan, Mr.Drs.O.Sibarani, maka mengingat banyaknya jumlah hutang PT tersebut yang tidak dijamin oleh harta keuangan lainnya dari perusahaan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pembeslahan eksekusi (executorial beslag) atas gedung milik pelawan dapat dibenarkan.

Putusan ini mencerminkan bahwa pemilikan saham tunggal tidak bisa ditolelir dan konsekuensinya pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi terhadap hutang hutang perseroan pada pihak ketiga. Disamping itu pemilikan saham tunggal tidak mencerminkan adanya unsur perjanjian dalam pendirian perseroan yang mengakibatkan pula modal perseroan tidak terbagi dalam saham saham yang dimaksudkan untuk mengikut sertakan pihak lain dengan sistem pertanggung jawaban terbatas.

Bila kita mengacu kepada UUPT maka putusan Mahkamah Agung ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) yang mengharuskan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan.

Untuk jelasnya, putusan Mahkamah Agung tersebut di jatuhkan pada perkara yang pokok permasalahannya bermula dari gugatan PT Gesuri Lloyd terhadap PT Tujuh Belas di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (kemudian menjadi Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat) berkaitan dengan pengiriman 5000 peti susu yang telah diterima oleh PT Tujuh Belas namun belum dibayarnya. Oleh karena PT Tujuh Belas sudah tidak punya lagi harta kekayaan yang dapat menjamin tuntutananya maka PT Gesuri dalam perkara No.91/1968/G memohon sita jaminan atas sebuah rumah gedung yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.24 yang ditempati dan milik pribadi O.Sibarani selaku pendiri dan Direktur Utama PT Tujuh Belas. Atas permohonan tersebut, pengadilan meletakkan sita jaminan atas rumah gedung milik pribadi O.Sibarani yang terletak di Jl. Sam Ratulangi No.24 Jakarta. Pengadilan Negeri setelah melalui persidangan, memutuskan memenangkan PT Gesuri Lloyd dan mengabulkan tuntutananya dengan pertimbangan selaku Direktur Utama dan pendiri PT Tujuh Belas, tergugat tidak dapat mengelakkan diri dari tanggung jawab pribadi serta harta tergugat terhadap hutang hutang yang ditimbulkannya akibat diterimanya oleh tergugat 5000 peti susu tersebut dari tangan penggugat.

Dalam tingkat banding, dengan putusan No.183/1969/PT. Perdata, tanggal 24 Pebruari 1970, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Oleh karena tergugat tidak mengajukan kasasi maka putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.91/1968 G tanggal 29 April 1969 putusan mana diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.183/1969/PT.Perdata, tanggal 24 Pebruari 1970 tersebut diatas, PT Gesuri Lloyd sebagai penggugat dalam susunan

perkara antara perusahaan tersebut lawan PT Tujuh Belas telah mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta agar dilakukan penyitaan eksekusi atas barang barang bergerak dan tidak bergerak milik dari tergugat PT Tujuh Belas yang terletak di Jl.Dr.Sam Ratulangi No.24 Jakarta. Dan pada tanggal 29 Desember 1970 telah dilaksanakan penyitaan eksekusi atas gedung yang terletak di Jl.Dr.Sam Ratulangi No.24 Jakarta tersebut.

Terhadap penyitaan eksekusi ini tergugat mengajukan perlawanan (verzet) melalui surat bantahannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 13 Januari 1971 dibawah No.28/1971 G yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gedung tersebut bukan milik PT Tujuh Belas dan tidak ada sangkut pautnya dengan PT Tujuh Belas. Gedung tersebut dibelinya pada tahun 1954 sedangkan PT Tujuh Belas didirikan pada tahun 1959 (bukti sertifikat).

Oleh karena itu penyitaan eksekusi yang dilakukan oleh PT Gesuri Lloyd diatas merupakan suatu onrechtmatige daad yaitu tindakan penyitaan eksekusi terhadap barang orang lain sehingga segala kerugian materieel immaterieel yang timbul atau akan timbul harus dipikul oleh PT Gesuri Lloyd.

Berdasarkan alasan tersebut diatas pembantah mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta agar penyitaan eksekusi atas gedung yang terletak di Jl.Dr.Sam Ratulangi No.24 Jakarta, dicabut dan ongkos dibayar oleh beslag-legger.

Atas bantahan ini terlawan-penyita mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidaklah tepat dalil pembantah yang mengatakan gedung yang terletak di Jl.Dr. Sam Ratulangi No.24 Jakarta dimana kantor dan alamat PT Tujuh Belas berada tidak mempunyai sangkut pautnya dengan PT Tujuh Belas, karena pembantah sendiri akui bahwa gedung tersebut adalah milik pribadinya pembantah, tetapi pembantah tidak menyatakan terus terang dalam bantahannya itu bahwa pembantah adalah pendiri dan direktur utama PT Tujuh Belas tersebut. Menurut hukum semua harta benda seseorang menjadi tanggungan terhadap hutang yang dia perbuat, apakah harta benda itu dia peroleh sebelum atau sesudah hutang itu terjadi. Sebab itu dalam perkara ini, rumah milik pembantah yang dia perbuat jauh sebelum pembantah mendirikan PT Tujuh Belas, juga turut menjadi jaminan akan hutang yang pembantah perbuat diakibatkan diterimanya oleh pembantah dari tangan terbantah 5000 peti susu dengan baik. Telah terbukti bagi terbantah, domisili atau alamat resmi PT Toko Tujuh Belas adalah Jl.Dr. sam Ratulangi No.24 Jakarta dimana direktur utamanya dan juga pendirinya adalah pemilik rumah tersebut dan bertempat tinggal di alamat tersebut pula. Lebih lanjut terbantah minta dibuktikan oleh pembantah bahwa PT Toko Tujuh Belas yang pembantah dirikan dan pimpin itu adalah benar benar suatu badan hukum yang sempurna menurut hukum yang berlaku di Indonesia ini, yakni apakah akta pendirian PT ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI, telah diumumkan dalam Berita Negara RI, dan apakah sudah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta ? Ter-

bantah juga minta agar akta notaris pendirian PT Toko Tujuh Belas ini beserta perubahan perubahannya diberikan kepada terbantah untuk dilihat dan dipelajari sebaik baiknya oleh terbantah dan Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Disamping itu apakah PT Toko Tujuh Belas ini mempunyai harta kekayaan tersendiri, dan apakah PT Tujuh Belas yang pembantah pimpin ini melaksanakan pembukuan yang baik seperti diwajibkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) ?.

Jika salah satu point point yang tersebut diatas tidak sempurna dilaksanakan oleh pembantah dalam memimpin PT Toko Tujuh Belas maka menurut hukum pembantah selaku direktur utama dan pendiri tidak dapat mengelakkan diri dari tanggung jawab pribadi serta harta pembantah terhadap hutang hutang yang ditimbulkan akibat diterimanya oleh pembantah 5000 peti susu dari tangan terbantah dan dengan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.91/1968 G yang diperkuat dengan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.183/1969 PT Perdata, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (karena pembantah tidak kasasi).

Berdasar hal hal tersebut diatas, terbantah mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta untuk menolak bantahan pembantah seluruhnya dan melaksanakan pelelangan barang barang yang disita oleh Bapak Ketua atas dasar keputusan Pengadilan Negeri No.91/1968 G yang diperkuat dengan keputusan Pengadilan Tinggi No.183/1969 PT Perdata, untuk melunasi hutang pada terbantah (penggugat dalam perkara No.91/ 1968) dan selanjutnya menghukum pembantah membayar ongkos perkara.



Dalam perkara ini, pada tanggal 14-10-1971 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dulu Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) menjatuhkan putusan No.28/1971 G yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan terhadap penyitaan executorial tersebut beralasan, menyatakan bahwa pelawan tersebut adalah pelawan yang benar dan memerintahkan pencabutan penyitaan tersebut. Dasar pertimbangannya, antara lain gedung yang terletak di Jl.Dr.Sam Ratulangi No.24 Jakarta memang benar benar milik pelawan D.Sibarani bukan milik PT Tujuh Belas, dengan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan No.128 tanggal 4 Agustus 1970 Konversi Eigendom No.14141, dan No.129 tanggal 4 Agustus 1970 Konversi Eigendom No.14340, atas nama pelawan pribadi, terhadap hal ini terlawan tidak membantahnya. Kemudian dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 30 Juni 1959 No.52 terbukti bahwa PT Toko Tujuh Belas didirikan pada tanggal 30 Oktober 1957, disahkan (bewilligd) oleh Menteri Kehakiman dengan Ketetapan tanggal 11-1-1958 No.JA 5/2/3 dan didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.1442 pada tanggal 6-8-1958. Dengan dasar ini telah ternyata bahwa PT Toko Tujuh Belas telah merupakan badan hukum, oleh karenanya yang bertanggung jawab tetap PT dan bukan pengurusnya, dalam hal ini pelawan.

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 September 1972 memutuskan dalam putusan No.4/1972 PT Perdata, pada pokoknya menerima permohonan banding dari peming/terlawan penyita tersebut diatas dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Oktober 1971 No.28/1971 G yang dimohonkan peradilan tingkat banding

tersebut. Selanjutnya mengadili sendiri, menyatakan bahwa perlawanan pelawan/terbanding atas pembeslahan eksekusi bertanggal 29 Desember 1970 No.91/1968 6 atas rumah gedung di Jl.Sam Ratulangi No.24 Jakarta, yang dilakukan oleh Panitera : Sulis Sugito, tidak dapat diterima. Menolak perlawanan dari pelawan/terbanding seluruhnya. Dasar pertimbangan antara lain, Pengadilan Tinggi berpendapat PT Tujuh Belas adalah suatu PT yang praktisnya adalah suatu perusahaan satu orang dari tuan Mr.Drs.O.Sibarani, dengan nama PT, pembeslahan eksekusi atas rumah jalan Sam Ratulangi No.24 Jakarta, mengingat banyaknya jumlah hutang dari PT perusahaan tersebut yaitu meliputi \$.32.841,27 yang secara yuridis setelah diperiksa tidak dijamin oleh harta kekayaan lain dari perusahaan, Pengadilan Tinggi berpendapat, pembeslahan ini dapat dibenarkan. Dan putusan Pengadilan Tinggi ini telah dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung No.21/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1973 seperti tersebut diatas.

Pelajaran yang dapat ditarik dari putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi ini ialah bahwa aset dari seorang pengurus PT secara pribadi tidak kebal terhadap tanggung jawab atas hutang hutang PT tersebut pada pihak ketiga.<sup>32</sup>

---

32. Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undng Undang PT Baru*, (Bandung, Aditya Bakti, 1995), hal.299

#### 4. Modal Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT sebagaimana telah dikutip dibagian terdahulu bahwa modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham. Hal ini merupakan konsekuensi terhadap syarat pendirian perseroan yang harus didirikan berdasarkan pada perjanjian. Karena berdasar perjanjian tentunya harus melibatkan paling sedikit dua orang. Undang undang mengharuskan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pendirian suatu perseroan terbatas mengambil bagian sahamnya pada saat perseroan didirikan yang merupakan modal awal perseroan. Dengan demikian modal dasar yang telah disetor merupakan kekayaan pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik perseroan yang pada mula nya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang telah diambilnya. Kekayaan dari perseroan ini di samping merupakan kekayaan realitas juga merupakan jaminan hutang bagi para kreditur perseroan.

Menurut Pasal 7 ayat 2 UUPT yang menyatakan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan merupakan wujud pernyataan kehendak dari para pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas. Sebagai pembanding, hal ini ditentukan juga di dalam peraturan lama (KUHD) Pasal 50 yang menyatakan bahwa pengesahan akta pendirian perseroan terbatas tidak akan diberikan kecuali bila para pendiri yang pertama bersama sama paling sedikit mewakili seperlima dari modal perseroan. Ini berarti bahwa para pendiri menurut ketentuan dalam KUHD harus segera menempatkan modal sekurang kurang nya seperlima dari modal perseroan sebelum akta pendirian nya

mendapat pengesahan, bila hal ini tidak dilakukan maka pengesahan tak akan diberikan.

Kata *perseroan* menunjuk kepada modal *perseroan* yang terbagi dalam *sero* atau saham. Sedangkan kata *terbatas* menunjuk kepada tanggung jawab terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.

Agar suatu *perseroan* dapat berfungsi dengan baik, harus memiliki sejumlah kekayaan sendiri. Kekayaan ini dimulai dengan perolehannya dari para pendiri yang telah mengambil saham dengan kewajiban untuk menyeter sejumlah uang sebesar nilai saham yang telah diambilnya itu. Karena pada setiap saham dicantumkan jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut. Keseluruhan dari jumlah nilai saham tersebut merupakan modal dasar *perseroan*.

Soemitro,<sup>33</sup> menyebutnya sebagai modal saham atau modal *sero* atau didalam bahasa Belanda disebut *maaschappelijk kaapital* atau *statutaire kaapital*, yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian, merupakan jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat surat saham.

Sedangkan Kansil,<sup>34</sup> menyebut modal *perseroan* sebagai modal masyarakat karena jumlah modal yang disebut didalam akta pendirian PT merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat surat saham.

---

33. Rochmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang Undang Pajak Perseroan*, (Jakarta, Eresco, 1979), hal.99

34. Kansil, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta, Aksara Baru, 1985), hal.99

Prasetya,<sup>35</sup> mengatakan bahwa apa yang disebut dengan modal perseroan (maatschappelijk kapitaal atau gemeenschappelijk kapitaal) tiada lain adalah keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada dalam PT.

Misalnya, katakanlah sudah disepakati saham yang ada pada suatu PT terbagi atas seribu lembar saham, masing masing terdiri dari nilai nominal Rp.10.000.- maka yang dimaksud dengan modal perseroan adalah  $1000 \times \text{Rp.10.000.-} = \text{Rp.10.000.-}$  Inilah yang menurut Prasetya disebut sebagai modal perseroan.

Dalam struktur modal perseroan, menurut UUPT dapat dibagi menjadi :

1. Modal dasar (maatschappelijk kapitaal atau gemeenschappelijk kapitaal), adalah modal maksimum dimana dapat dikeluarkan saham tanpa perubahan anggaran dasar dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.
2. Modal yang ditempatkan (geplaatst kapitaal), yaitu sejumlah modal dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri.
3. Modal yang disetor (gestoort kapitaal), adalah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya.

Dapat dikatakan disini bahwa modal awal pada saat perseroan didirikan, para pendiri sudah harus memenuhinya dan merekalah pertama kali yang memberikan modal pada perseroan yang didirikannya itu.

Dalam peraturan lama (KUHD) seperti telah dikemukakan

---

35. Rudhy Prasetya, *op.cit.* hal.110

diatas para pendiri harus ikut serta dalam modal perseroan sekurang kurangnya 20 % pada saat perseroan didirikan dan 10 % modal perseroan sudah harus disetor sebelum diperoleh pengesahan. Sedangkan berapa jumlah minimum modal dasar perseroan tidak ditentukan, begitu pula kapan batas waktu penysetoran penuh harus dilakukan oleh para pendiri yang mengambil saham juga tidak ditentukan, akan tetapi semua itu ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Sebaliknya dalam UUPT ditentukan dengan tegas bahwa suatu perseroan terbatas harus mempunyai modal dasar minimum sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :

"Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)".

Dari modal tersebut paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) sudah harus ditempatkan seperti dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UUPT sebagai berikut :

"Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 sudah harus ditempatkan.

Setiap penempatan modal sudah harus disetor paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal saham yang dikeluarkan demikian bunyi Pasal 26 ayat(2) UUPT seperti dibawah ini :

"Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah disetor paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan".

Dan pada saat pengesahan perseroan, seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh dengan bukti penyeteroran yang sah, Pasal 26 ayat (3) UUPT :

"Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyeteroran yang sah".

Demikian memang UUPT menghendaki agar setelah pengesahan perseroan terbatas sudah dapat menjalankan usahanya dengan modal dasar yang secara penuh telah disetor oleh para pendirinya. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHD Pasal 50 dan 51 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pendiri dapat meminta tenggang waktu untuk pelunasan sisa saham yang belum disetor dan tenggang waktu ini dapat dimintakan perpanjangannya karena perseroan terbatas sudah bisa mulai hanya dengan paling sedikit sepuluh persen dari modal perseroan sudah disetor.

Namun demikian didalam praktek, sebagai contoh pengalaman Purwosutjipto sebagaimana dikutip Nindyo Pramono<sup>36</sup> dari beberapa akta notaris tentang pendirian PT misalnya modal perseroan berjumlah Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) maka menurut pasal 50 KUHD modal yang harus ditempatkan bagi para pendiri adalah :  $1/5 \times \text{Rp.100.000.000.-}$  =Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan pasal 51 KUHD akta notaris itu menyatakan : "Atas tiap tiap saham mana disetor dengan uang

---

36. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.57

tunai 10 % (sepuluh persen) selambat lambatnya satu hari sebelum akta pendirian PT ini diberikan pengesahan oleh Menteri Kehakiman", berarti yang disetor Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), 10 % dari tiap tiap saham yang diambil oleh para pendiri bukan 10 % dari modal perseroan. Seandainya 10% dari modal perseroan seperti yang dikehendaki oleh pasal 51 KUHD tentunya yang disetor adalah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), ternyata didalam praktek pasal 51 KUHD ini sering disimpangi (dilanggar) .

Terhadap hal ini Purwosutjipto berpendapat wajar, sebab kalau para pendiri menyanggupi akan membayar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta) kepada perseroan, kiranya sudah selayaknya mereka harus menyetor 10 % dari yang disanggupkan untuk modal kerja permulaan. Dengan ketentuan ini bagi PT yang permodalannya masih lemah diberi kemungkinan untuk sambil berjalan memperkuat permodalannya dengan bekerja keras.

Nindyo Pramono<sup>37</sup> tidak sependapat dengan pendapat Purwosutjipto tersebut, beliau lebih setuju kalau prinsip perimbangan persentase itu dihitung dari modal perseroan bukan dari modal yang ditempatkan, dengan alasan :

Pertama, Pasal 51 KUHD sendiri menentukan demikian, dan tentunya punya motivasi, yakni memberi perlindungan pada pihak ketiga yang jujur.

Kedua, untuk menghindari spekulasi para usahawan yang tidak bertanggung jawab, tanpa dapat dikontrol, secara pre-

---

37. *ibid.* hal.58



ventif maupun represif perlu diberi ketentuan syarat permor-  
dalan yang relatif besar untuk melindungi pihak ketiga yang  
jujur. Bukankah kenyataannya pihak Departemen Kehakiman  
tidak pernah mengontrol secara langsung apakah jumlah uang  
yang tercantum dalam akta notariil itu benar telah nyata  
nyata disetor atau belum. Bukankah ia hanya percaya hitam  
diatas putih sesuai dengan akta notaris itu. Tidak jarang  
lebih lebih PT tertutup nilai saham yang ditempatkan itu  
tidak pernah riil ditempatkan.

Ketiga, demi kepastian hukum beliau sangat setuju  
dengan pendapat Soekardono<sup>38</sup> yang mengatakan :

"Menurut pendapat saya sebelum dibuktikan bahwa pemakaian  
perkataan *gemeenschappelijk* didalam Pasal 51 KUHD itu meru-  
pakan kekeliruan cetakan didalam Stb. 1847 : 23 (pengumuman  
WvK Hindia Belanda dahulu), adalah tak berdasarkan untuk  
menafsirkannya sebagai *geplaast*.

Lebih lanjut Soekardono mengatakan :

"Terang juga bahwa persediaan minimum dalam kas PT sebanyak  
10 % dari modal dasar akan lebih memperkuat jaminan para  
kreditur".

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata selama  
ini terdapat perdebatan penafsiran pada pasal 50 dan 51 KUHD  
sehingga penafsiran yang cenderung menyimpang dari kehendak  
Pasal 51 KUHD mengakibatkan timbulnya PT yang modalnya  
sangat kecil bahkan secara riil tanpa modal sama sekali (PT  
kosong).

---

38. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Bagian II*,  
(Jakarta, Rajawali Press, 1983), hal.144

Sekarang dengan berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1995, perdebatan penafsiran Pasal 50 dan Pasal 51 KUHD tidak akan terjadi lagi karena Undang Undang No.1 Tahun 1995 telah menentukan didalam Pasal 25 ayat 1 bahwa modal perseroan paling sedikit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Demikian ditegaskan dalam UUPT bahwa pada saat perseroan didirikan, 25 % dari modal dasar tersebut sudah harus ditempatkan (Pasal 26 ayat 1), setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sudah harus disetor 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan (Pasal 26 ayat 2 ). Dan pada saat pengesahan seluruh saham yang dikeluarkan sudah harus disetor penuh dengan bukti penyeteroran yang sah (Pasal 26 ayat 3). Selanjutnya setiap kali pengeluaran saham harus disetor penuh (Pasal 26 ayat 4).

Ketentuan ketentuan tersebut diatas dimaksudkan agar PT selaku perangkat kegiatan ekonomi dapat beroperasi dengan kemampuan modal yang benar benar riil, dan merupakan jaminan bagi pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan PT sehingga penyimpangan penyimpangan didalam praktek tentang manipulasi modal PT dapat dihindarkan.

Sebagai subyek hukum disamping orang, kewibawaan hukum PT patut dijaga oleh karena itu jaminan bagi pihak kreditur perlu dikedepankan agar lembaga hukum ini tidak justru menimbulkan antipati dari masyarakat akan tetapi sebaliknya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Namun bisa dimengerti walau bagaimanapun jaminan bagi pihak ketiga dengan memberi ketentuan syarat modal minimum yang harus ada, jika modal itu relatif kecil jumlahnya jelas sulit untuk dapat

memenuhi fungsinya. Apalagi bila PT tersebut bergerak dibi-  
dang usaha keuangan yang berskala besar dengan sirkulasi  
uang yang besar pula jumlahnya, seperti misalnya PT yang  
mengelola Bursa Efek. Oleh karena itu dalam surat keputusan  
yang bersangkutan paut dengan pemberian izin usaha tertentu  
semacam bursa efek atau pasar modal tersebut sering kali  
ditemukan ketentuan syarat modal minimal yang harus ada dan  
ketentuan syarat bentuk usahanya. Contohnya, Surat Keputusan  
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1199/KMK.010/1991  
Tanggal 30 Nopember 1991 Tentang Perubahan Keputusan Menteri  
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang  
Pasar Modal, didalam pasal 11 ayat (2) ditentukan bahwa  
modal disetor untuk pendirian Bursa Efek di Indonesia sekur-  
ang kurangnya sebesar Rp.7.500.000.000.- (tujuh setengah  
milyar rupiah).

Dalam surat keputusan itu ditentukan jumlah minimal  
modal perseroan yang berbeda dengan UUPT. Akan tetapi hal  
tersebut bukan berarti bertentangan satu sama lain bahkan  
telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25  
ayat (2) UUPT yang menyatakan sebagai berikut :

"Undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur  
bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal  
dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1)".

Dari contoh diatas dapat diketahui begitu besar keten-  
tuan tentang permodalan yang diharuskan ada dan disetor  
penuh bagi badan usaha yang berbentuk PT. Motivasi penentuan  
syarat minimal modal yang sedemikian itu, disamping memberi-

kan kesempatan bagi perusahaan yang benar benar sehat, juga dikandung maksud guna memberi jaminan terhadap pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan perusahaan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) penyetoran in natura dapat dilakukan dan terhadap apa yang dimasukkan (inbreng) itu harus dinilai menurut ukuran ekonomis oleh seorang ahli yang tidak terikat oleh perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUPT yang menyatakan :

"Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan ".

Lebih lanjut dalam UUPT dinyatakan bahwa terhadap inbreng benda tak bergerak harus diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar di tempat kedudukan perseroan itu dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar tersebut ialah agar diketahui oleh khalayak umum dan memberikan kesempatan kepada pihak pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penyerahan benda tak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Demikian ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut :

"Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian".

Penyetoran in natura tersebut pada waktu pendirian harus dicantumkan dalam akta pendirian perseroan, sedangkan

penyetoran yang dilakukan setelah pengesahan perseroan sebagai badan hukum dilakukan dengan persetujuan dalam RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Modal perseroan ini berbeda dengan harta kekayaan PT. Modal perseroan hanya merupakan sebagian dari harta kekayaan PT. Harta kekayaan PT itu selalu berubah ubah sejalan dengan gerak perkembangan usaha PT, sedang modal perseroan itu bersifat relatif tetap. Bahkan bila modal perseroan dikehendaki berubah, perubahan itu harus dibuat dengan akta notarial tersendiri dan harus dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Harta kekayaan PT biasanya akan dapat dibaca dalam neraca dan perhitungan rugi laba yang dibuat pada setiap akhir tahun pembukuan.

Bila kita melihat pada Pasal 61 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

"Setiap tahun buku perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan".

kiranya dapat dikatakan bahwa tujuan pembentukan kas cadangan ini agar kekurangan kekurangan dalam soal keuangan, baik seluruhnya maupun sebagian dapat diatasi. Bahkan lebih lanjut lagi bertujuan untuk menghindari bubarnya perseroan disebabkan gagalnya direksi mencapai tujuan perseroan yang salah satunya adalah meraih keuntungan.

Selanjutnya bila kita melihat lagi pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, UUPT yang menyatakan :

"Akta pendirian tidak boleh memuat :  
a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham" ;

maka larangan tersebut semata mata adalah untuk keamanan modal perseroan. Jangan sampai modal perseroan terkikis sedikit demi sedikit, tersedot hanya untuk membayar bunga tetap atas saham. Dapatlah diperkirakan bagaimana akibatnya jika keuangan perseroan kian hari menunjukkan gejala rugi, tapi masih harus pula membayar bunga tetap atas saham, maka pastilah perseroan akan mengalami jatuh pailit.

Untuk menjaga keamanan kekayaan perseroan, Soekardono<sup>39</sup> memberi nasehat agar dalam akta pendirian diatur tentang :

1. Penempatan modal itu jangan terlalu banyak terjadi dari benda benda, karena kalau penaksiran nilai benda benda itu terlalu tinggi maka perseroan akan rugi ;
2. Peralihan saham, termasuk saham saham yang seluruhnya belum disetor, harus dijaga jangan sampai jatuh pada pemegang saham yang tidak dapat melunasi dengan sempurna.

Di negeri Belanda, menurut Prasetya<sup>40</sup>, telah diambil langkah langkah lebih ketat dalam rangka menjaga harta kekayaan perseroan guna melindungi pihak kreditur. Disana telah diadakan ketentuan apa yang dinamakan perlindungan modal dan harta kekayaan perseroan (*Kapitaal en vermogen bescherming*). Disamping itu diletakkan kewajiban kepada Direksi untuk benar benar menjaga terlaksananya ketentuan tentang adanya modal dan harta minimal yang harus dimiliki oleh perseroan. Menurut Pasal 178 *Burgerlijk Wetboek* Belanda, pada waktu PT didirikan wajib didalam anggaran dasarnya dicantumkan secara

---

39. Soekardono, *Ibid.* hal.171

40. Rudhy Prasetya, *op.cit.* hal.26-28

pasti berapa jumlah modal yang ditempatkan. Dari modal yang ditempatkan ini minimal nyata nyata sudah harus disetorkan sebesar 25 % dari modal yang ditempatkan tersebut. Ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPT yang berarti ukurannya tidak lagi 10 % dari modal perseroan seperti ketentuan dalam Pasal 51 KUHD.

Jika ternyata dikemudian hari modal yang disetorkan kurang dari jumlah itu maka Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya atas segala perbuatan yang telah dilakukannya untuk perseroan, disamping harta kekayaan perseroan yang telah ada. Jadi bila harta kekayaan perseroan tidak mencukupi dalam memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kekurangan pembayaran tersebut. Ini diatur dalam Pasal 180 ayat (2) Burgerlijk Wetboek Belanda.

Bahkan didalam Pasal 126 ayat (2) Burgerlijk Wetboek Belanda untuk menjaga keutuhan modal dan harta kekayaan perseroan guna menjamin tagihan pihak ketiga (para kreditur perseroan) diatur ketentuan yang melarang Direksi membayar bagian keuntungan pada pemegang saham atau pihak pihak yang berhak untuk memperoleh bagian keuntungan tersebut apabila dengan pembayaran itu harta kekayaan perseroan menjadi berkurang dan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada para kreditur PT. Bilamana pembayaran tetap saja dilakukan dengan melanggar ketentuan maka perseroan berhak menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukan itu kendati penerima yang bersangkutan beretikad baik atau jujur.

Di Indonesia masalah modal dan harta kekayaan perseroan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 33. Bunyi pasal pasal tersebut adalah sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1). Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :
  - a. dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang undang ini dan
  - b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.
- (2). Perolehan saham baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan.
- (3). Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang bertitikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 31

- (1). Pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2). Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

#### Pasal 32

- (1). RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 kepada organ lain untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2). Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3). Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

#### Pasal 33

- (1). Saham yang dibeli kembali oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau



Anggaran Dasar.

- (2). Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan untuk menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Kesimpulan dari uraian tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa masalah modal merupakan faktor yang sangat penting artinya bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha PT namun juga, demikian dikemukakan Sri Redjeki Hartono<sup>41</sup>, sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan PT sebagai organisasi ekonomi.

Bagaimanapun modal adalah sarana untuk meraih laba yang sebesar besarnya sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan usaha perseroan yang nantinya dibagi bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden.

## 5. Saham Perseroan

Bila Pasal 1 ayat (1) UUPT yang menyatakan :

"Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi didalam saham",

kita kaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan :

"Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan",

maka sesungguhnya saham itu merupakan sesuatu hak terhadap harta kekayaan perseroan. Oleh karena itu dalam akta pen-

---

41. Sri Redjeki Hartono, op.cit.hal.8

dirian suatu PT pasti dicantumkan jumlah modal PT yang terbagi dalam saham saham.

Ditinjau dari cara mengeluarkannya, menurut Pasal 24 ayat (2) UUPT yang bunyinya :

"Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk ".

maka menurut bunyi pasal tersebut terdapat 2 (dua) jenis saham yaitu :

1. Saham atas nama (op naam, registered stock), adalah saham yang nama pemiliknya sudah tertera didalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak sebab pengalihannya memerlukan prosedur balik nama.
2. Saham atas tunjuk (aan toonder, bearer stock), adalah saham yang tidak menyebut nama pemiliknya dan biasa disebut sebagai saham blanko. Peralihannya tidak memerlukan proses balik nama namun cukup dari tangan ketangan sebab saham ini melegitimasi pemegangnya sebagai pemilik kecuali dibuktikan sebaliknya.

Ketentuan mengenai saham atas tunjuk ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 534 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

"Seseorang dianggap menguasai sesuatu bagi dirinya selama belum terbukti bahwa dia hanya memegang bagi kepentingan orang lain".

Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur tentang peralihan saham atas tunjuk, cukup dilakukan penyerahan secara

fisik, dari tangan ketangan tanpa diperlukan proses balik nama.

Bunyi selengkapnya sebagai berikut :

"Penyerahan tiap tiap piutang karena surat bawa, dilakukan dengan penyerahan surat itu ; penyerahan tiap tiap piutang karena surat tunjuk, dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen".

Sementara itu ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata tersebut didalam UUPT diatur dalam Pasal 49 ayat (4) yang menyatakan :

"Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham".

Masalah saham ini bila kita melihat pada Pasal 26 ayat (3) UUPT yang berbunyi :

"Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyeteran yang sah".

maka menurut ketentuan tersebut diatas terhadap saham atas nama harus sudah disetor penuh pada saat akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti bahwa pembayaran sebagian dari harga saham hanya dapat dilakukan sampai batas waktu pada saat pengesahan akta pendiriannya. Namun demikian saham atas nama ini sudah bisa dikeluarkan terlebih dahulu kendati harga saham baru disetor sebagian saja, yang penting pada saat pengesahan seluruh saham yang dikeluarkan sudah harus disetor penuh.

Berbeda dengan saham atas tunjuk, tidak akan dikeluarkan bila harga saham belum disetor penuh pada kas perseroan.

Hal ini seperti ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (3) UUPT yang menyatakan sebagai berikut :  
"Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh".

Bila kita perhatikan dengan seksama bunyi pasal tersebut diatas, kiranya dapat ditangkap maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi kas perseroan, sebab bila harga saham atas tunjuk itu belum disetor penuh kemudian dialihkan pada pihak lain padahal peralihannya begitu mudah tanpa persyaratan apapun, hanya penyerahan secara fisik dari tangan ketangan, akibatnya sudah bisa diduga bahwa perseroan akan sulit menuntut pelunasan harga saham karena sukar mencari dan mengetahui pemegang saham atas tunjuk itu. Dan lebih lanjut lagi tentu perseroan akan mengalami kerugian karena akan menanggung beban saham kosong.

Didalam praktek, saham blanko tidak akan diberikan kepada seseorang yang akan menjadi pemegang saham (calon pemegang saham) jika nilai nominal saham belum disetor penuh ke kas perseroan. Sebagai gantinya calon pemegang saham akan memperoleh apa yang disebut dengan receipt nota yaitu tanda bukti pemesanan saham yang dapat ditukarkan dengan saham asli apabila nilai nominal saham telah disetor penuh kedalam kas perseroan.

Bila kita lihat kembali Pasal 1 ayat (1) yo. Pasal 24 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (1) :

"Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham"

Pasal 24 ayat (1) :

"Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham"

Jelas kiranya bahwa undang undang menentukan bahwa modal dasar perseroan harus berupa saham saham. Dengan demikian maka saham adalah merupakan modal dari perseroan.

Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) UUPT yang menyatakan :

"Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan"

ini menunjukkan bahwa setiap orang yang sepakat melakukan kerja sama dalam suatu PT harus memberikan andilnya yaitu menyerahkan sejumlah uang sebagai pemasukan kedalam perseroan yang nantinya akan ditukar dengan bentuk saham sebagai bukti keikutsertaan (anggota) dalam PT tersebut.

Dan Pasal 24 ayat (2) :

"Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dan atas tunjuk"

dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa bagi siapa saja yang ikut serta dalam kerja sama PT tersebut dengan memasukkan sejumlah uang ke kas perseroan, kepadanya akan diberikan bukti yang berupa saham baik itu merupakan saham atas nama maupun saham atas tunjuk. Dan baginya akan dapat menikmati hak hak yang melekat pada saham tersebut yang berarti pula melegitimasi pemegang saham, sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 62 ayat (2) UUPT sebagai berikut :

"Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden".

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis saham itu dapat merupakan :

1. bagian dari modal ;
2. tanda anggota ;
3. alat legitimasi.

Demikian pula dikemukakan oleh Rido,<sup>42</sup> menurutnya saham itu mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:

- a. Saham sebagai sebageian dari modal. Dikatakan demikian karena pada dasarnya saham itu merupakan modal, sebagai yang sering dibaca dalam akta pendirian PT. Maka dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham.
- b. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama PT diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai inbreng kedalam perseroan. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota yang disebut persero dari PT dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota.
- c. Saham sebagai alat legitimasi. Artinya ialah saham merupakan suatu surat yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.

---

42. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan, Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN*, (Bandung, Remaja Karya, 1988), hal. 221

Sebagai alat legitimasi, saham merupakan tanda bukti diri bagi orang yang namanya tercantum pada saham tersebut atau bagi orang yang memegangnya, untuk mendapatkan hak-hak yang melekat pada saham itu antara lain adalah hak untuk mendapatkan bagian keuntungan atau deviden, disamping hak hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Sedangkan kewajiban utama bagi pemegang saham ialah menyetor penuh harga saham yang telah diambilnya itu ke dalam kas perseroan.

Didalam praktek, selain saham biasa yang sering terdiri dari saham atas nama dan saham atas tunjuk, dikenal pula beberapa jenis saham perseroan antara lain ialah :

1. Saham preferent atau saham prioritas.

Pemegang saham ini biasanya berbeda dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham prioritas ini mempunyai hak hak istimewa dalam pembagian keuntungan atau hak lainnya. Biasanya saham saham prioritas diterbitkan dalam bentuk saham atas nama dan diberikan kepada para pendiri atau orang orang yang dianggap berjasa dalam PT.

2. Saham preferent kumulatif, yaitu saham saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mendapat bagian deviden pada tahun berikutnya jika pada suatu tahun tertentu PT tidak membagikan deviden karena mengalami kerugian.

3. Saham bonus, yaitu suatu jenis saham yang diberikan kepada pemegang saham lama tanpa penyetoran ke kas perseroan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara modal perseroan dengan kekayaan perseroan.

4. Saham pendiri, yaitu saham yang diberikan kepada orang yang berjasa ikut mendirikan PT sebagai wujud penghargaan

dan pemegang saham jenis ini tidak diharuskan membayar harga nominal sahamnya ke dalam kas perseroan.

Semua saham yang diterbitkan dan sudah diambil oleh pemegangnya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atau buku saham yang dipelihara oleh direksi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 43 ayat (1) UUPT yang menyatakan :

"Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, yang sekurang kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat pemegang saham ;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap tiap klasifikasi saham tersebut ;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ; dan
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)".

demikian pula setiap bentuk peralihan saham, harus dicatat tentang perubahan kepemilikannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut :

"Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham".

Buku Daftar Pemegang Saham tersebut dapat menjadi petunjuk tentang siapa saja yang tercatat dalam daftar tersebut, sehingga secara yuridis dapat merupakan indikator tentang siapa sebenarnya yang berstatus sebagai pemilik dari saham suatu PT. Demikian kandungan maksud dari ketentuan Pasal 43 ayat (5) yang berbunyi :

"Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disediakan ditempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham".



## B. Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri

Bila kita memperhatikan Pasal 10 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

"Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyer-taan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian".

dan Pasal 11 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

"Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
- b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan atau
- c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan".

dari kata sebelum perseroan didirikan dan sebelum perseroan disahkan kita akan mengenal adanya 2 (dua) perbuatan hukum yang dilakukan pendiri yaitu :

- a. pada saat sebelum perseroan didirikan, dan
- b. pada saat sesudah perseroan didirikan tapi belum disahkan sebagai badan hukum.

ad.a. Pada saat sebelum perseroan didirikan.

Seperti telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT bahwa perseroan terbatas terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak yang telah sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas ini disebut sebagai pendiri. Pada awalnya para pendiri dapat melakukan persiapan persiapan yang diperlukan untuk pendirian perseroan tersebut, baik mengenai susunan,

penyertaan modal serta susunan saham perseroan. Pada masa persiapan ini para pendiri sudah mulai melakukan perbuatan hukum yang nantinya akan mempunyai akibat pada perseroan yang didirikannya itu dan juga akan membawa akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan mengingat sudah adanya hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut.

Pada fase ini, penyetoran saham (inbreng) yang dilakukan oleh pendiri dalam bentuk lain yang tidak berupa uang tunai, misalnya gedung beserta tanahnya, demikian pula pembelian barang barang yang dilakukan oleh pendiri, misalnya pabrik beserta perlengkapannya, semata mata dilakukan dengan tujuan untuk memberikan modal (harta kekayaan) pada perseroan dan memisahkannya dari harta kekayaan pribadi masing masing para pendirinya. Penyetoran saham seperti itu yang berupa gedung, pabrik dan perlengkapannya akan menimbulkan suatu hak yang oleh doktrin di Nederland<sup>43</sup> dinamakan hak milik ekonomi (economische eigendom) dari para pendiri PT tersebut. Misalnya, apabila A,B dan C sepakat mendirikan perseroan yang bergerak dibidang perhotelan dan A menyetorkan sahamnya berupa gedung dan tanahnya yang tertulis atas nama A, maka B dan C bersama sama mempunyai pula hak ekonomi atas gedung tersebut. Disini terjadi suatu pemilikan bersama (mede eigendom) dari para pen-

---

43. Herlien, *Pendirian, Fungsi Fungsi Anggaran Dasar Dan Struktur Permodalan Suatu Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya Undang Undang nomor 1 tahun 1995*, (Bandung, Makalah Seminar Tentang Antisipasi Berlakunya Undang Undang nomor 1 Tahun 1995 Terhadap Perkembangan Dunia Usaha, 1995), hal.16

diri atas barang barang dan hak hak yang telah dimasukkan atau dimaksudkan sebagai modal oleh para pendiri. Modal tersebut merupakan suatu kesatuan (*gemeenschap*) dan ditempatkan sebagai kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan masing masing pendiri.

Pitlo,<sup>44</sup> membedakan antara pemilikan bersama yang bebas dan pemilikan bersama yang mengikat dengan batasan bahwa pada pemilikan bersama yang bebas, tujuan dari para pemiliknya tidak lain hanya karena ingin memiliki benda tersebut bersama sama, sedangkan pada pemilikan bersama yang mengikat adalah suatu akibat saja. Dengan demikian para pemilik dalam pemilikan bersama yang bebas, masing masing bebas untuk menguasai dan mengalihkan haknya atas kepemilikan bersama tersebut, sebaliknya dalam pemilikan bersama yang mengikat, masing masing pemilik tidak bebas menguasai bendanya dan melakukan pengalihan haknya. Pendapat ini mewakili pendapat klasik yang selama ini diikuti dalam ilmu hukum.

Lain lagi Schoordijk,<sup>45</sup> pendapatnya boleh dikata progressif, ia membedakan ada atau tidaknya harta bersama yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya. Pemilikan bersama yang mengikat ditandai dengan adanya sifat kebadanhukuman (*rechtspersoonlijkheid*). Selanjutnya pemilikan bersama tersebut dibagi menjadi pemilikan bersama yang sederhana atas satu benda atau lebih, dimana tidak adanya pemisahan harta

---

44. *Ibid.* hal.20

45. *Ibid.* hal.21

kekayaan pribadi masing masing, dan pemilikan bersama atas seluruh benda dimana dikenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi masing masing.

Sehubungan dengan berbagai pendapat tersebut diatas, pemilikan bersama yang terjadi dalam masa persiapan pendirian suatu PT kiranya dapat digolongkan kedalam pendapat Pitlo yaitu dalam pemilikan bersama yang bebas karena pada masa persiapan ini apa yang dilakukan pendiri semata mata merupakan perjanjian pendahuluan dan PT nya sendiri belum terbentuk, dimana pada azasnya setiap hak yang dimiliki seseorang dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam keadaan ini tujuan para pihak adalah untuk bersama sama memiliki. Oleh karena itu pendiri dalam masa persiapan pendirian PT ini belum mempunyai kedudukan apapun dan bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan akibat yang tertuju pada perseroan dengan adanya perbuatan hukum dari pendiri itu, perbuatan mana dilakukan sebelum adanya perseroan (perseroan belum berdiri), perlu diketahui sejauh mana perbuatan itu mengikat perseroan.

Hal ini telah diatur dalam UUPT, bahwa menurut undang undang, kelak perseroan akan terikat pada perbuatan hukum para pendiri apabila dipenuhi syarat syarat, perbuatan hukum para pendiri selain harus dicantumkan dalam akta pendirian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut diatas, juga pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan :

"Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan pada akta pendirian".

menurut ketentuan pasal ini ada suatu keharusan bahwa naskah asli atau akta otentik mengenai perbuatan hukum dari para pendiri itu dilekatkan menjadi satu pada akta pendiriannya. Kelalaian melakukan keharusan itu akan berakibat perseroan tidak terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi :

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan".

ad.b. Pada saat sesudah perseroan didirikan tapi belum disahkan sebagai badan hukum.

Didalam keadaan PT sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris namun belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, kepemilikan bersama tersebut bersifat mengikat, dimana keadaan pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT nya dan dapat disamakan kedudukannya dengan suatu firma. Dengan demikian para pendiri tidaklah bebas untuk mengadakan pemisahan dan pembagian.

Walaupun didalam pasal 11 UUPT ayat (1) sebagaimana telah dikutip diatas dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan akan mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila perseroan secara tegas menerima, mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum dari para pendiri tersebut, akan tetapi masih perlu dipertanyakan keterikatan perseroan mengenai perbuatan hukum yang bersifat perikatan karena hal

ini berkaitan dengan tanggung jawab hukumnya dan juga dari segi fiskalnya, misalnya kalau oleh pendiri telah dilakukan sewa gedung sebelum perseroan disahkan, apakah setelah dilakukan penerimaan, pengambilalihan atau pengukuhan oleh PT, maka PT yang sudah disahkan menjadi badan hukum itu dengan sendirinya menjadi penyewa dari gedung tersebut ? Dan berarti pula perjanjian itu berlaku surut ? Konstruksi hukum seperti ini dapat diterima, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT disahkan berlaku surut sejak PT disahkan sebagai badan hukum karena pengesahan oleh Menteri Kehakiman juga berlaku surut.<sup>46</sup>

Terhadap pembelian benda benda tidak bergerak dimana diperlukan adanya levering atas nama PT, sementara PT nya sendiri belum berkedudukan sebagai subyek hukum karena belum mendapat status badan hukum (belum disahkan) sehingga pihak yang menerima juga belum ada. Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini akan dibutuhkan dua kali levering, yaitu pertama kali atas nama pendiri dan kemudian inbreng ke PT, tentu saja cara yang demikian ini akan menambah biaya. Agar dapat menghemat biaya dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga hak milik ekonomi (*economische eigendom*) seperti yang telah diuraikan diatas yang dikenal dengan perjanjian pengikatan jual beli, dimana pendiri membeli hak ekonomi dari benda tetap dan mendapat kuasa dari penjual untuk mengalihkannya pada PT setelah disahkan menjadi badan hukum. Sebagaimana kita ketahui untuk adanya peralihan

---

46. *Ibid.* hal.19

suatu hak diperlukan adanya orang yang berhak/berwenang untuk mengalihkannya dan menerimanya, adanya alas hak yang sah dan adanya levering sesuai dengan undang undang.

Dari persoalan ini, apakah mungkin untuk mengklasifikasikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebagai perbuatan peralihan hak dengan syarat menangguhkan, dalam arti ditangguhkan peralihan haknya sampai PT disahkan.

Atau semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT disahkan adalah atas nama pendiri yang diperhitungkan sebagai modal (saham) ?

Apabila hal ini dianggap sebagai inbreng dengan cara demikian berarti diperlukan seorang ahli yang independen guna melakukan penilaian harga barang tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) UUPT yang menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan".

Dari uraian diatas jelas kiranya bahwa kedudukan pendiri sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum adalah sebagai pemegang saham yang pertama kali, sebagai pihak yang memberikan modal kepada PT, modal mana terpisah dari harta kekayaan para pendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT yang menyatakan :

"Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan".

Pasal 7 ayat (2) UUPT tersebut mengharuskan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan,

dengan demikian jelas bahwa pengambilan saham (penyetoran modal) adalah pada saat pendirian perseroan bukan pada saat pengesahannya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pendiri adalah juga para pemegang saham dalam perseroan terbatas namun para pendiri masih harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya karena perseroan belum disahkan sebagai badan hukum.

Sekarang bagaimanakah kedudukan pendiri dan tanggung jawabnya setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum ? Bila kita mengacu pada Pasal 7 ayat (2) tersebut diatas kedudukan pendiri pada saat perseroan didirikan tak lain adalah pemegang saham. Dan bila hal ini kita kaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya".

maka dapat dikatakan bahwa pendiri adalah pemegang saham pada perseroan baik pada saat perseroan belum disahkan sebagai badan hukum maupun sesudah perseroan berstatus badan hukum dengan tanggung jawab yang berbeda. Perbedaannya ialah apabila keadaan perseroan belum disahkan menjadi badan hukum maka tanggung jawab pendiri mengikuti ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) :

"Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :



- a. perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
- b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan atau
- c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan".

Pasal 11 ayat (2) :

"Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul".

Jadi dalam keadaan perseroan belum disahkan sebagai badan hukum tiap tiap pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dan tanggung jawab ini akan beralih pada perseroan setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum kemudian melakukan tindakan menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri. Apabila perseroan tidak melakukan tindakan menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum yang dilakukan pendiri maka perseroan tidak terikat dan masing masing pendiri bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya itu.

Kalau perbuatan hukum yang dilakukan pendiri dalam keadaan perseroan belum disahkan sebagai badan hukum, untuk terlepas nya tanggung jawab secara pribadi dari pendiri pada saat perseroan telah disahkan sebagai badan hukum diperlukan tindakan dari perseroan seperti diuraikan diatas, sebaliknya dalam keadaan perseroan telah disahkan sebagai

badan hukum, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan perseroan untuk melepaskan tanggung jawab pendiri secara pribadi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang saham perseroan. Oleh karena itu tanggung jawab pendiri/pemegang saham mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya".

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pendiri/pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas segala perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dan pendiri/pemegang saham tidak dapat dibebani kewajiban membayar kerugian yang diderita perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berapapun jumlah kerugian yang diderita perseroan, pendiri/pemegang saham hanya akan membayar kerugian itu sebatas nilai saham yang telah diambilnya.

Namun demikian UUPT tidak menutup kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* (penerobosan tanggung jawab). Pemegang saham akan bertanggung jawab secara pribadi apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, demikian ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) a yang berbunyi :

"Ketentuan pemegang saham yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :  
a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak terpenuhi ";

Satu satunya syarat untuk memperoleh status badan hukum

adalah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (6) yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

"Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri".

Selama belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, perseroan terbatas belum bisa dikatakan sebagai badan hukum sehingga pada dasarnya tidak berbeda dengan firma, oleh karena itu seluruh pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan atau tindakan perseroan.

Akan tetapi walaupun perseroan terbatas telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, pemegang saham masih juga harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, c, dan d apabila :

1. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata mata untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi apabila pemegang saham menggunakan perseroan sebagai alat untuk memenuhi ambisinya sehingga tidak terpisahkan lagi antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadinya.
2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Disini yang melakukan perbuatan hukum adalah perseroan itu sendiri, sedangkan pemegang saham hanya ikut terlibat saja.
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan

perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Disini pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan secara tidak sah sehingga perseroan tidak dapat melunasi hutangnya.

Disamping ketentuan ketentuan mengenai tanggung jawab pemegang saham seperti tersebut diatas, masih ada beberapa ketentuan yang mengatur hak hak yang dimiliki pemegang saham diantaranya adalah merupakan hak hak baru yang diberikan Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang sebelumnya tidak didapati dalam peraturan lama (KUHD).

Sebelum kita membahas hak hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang saham, ada baiknya terlebih dahulu dibahas tentang istilah pemegang saham yang digunakan dalam bahasa Indonesia terhadap para pemilik saham, sebagaimana terdapat dalam beberapa terjemahan KUHD antara lain dari Subekti dan Tjitrosudibio<sup>47</sup> pada Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi :

"Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil-2 itu".

Didalam Engelbrecht<sup>48</sup>, bahasa asli yang digunakan dalam pasal 40 ayat (2) Wetboek van Koophandel berbunyi sebagai berikut :

- 
47. R.Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Dagang Dan Undang Undang Kepailitan*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1977), hal.15
48. Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet Van Republiek Indonesie*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1989), hal.953

"De vennoten of houders der actien of aandelen zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle beloop derzelve".

Sedangkan dalam KUHD dan Peraturan Kepailitan terjemahan Soemarti<sup>49</sup> Pasal 40 ayat (2) tersebut diterjemahkan sebagai berikut :

"Pesero-pesero atau pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh dari saham saham itu".

Dari beberapa terjemahan tersebut houder dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi pemegang saham dalam bahasa Indonesia. Persoalannya sekarang, apakah pemegang saham dimaksud adalah juga sebagai pemilik saham (eigenaar) ? Padahal didalam bahasa Belanda ada 3 (tiga) istilah yang erat kaitannya dengan kepemilikan atau penguasaan sesuatu benda yaitu : *houden*, *bezitten* dan *eigendom*.

Untuk menjawab persoalan tersebut beberapa sarjana berpendapat :

*Houden*, oleh Algra dan Gokkel<sup>50</sup> diartikan sebagai memegang sesuatu benda secara nyata. Apabila memegang secara nyata tersebut dengan maksud untuk memilikinya maka dikatakan sebagai *bezitten* (menguasai).

Demikian pula Mijnsen dan Schut<sup>51</sup> mengartikan *houden* sebagai menguasai atau memegang sesuatu benda secara nyata.

Lebih lanjut dikatakan bahwa *houden* itu mempunyai 2 (dua)

---

49. Siti Soemarti Hartono, *KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*, (Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hal.16

50. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.76

51. *Ibid.* hal.76

bentuk yaitu menguasai atau memegang sesuatu benda secara nyata untuk dirinya sendiri (bezit) dan menguasai atau memegang sesuatu benda secara nyata untuk orang lain.

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya antara houden dan bezit mempunyai pengertian yang sama.

Sedangkan menurut pasal 529 KUH Perdata yang dimaksud dengan bezit adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang menguasainya, baik sendiri atau dengan perantaraan orang lain seolah olah itu adalah kepunyaan sendiri.

Menurut Soedewi<sup>52</sup> syarat syarat adanya bezit ialah :

1. Corpus, harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya ;
2. Animus, hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Dan kehendak ini adalah kehendak yang sempurna.

Pasal 638 KUH Perdata menjelaskan, bezit atas sesuatu benda itu diperoleh dengan tindakan berupa menempatkan sesuatu benda didalam kekuasaannya dengan maksud untuk tetap mempertahankannya bagi diri sendiri.

Terhadap bunyi pasal ini menurut Soedewi<sup>53</sup>, para ahli banyak yang keberatan karena pertama, ternyata tidak semua bezit itu diperoleh dengan tindakan. Contohnya terhadap harta peninggalan (warisan), ahli waris dari orang yang

---

52. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hal.84

53. *Ibid.* hal.87

meninggal tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk menguasai harta peninggalan dari orang yang meninggal itu, karena secara hukum dengan sendirinya akan memperoleh bezit dari harta peninggalan (warisan) itu. Kedua, istilah kekuasaan itu seharusnya diartikan luas, tidak perlu merupakan kekuasaan langsung, misalnya seorang pesuruh yang mengerjakan sesuatu untuk kita, itu juga berarti menempatkan benda dalam kekuasaannya. Ketiga, mengenai istilah memiliki (behouden) itu juga kurang tepat, karena perolehan bezit tidak perlu dengan maksud untuk tetap memilikinya bagi diri sendiri.

Selanjutnya masih menurut Soedewi<sup>54</sup>, berdasarkan keberatan keberatan tersebut, untuk memperoleh bezit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Dengan jalan occupatio, (mendaku atau menduduki benda nya). Memperoleh bezit dengan cara seperti ini dapat dikatakan juga memperoleh bezit secara origineel (asli), artinya diperoleh secara mandiri tanpa bantuan dari bezitter yang terdahulu. Bisa tertuju pada benda bergerak maupun tak bergerak dan bila tertuju pada benda yang bergerak bisa terhadap benda yang tak ada pemiliknya, misalnya ikan di sungai, burung dan buah buahan di hutan dan lain lain.

2. Dengan jalan traditio (penyerahan bendanya).

Memperoleh bezit dengan cara ini dapat dikatakan memperoleh bezit yang bersifat derivatif, artinya memperoleh

---

54. *Ibid.* hal.88

nya dengan bantuan bezitter yang terdahulu, dari tangan bezitter yang lama ke tangan bezitter yang baru.

Akan tetapi menurut Soedewi, pengertian mengenai bezit itu sendiri didalam praktek antara para ahli sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Mereka hanya sependapat pada satu hal, yaitu bahwa persoalan mengenai bezit termasuk hal yang paling sukar.

Sementara itu Arrest HR 12 Juni 1906 dan 10 Mei 1929 sebagai yang dikutip oleh Vollmar dan Adiwimarta<sup>55</sup>, agar bezit sebagai alas hak yang sempurna, disyaratkan adanya itikad baik. Sedangkan didalam arrest stroman (HR 4 Juni 1920) ditentukan bahwa yang menurut pasal 2014, disamakan dengan peserta ialah bezitter yang memegang sero itu, sebagai kepunyaannya, sebagai hal yang menjadi haknya.

Selanjutnya mengenai istilah eigendom, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria, yang mencabut semua hak hak kebendaan yang berkaitan dengan tanah dari buku II KUH Perdata maka pembahasan masalah eigendom (hak milik) dibatasi pada hak milik selain tanah. Menurut Algra dan Gokkel<sup>56</sup> eigendom diartikan sebagai "absoluut, meest om vattende recht op een zaak". Artinya eigendom sebagai hak untuk menguasai atau memegang sesuatu benda secara mutlak (absolut).

---

55. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal. 79

56. *Ibid.* hal.80



Demikian juga pendapat Vollmar dan Adiwimarta<sup>57</sup> yang mengatakan bahwa hak eigendom adalah hak yang paling luas yang dapat dimiliki seseorang terhadap suatu benda. Pada azasnya si pemilik (eigenaar) itu dapat berbuat apa saja dengan benda itu dan kedudukannya adalah lebih kuat dengan orang yang memegang (bezit) benda itu. Bezitter hanyalah mempunyai suatu bayangan daripada hak.

Simorangkir<sup>58</sup>, dalam buku kamus hukum, menterjemahkan eigendom sebagai milik, hak atas sesuatu barang, yang paling sempurna dan kuat, dapat dikatakan hak mutlak. Sedangkan menurut Pasal 570 KUH Perdata yang dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.

Dari rumusan Pasal 570 KUH Perdata tersebut Soedewi<sup>59</sup> menyimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak hak kebendaan yang lain.

Karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya

---

57. *Ibid.* hal.80

58. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), Hal.55

59. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit.* hal.42

dan menguasainya dengan sebebas bebasnya.

Dengan dikenalnya 2 (dua) jenis saham didalam UUPT, yaitu saham atas nama dan saham blanko atau saham atas tunjuk, menjadikan orang tidak begitu mudah mengetahui apakah seseorang sebagai pemegang saham yang atas tunjuk atau orang yang memegang saham untuk kepentingan orang lain (stroman), namun ia adalah orang yang benar benar memiliki dalam arti eigenaar dari saham tersebut. Demikian pula terhadap saham atas nama seperti yang diperjual belikan dilantai bursa, apakah pemegang saham yang terakhir yang belum sempat dibalik nama adalah dapat disebut sebagai eigenaar ? Padahal ia secara nyata adalah sebagai houder atau bezitter. Oleh karena itu menurut Vollmar dan Adiwi-marta<sup>60</sup> dalam teori hukum dikenal adanya teori legitimasi yang menurut sejarahnya dikenal lebih dulu dalam persoalan eigendom. Menurut teori legitimasi ini seorang yang secara nyata memegang sepucuk saham atas tunjuk atau saham blanko dengan etiked baik, maka ia dilegitimasi oleh hukum bahwa ia adalah orang yang berhak atas saham tersebut. Dengan legitimasi ini ia dinyatakan sebagai eigenaar dari saham tersebut, semula ia hanya sebagai houder kemudian dilegitimasi menjadi eigenaar. Keadaan seperti ini kiranya yang menjadi alasan pembentuk Kitab Undang Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel mempergunakan istilah houder (pemegang saham) dalam memberikan kedudukan hukum kepada pemilik saham.

---

60. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.81

Kembali kepada masalah hak hak pemegang saham, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, mula mula diatur dalam pasal 44 yang menentukan bahwa kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 44 tersebut dikatakan bahwa bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham sedangkan bukti pemilikan saham atas nama diserahkan kepada para pihak dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Hal demikian ini memberikan kebebasan pada perseroan untuk menentukan bukti kepemilikan saham atas nama selain dalam bentuk surat saham asal diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan, misalnya daftar nama yang ada dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang disahkan oleh Direksi. Selain hak pemegang saham seperti telah disebutkan dalam Pasal 44 tersebut diatas masih banyak hak yang diberikan undang undang kepada pemegang saham antara lain ialah :

1. Berhak menggugat perseroan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 54 ayat (2) UUPT :

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris".

2. Berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Pasal 55 ayat (1) UUPT :

"Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. perubahan anggaran dasar ;
- b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseoran ;
- c. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseoran".

3. Berhak atas deviden.

Pasal 62 ayat (2) UUPT :

"Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden".

4. Berhak meminta diselenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

Pasal 66 ayat (2) UUPT :

"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseoran yang bersangkutan".

5. Berhak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.

Pasal 71 ayat (1) UUPT :

"Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya".

Berkaitan dengan hak suara, Pasal 72 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pada dasarnya 1 (satu) saham, untuk 1 (satu) suara dengan tidak menutup kemungkinan anggaran dasar menentukan lain. Dalam hubungan dengan hak suara tersebut, Pasal 53 ayat (4) UUPT menentukan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

6. Berhak diangkat oleh RUPS untuk mewakili perseroan dalam hal anggota direksi terkena larangan mewakili perseroan.

Pasal 84 ayat (3) UUPT :

"Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan".

7. Berhak menggugat direksi atau komisaris ke Pengadilan Negeri.

Pasal 85 ayat (3) :

"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan".

Pasal 98 ayat (2) UUPT :

"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan".

8. Berhak untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan perseroan.

Pasal 86 ayat (3) UUPT :

"Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

9. Berhak memohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan.

Pasal 110 UUPT :

ayat (1) : Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau
  - b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga.
- ayat (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
- ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :
- a. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan pemeriksaan, atau
  - c. kejaksan dalam hal mewakili kepentingan umum.

10. Berhak memohon pada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan.

Pasal 117 ayat (1) huruf b :

"Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas : permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah".

11. Berhak menerima kekayaan hasil likuidasi.

Pasal 124 ayat (2) UUPT :

"Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham".

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pemegang saham disamping mempunyai tanggung jawab juga mempunyai hak yang diberikan oleh undang undang. Dan masih ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham yaitu kewajiban kewajiban yang harus dilakukannya.

Pada dasarnya kewajiban pemegang saham terhadap perseroan ialah :

1. Mematuhi undang undang, anggaran dasar serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perseroan yang bersangkutan.
2. Melunasi pembayaran atas modal yang dikeluarkan dan seharusnya sudah disetorkan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa tidak semua dari modal dasar perseroan harus dikeluarkan pada saat pendirian PT, dan tidak semua modal yang dikeluarkan sudah harus disetorkan pada saat dikeluarkan saham. Mengenai masalah ini Pasal 26 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa pada saat pendirian PT, paling sedikit 25% dari modal dasar sudah harus ditempatkan. Kemudian Pasal 26 ayat (2) UUPT menyambung bahwa setiap penempatan modal dimaksud harus telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
3. Membayar lunas seluruh harga saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (3) UUPT yang menyebutkan bahwa seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat perseroan disahkan menjadi badan hukum. Berkaitan dengan pembayaran saham ini perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 28 UUPT yang menegaskan bahwa pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya.

Kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, kedudukan hukum pendiri berubah menjadi pemegang saham pada perseroan tersebut dan tanggung jawabnya di samping tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga (kreditur) juga tidak dapat dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya atas kerugian yang diderita perseroan.

### C. ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menjelaskan :

"Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang saham, Direksi dan Komisaris".

maka dapat dilihat bahwa perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Komisaris.

ad.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.a. Kedudukan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 3 UUPT yang mengatakan :



"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris".

Akan tetapi bila kita melihat pada bunyi kalimat " *memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris*", maka apa yang dimaksud didalam pasal 1 butir 3 UUPT tersebut diatas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undang undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Direksi atau Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat di pengaruhi oleh RUPS. Tugas, Kewajiban, Wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) didalam Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain misalnya RUPS dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi meskipun Direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan Direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki Direksi adalah merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada Direksi melainkan wewenang yang ada pada Direksi adalah bersumber dari undang undang dan anggaran dasar. Oleh karena itu RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari hari yang dilakukan Direksi sebab tindakan Direksi semata

mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Faham klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi PT, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam suatu PT tiada lain bersumber dari RUPS, kiranya sudah ditinggalkan oleh Undang Undang PT 1995. Berdasarkan faham tersebut, Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS sehingga apabila RUPS menghendakinya sewaktu waktu dapat mencabutnya kembali. Melihat dari pengaturan tentang tugas, kewajiban dan wewenang dari organ perseroan yang oleh UUPT telah diatur secara mandiri (otonom) bagi tiap tiap organ tersebut menurut Emmy<sup>61</sup> sudah menggambarkan adanya faham baru yang dikenal sebagai faham institutional. Faham ini menurut Prasetya,<sup>62</sup> berpandangan bahwa ketiga organ PT masing masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri sendiri sebagaimana yang diberikan dan menurut undang undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain. Dengan demikian selama pengurus menjalankan wewenangnya dalam batas batas ketentuan undang undang dan anggaran dasar maka pengurus tersebut berhak untuk tidak mematuhi perintah perintah atau instruksi instruksi dari organ lainnya baik dari komisaris

---

61. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungannya Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional, 1995), hal.32

62. Rudhy Prasetya, *Kedudukan, Peran Dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Makalah Seminar Hukum Dagang Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1987), hal.11

maupun RUPS. Dengan perkataan lain menurut faham tersebut wewenang yang ada pada organ organ dimaksud bukan bersumber dari limpahan atau kuasa dari RUPS melainkan bersumber dari ketentuan undang undang dan anggaran dasar.

#### 1.b. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS.

Menurut Pasal 65 UUFT, RUPS dapat diselenggarakan dengan 2 (dua) macam RUPS yaitu :

- a. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- b. RUPS lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan.

Penyelenggara RUPS secara tahunan dan secara sewaktu waktu pada prinsipnya yang berwenang menyelenggarakan adalah Direksi, kecuali Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan maka pemanggilan dilakukan oleh Komisaris. Penyelenggaraan RUPS tersebut menurut Pasal 66 ayat (2) UUFT dapat pula terjadi karena dimohon oleh satu pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Jadi prakarsa menyelenggarakan RUPS disini datang dari pemegang saham. Bahkan menurut Pasal 67 UUFT pemohon dapat diberi izin oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk :

- a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas permohonan

pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan ;

- b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan satu atau lebih pemegang saham seperti tersebut diatas jika Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 hari, terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

Ketentuan ini merupakan kontrol dari pemegang saham yang diberikan oleh undang undang atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wenang memberi izin. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir dalam RUPS tersebut bahkan dapat juga menentukan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.

Selanjutnya guna kepentingan penyelenggaraan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 UUPT yang menentukan :

1. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS diadakan.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
3. Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam surat kabar harian.
4. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan

mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.

5. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cuma cuma.
6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Bagi perseroan terbuka sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 UUPT sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, wajib didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian. Dan pengumuman ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum pemanggilan RUPS.

Keputusan RUPS menganut asas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi bila berdasarkan musyawarah tidak dapat dicapai maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan suara terbanyak biasa menurut penjelasan pasal 74 UUPT yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Agar suatu keputusan RUPS dianggap sah dan mengikat maka harus dipenuhi syarat mengenai kuorum dan materi yang dibicarakan dalam rapat. Mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terhadap materi yang ada hubungannya dengan kelangsungan RUPS maka kuorum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $1/2$  (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang undang atau anggaran dasar menentukan lain.
- b. Apabila kuorum tidak tercapai maka diadakan pemanggilan RUPS kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
- c. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $1/3$  (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Apabila kuorum kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Terhadap kehendak untuk mengubah Anggaran Dasar maka kuorum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kuorum untuk keputusan mengubah Anggaran Dasar akan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $2/3$  (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $2/3$  (duapertiga) bagian dari jumlah suara tersebut. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $2/3$

(duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

3. Terhadap kehendak untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran maka kuorum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Kuorum untuk keputusan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran akan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

#### 1.c. Wewenang RUPS

Pasal 63 ayat (1) UUPT memberi batasan terhadap wewenang RUPS yaitu sejauh yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. Dengan demikian dapat diuraikan lingkup wewenang RUPS sebagaimana dapat dilihat dalam bab V UUPT yang mengatur tentang RUPS dan Bab VI yang mengatur tentang Direksi dan Komisaris, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan Direksi dan Komisaris adalah menjadi wewenang RUPS demikian juga dengan pemberhentian Direksi dan Komisaris.
2. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk merubah anggaran dasar.
3. Wewenang RUPS juga dapat dilihat pada perbuatan penggabungan/merger dan akuisisi diantara perusahaan.

Walaupun rencana merger dan akuisisi merupakan pekerjaan Direksi dari perseroan perseroan yang bersangkutan namun penggabungan dan akuisisi hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh RUPS masing masing perseroan. Persetujuan itu adalah hak dan wewenang dari RUPS. Hal ini berarti bahwa tidak ada perusahaan yang akan melakukan merger ataupun akuisisi dengan sah tanpa persetujuan dari RUPS masing masing perusahaan tersebut.

4. RUPS berwenang membuat peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi. Tugas tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris jika ditentukan demikian dalam anggaran dasar.
5. RUPS wenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan dalam keadaan Direksi tidak berwenang mewakili perseroan karena terjadi perse-lisihan/perkara antara Direksi dengan perseroan atau terjadi pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan.
6. RUPS berwenang mengambil keputusan jika diminta oleh Direksi untuk memberikan persetujuan guna mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseoan.
7. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang akan dimajukan Direksi kepada Pengadilan Negeri.
8. RUPS berwenang dan berhak meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan



atau Komisaris. Sebaliknya hal ini merupakan kewajiban bagi Direksi atau Komisaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh RUPS.

## ad.2. Direksi

### 2.a. Kedudukan Hukum Direksi.

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas Direksi ialah mengurus perseroan.

Menurut teori organisme dari Otto von gierke sebagai yang dikutip oleh Suyling<sup>63</sup>, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ organ tubuh misalnya, kaki, tangan, dan lain sebagainya itu geraknya diperintah oleh otak manusia, demikian pula gerak dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu.

Didalam penjelasan resmi dari Pasal 79 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari hari dari perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi oleh karena itu harus dilihat dalam Anggaran Dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari hari itu walaupun tidak mungkin disebutkan secara

---

63. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.86

detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata mata adalah tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 82 UUPT yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

"Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan".

Disamping itu Pasal 82 UUPT tersebut diatas juga memberikan pedoman kepada Direksi agar didalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini menurut Emmy,<sup>64</sup> dapat diduga latar belakang adanya ketentuan itu adalah karena kepentingan perseroan serta tujuan perseroan disatu pihak suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham. Ketentuan mengenai Direksi yang dalam melaksanakan tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta tujuan daripada perseroan rupa rupa didasarkan pada faham yang oleh sementara orang disebut sebagai faham institusi atau pandangan bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan Direksi. Demikian pula Pasal 85 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan, juga termasuk pada pandangan faham institusi yang disebut diatas. Itikad baik Direksi

---

64. Emmy Pangaribuan, *op.cit.* hal.5

untuk menjalankan/mengurus perseroan secara profesional dengan skill dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan usaha perseroan termasuk pula kepentingan para pemegang saham.

Sehubungan dengan itu, menurut Paul Scholten dan Bregstein,<sup>65</sup> Pengurus adalah mewakili badan hukum. Analog dengan pendapat Gierke dan Paul Scholten maupun Bregstein tersebut diatas, maka Direksi bertindak mewakili PT sebagai badan hukum. Kewenangan perwakilan dari Direksi PT ini timbul karena adanya pengangkatan dari RUPS dan akan berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili itu ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHD yo. Pasal 80 ayat (3) UUPT yang intinya menyebutkan bahwa Direksi tidak boleh diangkat tanpa kemungkinan untuk di cabut kembali.

Seperti telah di kemukakan diatas bahwa pengangkatan Direksi dilakukan oleh RUPS akan tetapi untuk pertama kalinya pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendiriannya. Ketentuan seperti ini dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPT. Direksi dapat diangkat dari orang pemegang saham atau bukan bahkan menurut Prasetyo<sup>66</sup> pemegang jabatan Direksi sekaligus sebagai pemegang saham hanyalah suatu kebetulan karena didalam praktek sering dijumpai Direksi PT adalah orang luar, bukan pemegang saham.

---

65. Nindyo Pramono, *op.cit*, hal.87

66. Rudhi Prasetya, *op.cit*, hal.17

## 2.b. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.

Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) UUPT tidak menjelaskan sampai dimana kewenangan direksi dalam menjalankan tugasnya. Pasal pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa PT diurus oleh pengurus yang diangkat oleh para pemegang saham, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai luas, isi maupun ruang lingkup pengurusan itu. Demikian pula rincian tugas direksi didalam Undang Undang No.1 Tahun 1995 tidak dapat diketahui. Pasal 81 ayat (1) dan (2) UUPT hanya menyatakan bahwa pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi ditetapkan oleh RUPS. Dan dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS tersebut dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS.

Jadi untuk mengetahui rincian tugas direksi harus dilihat dalam anggaran dasar PT dan pada umumnya berkisar pada :

1. Mengurus segala urusan ;
2. Menguasai harta kekayaan perseroan ;
3. Melakukan perbuatan perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPdt, yaitu :
  - a. memindah tangankan hipotik pada barang barang tetap ;
  - b. membebankan hipotik pada barang barang tetap ;
  - c. melakukan *dading* ;
  - d. melakukan perbuatan lain mengenai hak milik ;
  - e. mewakili perseroan dimuka dan diluar pengadilan ;
4. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, direksi masing masing atau bersama sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal hal dalam bidang usaha yang menjadi

tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.

5. Dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan cermat. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma norma pembukuan yang lazim. Tiap tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan, direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. Bahkan menurut ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, direksi perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat seperti usaha perbankan, usaha asuransi dan lain sebagainya atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang seperti misalnya perseroan yang menerbitkan obligasi dan perseroan terbuka atau PT Terbuka diwajibkan menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa. Jika hal ini tidak dipenuhi maka RUPS tidak boleh mensahkan laporan tersebut. Laporan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan telah disahkan oleh RUPS tersebut wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Direksi bertanggung jawab pada RUPS atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya atas nama perseroan. Pemeriksaan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh RUPS

atau oleh dewan komisaris apabila anggaran dasar mengatur demikian.

6. Melaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Jika akta pendirian perseroan sudah mendapat pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka pendiri, dalam hal ini direksi pertama dari perseroan tersebut diwajibkan mendaftarkan akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman tersebut kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian pula bila terjadi perubahan dalam syarat syarat pendirian atau perpanjangan jangka waktu perseroan, direksi wajib mendaftarkan dan mengumumkan persetujuan Menteri Kehakiman tentang hal itu.

Uraian tugas tersebut hanya merupakan gambaran umum yang termuat dalam anggaran dasar perseroan. Dalam hal hal tertentu seperti misalnya dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, disamping harus mengacu kepada tujuan perseroan dapat pula ditentukan harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari komisaris yang telah diberi mandat oleh RUPS. Biasanya perbuatan hukum yang harus mendapat persetujuan dari komisaris ini ialah perbuatan hukum yang berkaitan dengan penguasaan terhadap sesuatu benda. Disamping itu menyelenggarakan dan memimpin RUPS tahunan dan juga RUPS lainnya merupakan tugas direksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1995.

Mengenai kewajiban direksi, biasanya telah diatur dalam anggaran dasar perseroan, antara lain meliputi :

- a. Menyusun anggaran belanja perseroan untuk tahun yang akan datang. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan datang dimulai, anggaran belanja perseroan sudah harus dibicarakan dan selanjutnya dimintakan pengesahan pada RUPS.
- b. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan tugas direksi dalam hal mengurus dan menguasai perusahaan atau tentang neraca triwulan atau tahunan yang disampaikan kepada dewan komisaris.
- c. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi. Menurut pasal 56 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, neraca dan perhitungan laba rugi tersebut harus dibuat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- d. Membuat daftar inventarisasi atas semua harta kekayaan perseroan serta pelaksanaan pengawasannya.
- e. Menyelenggarakan RUPS minimal satu kali dalam setahun atau pada saat saat yang diperlukan dan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- f. Memberi keterangan keterangan yang diperlukan oleh dewan komisaris pada saat pemeriksaan. Dalam praktek sering terjadi dewan komisaris menggunakan jasa akuntan publik untuk memeriksa pembukuan dan direksi wajib memberikan keterangan yang diminta oleh akuntan publik tersebut.
- g. Menyelenggarakan RUPS luar biasa pada setiap waktu yang

dipandang perlu oleh direksi atas usul atau permintaan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

- h. Mengumumkan secara resmi baik dalam surat kabar maupun dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, bilamana direksi akan mengeluarkan duplikat duplikat saham yang hilang.
- i. Menyediakan buku daftar pemegang saham dan daftar khusus di kantor perseroan untuk para pemilik saham. Penyelenggaraan buku daftar pemegang saham dan daftar khusus ini harus dilaksanakan sebaik baiknya. Buku daftar pemegang saham dan daftar khusus ini erat kaitannya dengan kedudukan hukum pemilik atau pemegang saham. Buku daftar pemegang saham dan daftar khusus ini dapat menjadi indikator kepemilikan atas saham suatu perseroan dan ada tidaknya hubungan afiliasi antara direksi dan keluarganya dengan perseroan yang dikelolanya. Nama nama yang tercatat dalam buku daftar pemegang saham atau daftar khusus adalah orang orang yang secara yuridis diakui sebagai pemilik saham. Hal ini bertujuan agar ada transparansi perseroan dalam upaya menjamin perlindungan hukum pihak ketiga.
- j. Dalam hal pembubaran perseroan, direksi wajib melakukan likuidasi melalui seorang likuidator dan biasanya dibawah pengawasan dewan komisaris.



Untuk menjalankan tugas kewajiban tersebut dan sesuai dengan prinsip manajemen perusahaan, direksi mempunyai wewenang atau otoritas yang oleh Winardi<sup>67</sup> diartikan sebagai kekuasaan resmi atau legal untuk menyuruh pihak lain bertindak dan taat kepada pihak lain yang memilikinya. Sementara itu menurut Rido<sup>68</sup> wewenang direksi yang lazim terdapat didalam anggaran dasar perseroan, antara lain ialah :

- a. Apabila pengeluaran saham saham telah jatuh tempo dan masih diperlukan perpanjangan waktu maka direksi diberi wewenang untuk memohonkan perpanjangan waktu kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman.
- b. Apabila dalam waktu satu bulan setelah direksi memberitahukan pengeluaran saham saham tersebut tidak ada yang membelinya, maka direksi dengan persetujuan komisaris mempunyai wewenang untuk menjual saham saham itu kepada siapa saja.
- c. Direksi bersama sama dengan dewan komisaris berwenang menanda tangani surat surat saham.
- d. Bila ada suat saham atau talon yang rusak hingga tak dapat dipakai lagi, maka direksi berwenang mengeluarkan duplikatnya atas permintaan yang berkepentingan setelah aslinya dimusnahkan oleh direksi dihadapan yang berkepentingan tersebut.
- e. Demikian pula apabila surat saham atau talon yang asli

---

67. Winardi, *Asas Asas Manajemen*, (Bandung, Alumni, 1983) hal.239

68. Ali Rido, *op.cit.* hal.300

tadi hilang maka dengan bukti yang cukup serta jaminan jaminan yang dianggap perlu direksi mempunyai wewenang untuk memberikan duplikatnya.

- f. Direksi mempunyai wewenang untuk menahan keuntungan keuntungan atas saham, dan melarang mengeluarkan suara atas saham tersebut, jika ternyata dalam suatu pemindahan hak, tidak dipenuhi kewajiban kewajibannya.
- g. Direksi atas tanggung jawabnya sendiri diberi kewenangan untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat syarat dan kekuasaan kekuasaan yang ditentukan secara tertulis.
- h. Direksi mempunyai wewenang mewakili perseroan dimuka dan diluar pengadilan serta berhak melakukan perbuatan pengurusan dan pemilikan atau penguasaan (beheer en beschkking) dengan batasan batasan tertentu.
- i. Mempunyai wewenang memimpin dan mengetuai RUPS.
- j. Mempunyai wewenang untuk mengadakan rapat umum luar biasa pemegang saham setiap waktu bila dipandang perlu.
- k. Mempunyai wewenang untuk menanda tangani notulen rapat, jika notulen tidak dibuat dengan proses verbal notaris.

Dalam hal wewenang direksi untuk mewakili perseroan di luar pengadilan, anggaran dasar sering memberikan pembatasan pembatasan antara lain sebagai berikut :

- a. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari dewan komisaris apabila ia akan melakukan tindakan tindakan :
  - 1. Meminjam uang atas nama perseroan atau meminjamkan uang kepada pihak lain dalam jumlah tertentu.
  - 2. Mengikat perseroan sebagai penjamin hutang.

3. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan atau membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan hutang.
  4. Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan yang bernilai tinggi.
- b. Dalam hal mengangkat dan memberhentikan seorang kuasa untuk mewakili perseroan harus dilakukan oleh dua orang anggota direksi atau apabila direksi itu terdiri hanya seorang direktur maka harus dilakukan bersama-sama dengan komisaris.
  - c. Direksi harus bekerja sesuai dengan rencana kerja yang telah di setujui oleh dewan komisaris atau RUPS.
  - d. Tiap anggota direksi wajib meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada anggota direksi lainnya apabila akan melakukan tindakan yang menurut kebiasaan dalam dunia usaha dianggap sebagai hal yang penting bagi perseroan.
  - e. Pembagian pekerjaan direksi dalam lingkungan perseroan antara para anggota direksi diatur dan ditentukan sendiri oleh para anggota direksi itu.

Dari perincian tugas dan wewenang direksi, pada umumnya telah ditentukan dalam pasal 85 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang antara lain ditentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan etika baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya setiap anggota direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruhnya.

Sebagai orang yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang kuasa dari perseroan, disamping tentunya segala perikatan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai pemegang kuasa menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum, direksi masih diberi tanggung jawab juga dalam hal hal sebagai berikut :

- a. Bagi direksi yang bukan sebagai pemegang saham, menurut ketentuan Pasal 82 Undang Undang No.1 Tahun 1995 mengatakan bahwa : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 85 Undang Undang No.1 Tahun 1995, direksi wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan etika baik dan penuh tanggung jawab. Kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas akan dikenai sanksi pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Hal demikian dahulu juga diatur didalam Pasal 45 ayat (1) KUHD yang menentukan bahwa tanggung jawab direksi tidak lebih dari pada pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya. Mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak pihak ketiga berdasar perikatan perikatan yang dilakukan atas nama perseroan.
- b. Bagi direksi yang merangkap sebagai pemegang saham, disamping tanggung jawab yang diberikan sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No.1 Tahun 1995 maka direksi yang juga sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi

atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Jadi tanggung jawab direksi selaku juga sebagai pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang telah diambilnya.

- c. Dalam hubungannya dengan keharusan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, menurut ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, bila sebelum pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan, perseroan telah melakukan perbuatan hukum maka direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ini timbul apabila direksi yang memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya. Agar direksi sebagai orang yang sehari hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi yang besar maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>69</sup> Idealnya, jika wewenang itu dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan

---

69. Winardi, *op.cit.* hal.144

wewenang yang dimilikinya.

## 2.c. Hubungan Antara Kedudukan Hukum RUPS Dengan Kedudukan Hukum Direksi.

Meskipun dalam praktek terdapat pemegang saham yang sekaligus menjadi direksi, namun fungsi pemegang saham dan fungsi direksi dipisah secara tegas oleh undang undang. Dengan dipisahkannya kedua fungsi itu, diharapkan kontinuitas jalannya perseroan menjadi terjamin. Meskipun pemegang saham setiap waktu dapat berubah, akibat sahamnya dijual kepada pihak lain atau karena meninggal dunia dan sebagainya, akan tetapi dengan pemisahan itu direksi pada dasarnya tetap dapat menjalankan perseroan sebagaimana mestinya. Direksi ataupun pemegang saham masing masing mempunyai kewenangan sendiri sendiri yang dapat mereka lakukan secara mandiri dan untuk itu mereka juga mempunyai tanggung jawab sendiri sendiri pula. Sekalipun demikian kemandirian direksi tidak menjadikan kekuasaan direksi dijalankan dengan tanpa batas. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan sekehendaknya sendiri walaupun itu dengan alasan untuk kepentingan perseroan.

Menurut Prasetya<sup>70</sup> otonomi direksi ini dibatasi oleh asas kepantasan. Sepanjang direksi telah menjalankan kepengurusan secara pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otonomi yang diberikan.

---

70. Rudhy Prasetya, *op.cit.* hal.8

Mengenai hal kepantasan ini Nindyo<sup>71</sup> menyimpulkan bahwa ukuran pantas secara yuridis adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, tidak melanggar asas etikad baik dan asas kepatutan, kebiasaan atau undang undang serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Selama ini orang berpendapat bahwa pemegang saham yang dimanifestasikan didalam RUPS adalah merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi didalam perseroan. Namun dalam perkembangannya orang tidak dapat lagi mempertahankan anggapan tersebut sebab dalam perkembangan akhir akhir ini para anggota direksi mengklaim bahwa mereka mempunyai tugas mandiri pada bidang yang oleh undang undang dan anggaran dasar diserahkan kepadanya. Bahkan menurut kepustakaan, di negeri Belanda sendiri, paham klasik bahwa RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi didalam perseroan sudah ditinggalkan. Mereka sekarang menganut suatu paham yang di namakan paham institusional atau institutionale opvating <sup>72</sup> yang memberikan batasan bahwa ketiga organ didalam perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris masing masing mempunyai kedudukan yang autonom dengan kewenangannya sendiri sendiri sebagai yang diberikan dan menurut undang undang serta anggaran dasar, tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bergerak kepada masing masing organ untuk menentukan kebijakan perusahaan.

---

71. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.122

72. Rudhy Prasetya, *op.cit.* hal.8

Kebebasan bergerak ini menurut Rido<sup>73</sup> dirasakan sangat penting guna memanfaatkan peluang ekonomi sedapat mungkin demi keuntungan perusahaan. Menurut paham institusi ini, selama direksi telah menjalankan wewenangnya dalam batas ketentuan undang undang dan anggaran dasar, ia berhak untuk tidak mematuhi perintah perintah atau instruksi instruksi dari organ lain baik dari komisaris maupun dari RUPS. Sebab menurut paham ini wewenang yang ada pada organ organ PT bukannya bersumber dari limpahan atau kuasa dari RUPS atau pemegang saham, melainkan bersumber dari ketentuan undang undang atau anggaran dasar. RUPS sesuai dengan ketentuan undang undang hanya bertugas untuk mengangkat atau memberhentikan direksi atau komisaris. Seperti telah diuraikan dimuka, sepanjang direksi telah menjalankan kepengurusan secara pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otonomi yang diberikan. Disini dalam menilai pekerjaan direksi digunakan pendekatan yuridis, akan tetapi Prasetya<sup>74</sup> menyarankan bahwa dalam hal diatas seyogyanya dipergunakan ukuran manajemen. Ini berarti bahwa untuk menilai keberhasilan pekerjaan direksi, apakah perbuatan yang dilakukan oleh direksi itu pantas atau tidak harus diukur dari ukuran manajemen atau ukuran ekonomis, jadi diukur dari segi ilmu ekonomi. Sejauh mana keberhasilan perseroan dalam mencapai tujuannya akan bergantung kepada manejernya atau direksi dalam menjalankan kepengurusan

---

73. Ali Rido, *op.cit.* hal.339

74. Rudhy Prasetya, *op.cit.* hal.10



perusahaan. Dari ukuran manajemen dapat dilihat apabila perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya maka dapat dikatakan bahwa kepengurusan perusahaan tidak dijalankan dengan baik.

Apabila ukuran ini benar benar diterapkan pada perseroan maka direksi akan dituntut untuk benar benar profesional, bahkan tidak saja direksi yang dituntut profesional, komisaripun dituntut harus profesional pula, sebab ia akan berhadapan dengan prinsip prinsip manajemen untuk dapat menilai apakah direksi telah menjalankan kepengurusannya dengan pantas.

Selanjutnya jika kita lihat kembali kedudukan RUPS dalam hubungannya dengan kedudukan direksi betapa pentingnya kedudukan RUPS ini dalam struktur PT, sebab seperti telah diuraikan dimuka bahwa direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Ketentuan pada pasal 80 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1995 jelas membuktikan bahwa direksi diangkat oleh RUPS. Jika direnungkan ketentuan seperti tersebut diatas sebenarnya RUPS tetap pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan sepanjang bertindak dalam batas batas kewenangannya. Bahkan didalam pasal 1 ayat (3) Undang

Undang No.1 Tahun 1995 secara tegas dinyatakan bahwa : "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan RUPS adalah semua kewenangan yang berdasar undang undang atau anggaran dasar yang tidak diperuntukkan bagi direksi atau komisaris. Walaupun RUPS merupakan organ perseroan yang

memegang kekuasaan tertinggi namun tidak berarti bahwa kekuasaan RUPS tidak tanpa batas. Batasan wewenang RUPS ialah segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No.1 Tahun 1995 tersebut diatas.

### ad.3. Komisaris

#### 3.a. Kedudukan Hukum Komisaris.

Sebelum keluarnya Undang Undang No.1 Tahun 1995 keberadaan organ komisaris pada PT tidak merupakan suatu keharusan atau tidak mutlak harus ada atau bersifat fakultatif. Ada tidaknya komisaris biasanya ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan pada Pasal

44 ayat (1) KUHD yang bunyinya sebagai berikut :

"Perseroan diurus oleh pengurus yang diangkat untuk itu oleh pesero-pesero, sekutu-sekutu atau orang lain yang diangkat untuk itu, dengan atau tidak dengan menerima upah, dengan atau tidak dengan pengawasan dari komisaris".

Dengan keluarnya Undang Undang No.1 Tahun 1995 keberadaan komisaris tidak lagi bersifat fakultatif bahkan sudah merupakan suatu keharusan. Hal ini bisa dilihat didalam

Pasal 94 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :

"Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar".

Bahkan menurut Pasal 94 ayat (2) Undang Undang No.1 Tahun 1995 tersebut, perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti perseroan yang bergerak dibidang perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau obligasi atau perseroan yang terbuka (PT Tbk) yaitu perseroan yang go publik, wajib mempunyai paling sedikit dua (2) orang komisaris.

Latar belakang pertimbangannya karena perseoran perseoran seperti tersebut diatas diperlukan pengawasan yang lebih ketat dibanding dengan PT lainnya, karena menyangkut kepentingan masyarakat umum.

Menurut penjelasan Pasal 94 ayat (1) tersebut diatas, perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ PT maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ PT, komisaris lazim disebut juga Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut Anggota Komisaris. Sebagai organ PT, pengertian Komisaris termasuk juga badan badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibi- dang tertentu.

Komisaris jika lebih dari satu orang mereka merupakan majelis yang tidak dapat bertindak sendiri sendiri untuk mewakili perseoran. Hal ini berarti bahwa komisaris yang lebih dari satu orang itu bersifat kolegial.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1995 yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perseor- angan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseoran dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Untuk pertama kali pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendir- ian yang memuat keterangan sekurang-kurangnya : susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat

tinggal dan kewarganegaraan komisaris yang pertama kali diangkat tersebut. Demikian ditentukan dalam Pasal 95 ayat (2) Undang Undang no.1 Tahun 1995.

Menurut Nindyo<sup>75</sup>, sebelum keluarnya Undang Undang No.1 Tahun 1995, dengan klausula oligarkhi, dapat terjadi akta pendirian PT tidak mengatur tentang pengangkatan komisaris yang pertama, tetapi menyerahkan pengangkatan itu kepada RUPS. Klausula oligarkhi ini biasanya bertujuan agar kepentingan para pendiri PT tetap terlindungi. Dengan klausula oligarkhi diberikan hak hak khusus kepada para pemegang saham tertentu untuk mengajukan dan menentukan orang orang tertentu yang dapat diangkat menjadi direksi dan komisaris. Namun dengan keluarnya Undang Undang No.1 Tahun 1995, Pasal 8 ayat (2) sub. b. yang berbunyi :

"Akta pendirian tidak boleh memuat :  
ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain".

maka dapat dipastikan bahwa klausula oligarkhi itu tidak dapat di tempatkan lagi dalam akta pendirian suatu PT sebab ketentuan pasal tersebut melarang pemberian keuntungan kepada pendiri perseroan atau pihak lain.

Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasehat nasehat kepada direksi, demikian menurut pasal 97 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif.

---

75. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.116

Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini komisaris harus selalu mengawasinya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan oleh direksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang undang dan anggaran dasar. Apakah nasehat nasehat dari komisaris sudah diperhatikan betul oleh direksi. Semua ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh komisaris. Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, memberikan kewajiban kepada komisaris agar dengan etiked baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

### 3.b. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris.

Rincian tugas komisaris biasanya diatur didalam anggaran dasar, antara lain :

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi ;
2. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan ;
3. Memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat kepada direksi ;

4. Apabila ditemukan keteledoran direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu 1 (satu) bulan komisaris harus mengadakan RUPS untuk memberi keputusan tentang hal tersebut. Jika RUPS memberi keputusan lain, maka direksi akan ditempatkan kembali. Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan komisaris batal dengan sendirinya ;

Mengenai tanggung jawab komisaris dapat dibagi dalam :

- a. Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga.
- b. Tanggung jawab kedalam terhadap perseroan.

Tanggung jawab keluar itu tidak sebesar tanggung jawab direksi, karena komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberi ijin dalam hal direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat ijin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan (*beschikking*), seperti misalnya menjual, menggadaikan dan lain lain.

Tanggung jawab kedalam sama dengan direksi, pertanggung jawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih maka pertanggungjawaban itu bisa bersifat kolektif atau majelis. Jika komisaris ikut serta dalam pengurusan biasanya ia lalu ikut memberikan pertanggung jawaban kepada RUPS bersama sama dengan direksi. Tanggung jawab komisaris tentunya terutama yang berkaitan

dengan keikut sertaannya menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi yang berarti ia ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban direksi tersebut. Jika komisaris tidak ikut serta dalam pengurusan, maka ia dapat diberi kuasa oleh RUPS untuk menerima dan mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban atas nama perseroan. Demikian dapat disimpulkan bunyi pasal 100 Undang Undang No.1 Tahun 1995. Agar komisaris dapat melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, didalam anggaran dasar dapat diatur beberapa kewenangan antara lain ialah :

1. Mengadakan dengar pendapat dengan akuntan yang memeriksa pembukuan perseroan ;
2. Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi ;
3. Memanggil RUPS ;
4. Memberikan nasehat dalam RUPS ;
5. Mewakili perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan bila antara direksi dengan perseroan terdapat kepentingan yang berbeda ;
6. Membebaskan sementara setiap direksi dari tugasnya apabila kedapatan bertindak merugikan perseroan ;
7. Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu pengawasan pembukuan perseroan dalam waktu waktu tertentu dan mengeluarkan pendapatnya terhadap neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat direksi, kecuali sebelumnya telah diangkat seorang ahli pembukuan oleh RUPS.

### 3.c. Hubungan Antara Tugas Dan Kewajiban Komisaris Dengan Direksi.

Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1995 Pasal 94 ayat (1), keberadaan komisaris didalam perseroan adalah merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi didalam perseroan yang bergerak dibidang penerahan dana masyarakat undang undang mensyaratkan harus memiliki minimal 2 (dua) orang komisaris. Dengan tugas sebagai pengawas kebijaksanaan direksi serta memberikan nasehat kepada direksi mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan, maka terjadi interaksi antara tugas direksi dan komisaris pada saat sebelum dan sesudah menjalankan aktivitas perusahaan. Direksi tidak dapat melaksanakan tugas sekehendak hatinya atau dengan sewenang wenang karena komisaris mengawasinya. Sebaliknya komisaris dapat memberi nasehat kepada direksi tetapi tidak dapat melakukan pengurusan. Se jauh mana nasehat itu harus diterima oleh direksi, tergantung pada kepentingan dan tujuan perseroan yang sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab direksi. Nasehat itu dapat saja tidak dituruti apabila bertentangan dengan tujuan dan kepentingan perseroan dalam batas batas ketentuan undang undang dan anggaran dasar.

Seperti diuraikan dimuka bahwa tugas komisaris dalam mengawasi pekerjaan direksi tidak saja bersifat preventif tetapi juga represif dan dalam memberi nasehat harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan. Tugas mengawasi dan memberi nasehat tersebut masih ditambah lagi dengan suatu kewenangan yang diberikan



kepada komisaris apabila anggaran dasar menentukan hal itu. Sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang Undang No.1 Tahun 1995, kewenangan yang dimaksud ialah :

1. Wewenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu ;
2. Wewenang melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Kewenangan yang dimiliki komisaris seperti tersebut diatas harus ditentukan didalam anggaran dasar, apabila tidak ditentukan dalam anggaran dasar maka kewenangan itu tidak ada. Tindakan pengurusan sebenarnya adalah tugas direksi, jadi bila didalam anggaran dasar kepada komisaris diberikan wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam hal tertentu maka hal itu adalah merupakan suatu pengecualian atas pertimbangan tertentu. Wewenang itu meliputi pertanggung jawaban komisaris kepada RUPS atas tindakan pengurusan yang dilakukannya bersama sama direksi. Walaupun ada kewenangan seperti yang disebut dalam Pasal 100 ayat (2) diatas bukan berarti bahwa komisaris dalam segala hal dan setiap saat dapat melakukan pengurusan yang seharusnya menjadi wewenang direksi. Hal itu hanya dapat terjadi jika berdasar pada anggaran dasar dan atas keputusan RUPS serta dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Terhadap komisaris yang melakukan tugas pengurusan demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Demikian dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 100 ayat (3) Undang Undang No.1 Tahun 1995. Ketentuan seperti itu merupakan pencegahan terhadap tindakan komisaris yang sewenang-wenang serta pertanggung jawabannya guna memberi perlindungan terhadap kepentingan perseroan, pemegang saham dan juga pihak ketiga. Tugas komisaris sebagai pengawas harus dilakukan dengan etika baik dan penuh tanggung jawab dan itu harus dilakukan demi kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa komisaris harus dapat mempertanggung jawabkan tugas pengawasannya kepada organ tertinggi yaitu RUPS.

\*\*\*\*\*

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka dapat disajikan hasil penelitian yang dapat dilihat dari tiga sisi yaitu putusan pengadilan, pelaksana pelaku usaha dan notaris yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembeneran terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada pendiri perseroan dalam kaitannya dengan eksistensi PT sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 yo pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Masalah pembeneran terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada pendiri perseroan dalam kaitannya dengan eksistensi PT sebagai badan hukum merupakan persoalan seberapa jauh tanggung jawab pendiri perseroan terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, sementara perseroan itu sendiri merupakan institusi yang mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum.

- 1.a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt/G/1989 tanggal 3 Mei 1989 didalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan pendiri pada waktu perseroan belum disahkan sebagai badan hukum merupakan tanggung jawab pendiri secara pribadi sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak untuk kepentingan perseroan dan tidak memberi manfaat kepada perseroan.

Oleh karena itulah Pengadilan negeri Yogyakarta memenangkan PT Ganda Kekar Santosotex (penggugat) dan menghukum Joko Lampito (tergugat II) selaku pendiri PT Ganda Kekar Santosotex untuk mengembalikan secara pribadi pinjaman dari PT Bank Bapindo Cabang Yogyakarta (tergugat I) sebesar Rp.895.000.000.- (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga yang sudah mencapai Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusannya nomor 33/Pdt/1990/PTY dan dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung dengan putusannya nomor 2968/K/Pdt/1996.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan hukum pendiri untuk kepentingan perseroan yang dilakukan ketika perseroan belum disahkan sebagai badan hukum mengikat perseroan ketika telah disahkan sebagai badan hukum apabila perbuatan hukum dari pendiri tersebut memberikan manfaat dan diakui oleh perseroan. Akan tetapi bila perbuatan hukum dari pendiri itu tidak diterima secara tegas oleh perseroan maka akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri menjadi tanggung jawab pendiri secara pribadi.

Duduk perkaranya sebagai berikut :

Penggugat adalah seorang pengusaha textiel di Banaran,

Jetis Wetan, Pedan, Klaten Jawa Tengah. Dalam menjalankan usahanya pada tahun 1987 penggugat bersama dengan Joko Lampito (tergugat II) bersepakat mendirikan badan usaha yang berbentuk PT yang diberi nama PT Ganda Kekar Santosotex dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris R. Suhariman Yatawijaya pada tanggal 3 September 1987 dan penggugat berkedudukan sebagai direktur nya.

Guna kepentingan dan pengembangan usaha PT Ganda Kekar Santosotex, setelah akta pendiriannya dibuat Joko Lampito (tergugat II) selaku salah satu pendiri dari PT Ganda Kekar Santosotex pada tanggal 21 September 1987 mengajukan permohonan pinjaman (kredit) pada PT Bank Bapindo cabang Yogyakarta (tergugat I) dengan menyerahkan salinan akta pendirian PT Ganda Kekar Santosotex dan agunan sertifikat tanah sebanyak 22 (dua puluh dua) buah meliputi tanah seluas 13.000 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu meter persegi) senilai Rp. 3.6 milyar (tiga milyar enam ratus juta rupiah), milik penggugat yang merupakan saham penggugat pada PT Ganda Kekar Santosotex dan telah menjadi aset dari PT Ganda Kekar Santosotex. Permohonan pinjaman (kredit) tersebut yang diajukan oleh Joko Lampito (tergugat II) kepada PT Bank Bapindo cabang Yogyakarta (tergugat I) sebesar Rp. 1.577.600.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk pinjaman (kredit) investasi sebesar Rp. 1.227.600.000.- (satu milyar seratus dua puluh tujuh

juta enam ratus ribu rupiah) dan kredit modal kerja sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Setelah melalui peninjauan dan penelitian akhirnya PT Bank Bapindo cabang Yogyakarta (tergugat I) hanya menyetujui memberikan pinjaman (kredit) kepada PT Ganda Kekar Santosotex sebesar Rp. 895.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Joko Lampito sebagai salah satu pendiri dari PT Ganda Kekar Santosotex tersebut dan akad kredit ditanda tangani pada tanggal 27 Pebruari 1988.

Dengan dalih untuk kepentingan dan pengembangan PT Ganda Kekar Santosotex maka uang hasil pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan penggugat oleh Joko Lampito (tergugat II) dibelikan tanah seluas 10.000 meter persegi di daerah Medari Sleman Yogyakarta dan diatas tanah itu didirikan bangunan untuk perusahaan textiel yang ternyata dimiliki secara pribadi oleh Joko Lampito (tergugat II). Sejak itulah terjadi perselisihan antara penggugat dan Joko Lampito (tergugat II) sebab penggugat merasa dibohongi oleh Joko Lampito (tergugat II) karena pinjaman itu diadakan dengan agunan sertifikat milik penggugat sebanyak 22 buah yang meliputi tanah seluas 13.000 meter persegi bukan untuk kepentingan PT Ganda Kekar Santosotex melainkan untuk kepentingan pribadi Joko Lampito (tergugat II). Bersamaan dengan pengesahan PT Ganda Kekar Santosotex menjadi badan hukum pada tanggal 30 Agustus 1988. tenggang waktu

penagihan angsuran pinjaman (kredit) tersebut telah jatuh tempo dan tagihan oleh PT Bank Bapindo cabang Yogyakarta (tergugat I) ditujukan kepada PT Ganda Kekar Santosotex yang berkedudukan di Pedan Klaten Jawa Tengah. Menanggapi tagihan ini penggugat selaku Direktur dari PT Ganda Kekar Santosotex menolak karena Joko Lampito (tergugat II) selaku pendiri dari PT Ganda Kekar Santosotex telah melakukan penyelewengan, uang hasil pinjaman itu bukan untuk kepentingan PT Ganda Kekar Santosotex tetapi untuk kepentingan pribadi dari Joko Lampito (tergugat II) yaitu dibelikan tanah seluas 10.000 meter persegi di daerah Medari Sleman Yogyakarta dan diatas namakan Joko Lampito (tergugat II) secara pribadi. Dengan demikian PT Ganda Kekar Santosotex tidak bertanggung jawab terhadap hutang yang dibuat oleh Joko Lampito (tergugat II) walaupun itu dengan dalih untuk kepentingan dan mengatas namakan PT Ganda Kekar Santosotex. Disamping itu PT Ganda Kekar Santosotex tidak pernah secara tegas menyatakan menerima, mengambil alih ataupun mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum tergugat II yang dilakukan atas nama perseroan karena perseroan tidak mendapat manfaat apapun dari hasil pinjaman itu sehingga akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat II menjadi tanggung jawab secara pribadi tergugat II.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat didalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada ketua majelis

hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
menghukum tergugat I untuk mengembalikan 22 buah sertifikat milik PT Ganda Kekar Santosotex (penggugat) yang telah dijaminkan oleh tergugat II kepada tergugat I tanpa syarat dan menghukum tergugat II untuk membayar hutang yang telah dibuatnya kepada tergugat I karena perseroan tidak menerima, mengambil alih atau mengukuhkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat II yaitu berupa perbuatan membuat perjanjian kredit dengan tergugat I. Oleh karenanya perseroan tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatan hukum tergugat II tersebut.

Menanggapi gugatan penggugat ini tergugat I menangkis dengan dalil bahwa penggugat tidak dapat mengelak dari tanggung jawab atas hutang yang telah dibuat oleh tergugat II selaku pendiri dari PT Ganda Kekar Santosotex (penggugat) berdasar akta pendiriannya yang dibuat oleh notaris pada tanggal 3 September 1987. Soal uang pinjaman itu tidak dipakai untuk kepentingan penggugat itu adalah urusan intern antara penggugat dan tergugat II sebab seandainya akta pendirian yang dibuat oleh notaris itu tidak ada sudah pasti tergugat I tidak akan memberi pinjaman (kredit) kepada tergugat II. Oleh karena itu tergugat I menolak dalil penggugat dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat serta memohon kepada ketua majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam rekonvensi yang pada pokok nya menghukum penggugat atau tergu-



gat dalam rekonsensi membayar seluruh hutang tergugat II sebesar Rp. 850.000.000.-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya yang telah mencapai Rp.4.5 milyar dan denda sebesar 100.000.000.-(seratus juta rupiah) kepada tergugat I atau penggugat dalam rekonsensi dan menyatakan sah dan berharga conservator-beslag yang telah diletakkan terhadap 22 buah sertifikat milik penggugat atau tergugat dalam rekonsensi. Sementara itu tergugat II mengemukakan dalil dalilnya bahwa apa yang telah dilakukan yaitu membuat perjanjian kredit dengan tergugat I dan membeli tanah seluas 10.000 meter persegi di daerah Medari Sleman Yogyakarta dan membangun pabrik textiel diatasnya semata mata untuk kepentingan dan pengembangan usaha PT Ganda Kekar Santosotex. Sedangkan tanah diatas namakan dirinya (tergugat II) semata mata untuk memudahkan administrasi. Oleh karena itu tergugat II memohon kepada ketua majelis hakim untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dan menjatuhkan putusan dalam rekonsensi menghukum penggugat atau tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh hutang tergugat II kepada tergugat I dengan perincian hutang pokok sebesar Rp.850.000.000.-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar Rp.4.5 milyar beserta denda sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah). Majelis hakim pengadilan negeri Yogyakarta sebelum sampai pada putusannya terlebih dahulu memeriksa kapan PT Ganda Kekar Santosotex mendapat pengesahan sebagai

badan hukum dari Menteri Kehakiman, dan kapan perjanjian kredit itu terjadi dan ditanda tangani oleh tergugat I dan tergugat II.

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapati bahwa tergugat I dan tergugat II membuat perjanjian kredit pada waktu PT Ganda Kekar Santosotex belum berstatus badan hukum karena PT Ganda Kekar Santosotex mendapat status badan hukum pada tanggal 30 Agustus 1988 sementara akad kredit yang ditandatangani oleh tergugat I dan tergugat II dilakukan pada tanggal 27 Februari 1988. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pada saat terjadinya akad kredit itu PT Ganda Kekar Santosotex bukanlah subyek hukum yang pantas untuk diminta bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh tergugat II walaupun itu dengan alasan untuk kepentingan dan pengembangan PT Ganda Kekar Santosotex dan lagi PT Ganda Kekar Santosotex dikemudian hari tidak mengakui perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat II. Berdasar pada pertimbangan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan dalam konpensi menerima gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat I untuk mengembalikan sertifikat yang menjadi agunan hutang tergugat II kepada penggugat tanpa syarat dan terhadap tergugat II Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan menyatakan hutang tersebut merupakan tanggung jawab pribadi tergugat II oleh karenanya menghukum tergugat II untuk membayar hutang tersebut kepada tergugat I sebesar Rp.

850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Sedangkan dalam rekonsensi Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak seluruh gugatan penggugat I dahulu tergugat I dalam konsensi dan penggugat II dahulu tergugat II dalam konsensi. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini tergugat I dan tergugat II mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan setelah memeriksa dan mengadili sendiri berkas perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan nomor 33/Pdt/1990/PTY menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 2968.k/Pdt/1996 memenangkan PT Ganda Kekar Santosotex dan menghukum tergugat I untuk mengembalikan sertifikat milik penggugat yang telah dijadikan jaminan secara tidak sah oleh tergugat II dan menghukum tergugat II untuk mengembalikan secara pribadi pinjaman dari PT Bank Bapindo cabang Yogyakarta (tergugat I) dengan perincian hutang pokok sebesar Rp.850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), bunga sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan denda sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah). Dalam putusannya Mahkamah Agung mengemukakan dalil bahwa setiap perbuatan hukum pesero yang dilakukan ketika perseroan belum berstatus badan hukum merupakan tanggung jawab pribadi dari pesero tersebut

sepanjang perseroan tidak mendapat manfaat dan menerimanya sebagai perbuatan hukum perseroan. Dalam perkara antara PT Ganda Kekar Santosotex melawan PT Bank Bapindo cabang Yogyakarta sebagai tergugat I dan Joko Lampito sebagai tergugat II ini Mahkamah Agung melihat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat II yaitu membuat hutang dengan pihak tergugat I tidaklah menguntungkan bagi penggugat sebagai institusi (badan usaha) pihak yang memiliki barang jaminan terhadap hutang tersebut. Oleh karenanya sangatlah tidak adil apabila penggugat harus memikul akibat dari perbuatan hukum tergugat II yaitu mengembalikan hutang yang telah dinikmati oleh tergugat II. Terlebih lagi penggugat selaku institusi (badan usaha) tidak mengakui perbuatan hukum tergugat II tersebut sebagai perbuatan hukum perseroan sehingga wajar dan adil apabila tergugat II bertanggung jawab secara pribadi terhadap hutang yang telah dibuatnya meskipun itu mengatas namakan perseroan (penggugat).

1.b. Pendapat pelaksana pelaku usaha.

a. PT Ganda Kekar Santosotex.

Menurut Direktur PT Ganda kekara Santosotex sebelum PT disahkan sebagai badan hukum pada hakekatnya PT itu tidak ada sehingga perbuatan hukum dari para pendirinya semata mata adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari para pendirinya tersebut. Kecuali apabila perbuatan hukum dari para pendirinya itu

dilakukan untuk kepentingan perseroan yang didirikannya dan memberikan manfaat kepada perseroan sehingga ketika perseroan telah menjadi badan hukum perseroan akan terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat manfaat yang telah dinikmatinya itu.

b. PT Bank Bapindo Cabang Yogyakarta.

Direktur Bank Bapindo Cabang Yogyakarta berpendapat lain, meskipun PT belum disahkan sebagai badan hukum tetap saja harus bertanggung jawab terhadap semua perbuatan hukum dari pendirinya berdasarkan pada akta pendirian PT tersebut. Sebab akta pendirian itu merupakan bukti bahwa PT telah didirikan dan telah ada meskipun belum disahkan sebagai badan hukum karena itu PT yang belum disahkan sebagai badan hukum tetap harus bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendirinya yang mengatasnamakan perseroan. Soal penyelewengan yang dilakukan oleh pendiri merupakan persoalan intern PT tersebut yang seharusnya tidak boleh merugikan pihak ketiga.

1.c. Pendapat Notaris.

Berdasarkan wawancara yang diadakan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah ada dengan beberapa notaris di kota Yogyakarta, mereka berpendapat bahwa terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pendiri pada saat PT belum disahkan sebagai badan hukum akan menjadi tanggungjawab secara pribadi dari para pendiri tersebut

sepanjang PT ketika telah disahkan sebagai badan hukum tidak mengambil alih hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum dari pendiri itu.

2. Tanggung jawab pendiri terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan yang telah disahkan sebagai badan hukum dalam kaitannya dengan kedudukan hukum direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.

2.a. Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dan merugikan pihak ketiga, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PT Medco.

Didalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa PT Medco selaku institusi yang mempunyai status badan hukum mengandung arti bahwa PT Medco itu merupakan subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Oleh karena itu PT Medco mampu bertanggung jawab sendiri terhadap akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Diajukannya terdakwa dimuka pengadilan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan PT Medco yang melawan hukum dan merugikan negara adalah salah alamat (error impersona) karena terdakwa bukanlah berkedudukan sebagai Direksi yang mengurus perseroan sehari hari.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Pada tahun 1997 PT Medco Jakarta yang didirikan oleh Arifin Panigoro seorang pengusaha perminyakan mengalami kesulitan dana likuiditas. Untuk mengatasi kesulitan ini Arifin Panigoro selaku pemegang saham terbesar, pemilik sekaligus berkedudukan sebagai komisaris utama pada perusahaan minyak PT Medco Jakarta berusaha untuk mencari dana segar bagi kepentingan PT Medco Jakarta. Melalui loby loby yang intensif akhirnya didapatkan dana segar tersebut dari PT Jasa Asuransi Indonesia (PT Jasindo) sebuah perusahaan BUMN dengan cara PT Medco Jakarta menerbitkan promisory notes sebesar Rp. 1.8 triliun yang dibeli oleh PT Jasa Asuransi Indonesia (PT Jasindo) tersebut.

Setelah jatuh tempo promisory notes yang diterbitkan oleh PT Medco Jakarta tidak dapat dicairkan (diuangkan) sehingga PT Jasindo mengalami kerugian yang berarti pula merugikan keuangan negara karena PT Jasindo adalah Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan hal inilah PT Medco Jakarta oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan korupsi dan perkaranya dibawa ke Pengadilan Jakarta Selatan dengan terdakwa Arifin Panigoro selaku pendiri dan pemilik PT Medco Jakarta.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Arifin Panigoro sebagai terdakwa didasarkan pada akta pendirian PT Medco Jakarta yang dibuat oleh notaris di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1976 dan diperbarui disesuaikan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas pada tanggal 1

Juli 1997 yang menyebutkan bahwa Arifin Panigoro adalah salah satu pendiri dan pemegang saham terbesar PT Medco Jakarta sehingga ia pantas disebut sebagai pemiliknya. Sebagai pemilik tentu akan berusaha keras agar perusahaannya tidak jatuh gulung tikar.

Oleh karena itulah dengan berbagai cara yang dilakukan oleh terdakwa akhirnya PT Medco Jakarta dapat kucuran dana segar dari PT Jasindo dengan menerbitkan promisory notes yang dibeli oleh PT Jasindo. Akan tetapi pada tanggal jatuh tempo, tanggal 7 Januari 1998 promisory notes tersebut tidak dapat dicairkan, PT Medco tidak dapat membayar promisory notes yang diterbitkannya sendiri sehingga negara dirugikan sebesar Rp.1.8 triliun. Akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arifin Panigoro yang diajukan sebagai terdakwa diputus bebas atas perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh PT Medco Jakarta, dengan dasar bahwa dakwaan tindak pidana korupsi salah alamat (error impersona) karena terdakwa bukan Direksi yang mengurus perusahaan sehari hari. Menurut hakim, Arifin Panigoro yang duduk sebagai terdakwa bukan merupakan subyek hukum dalam perkara ini, pasalnya yang bertanggung jawab dalam penerbitan promisory notes dan berbagai aktifitas PT Medco bukanlah terdakwa selaku pendiri dan komisaris utama, tetapi Direksi perusahaan PT Medco karena PT Medco sudah disahkan sebagai badan hukum. Dengan demikian hakim menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaannya antara lain menyebutkan bahwa bos



(pendiri) PT Medco group itu telah melakukan korupsi sebesar Rp. 1.8 triliun melalui penerbitan promisory notes group PT Medco yang dibeli oleh PT Jasa Asuransi Indonesia (PT Jasindo) sebuah perusahaan BUMN.

2.b. Pendapat pelaksana pelaku usaha.

Direktur PT Medco berpendapat bahwa seandainya memang PT Medco diduga melakukan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan pihak ketiga maka yang dapat diminta untuk bertanggung jawab adalah PT Medco itu sendiri yang dalam hal ini adalah Direkturnya sebagai telah dinyatakan dalam anggaran dasar PT Medco bahwa PT Medco dalam melakukan kegiatan usahanya sehari hari diwakili oleh Direkturnya yang diberi kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan. Oleh karena itu dakwaan Jaksa yang ditujukan kepada Arifin Panigoro selaku pendiri dan bos (pemilik) PT Medco adalah tidak tepat.

2.c. Pendapat Notaris.

Setelah diadakan wawancara dengan beberapa notaris di Jakarta Selatan berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan mereka berpendapat bahwa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang telah disahkan sebagai badan hukum adalah pengurusnya dalam hal ini adalah Direkturnya sebagai satu satunya orang yang mewakili perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan.

Pendiri, pemegang saham ataupun pemilik dari PT yang bersangkutan tidak dapat diminta bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

3. Pengaruh penyimpangan yang dilakukan pendiri terhadap perkembangan perseroan.

Sebagaimana diketahui bahwa PT merupakan wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan, bila dikelola dengan baik tentu akan dapat memberikan keuntungan yang tidak saja bagi PT itu sendiri namun juga bagi pendiri pemegang sahamnya. Dengan demikian untuk mendapatkan keuntungan sebenarnya pendiri tidak perlu melakukan penyimpangan yang justru akan mematikan prospek PT itu sendiri sebagai suatu badan usaha. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Pada saat berdirinya, PT Ganda Kekar Santosotex merupakan perusahaan yang tergolong besar dengan jumlah pekerjanya sebanyak 2000 orang. Aset yang dimilikinya berupa barang tetap termasuk tanah beserta bangunannya dan mesin mesin senilai Rp. 3.6 milyar. Sedangkan barang barang tidak bergerak termasuk mobil dan peralatan kantor serta inventaris lainnya senilai Rp. 1,2 milyar. Omset perbulan dari produksi textiel yang dihasilkannya mencapai Rp. 600 juta sampai Rp. 700 juta.

PT Ganda Kekar Santosotex ini sebenarnya merupakan bentuk badan usaha baru yang sebelumnya merupakan badan usaha berbentuk CV. Sebelum mendirikan PT Ganda Kekar Santosotex

Wagiyo Hadiristiono pada tahun 1982 di Pedan Klaten Jawa Tengah telah mendirikan badan usaha yang berbentuk CV yang bernama CV Budi Santoso dengan akta pendiriannya yang dibuat oleh notaris pada tanggal 13 Oktober 1982. Guna mengembangkan usahanya Wagiyo Hadiristiono bersama dengan Joko Lampito dan Herry Santoso mendirikan PT yang diberi nama PT Ganda Kekar Santosotex dengan akta pendiriannya yang dibuat oleh notaris R.Suhariman Yatawijaya pada tanggal 3 September 1987. Seluruh aset milik CV Budi Santoso termasuk juga para pekerjanya yang berjumlah 2000 orang dimasukkan sebagai sahamnya pada PT Ganda Kekar Santosotex sehingga merupakan aset dari PT Ganda Kekar Santosotex. Demikian pula hak dan kewajiban yang ada pada CV Budi Santoso beralih menjadi hak dan kewajiban dari PT Ganda Kekar Santosotex.

Peralihan status badan usaha ini tidak mempengaruhi kinerja dari perusahaan sehari-hari demikian pula pekerja serta produksinya tetap seperti sediakala. Kemelut mulai terjadi ketika Joko Lampito selaku pendiri melakukan penyimpangan, dengan dalih untuk kepentingan dan pengembangan PT Ganda Kekar Santosotex Joko Lampito membuat perjanjian pinjam meminjam uang (kredit) dengan PT Bank Bapindo Cabang Yogyakarta senilai Rp. 850.juta. Uang hasil pinjaman ini bukan digunakan untuk kepentingan PT Ganda Kekar Santosotex melainkan untuk kepentingan pribadinya yaitu dibelikan tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> di daerah Medari Sleman Yogyakarta.

Sementara itu PT Bank Bapindo Cabang Yogyakarta dalam memberikan kreditnya mendasarkan pada akta pendirian PT Ganda Kekar Santosotex dimana Joko Lampito berkedudukan sebagai

pendirinya. Di samping itu terdapat pula agunan yang berupa sertifikat sebanyak 22 buah milik PT Ganda Kekar Santosotex (dahulu ketika masih berbentuk CV Budi Santoso milik Wagiyo Hadiristiono). Dengan demikian menurut pemikiran PT Bank Bapindo Cabang Yogyakarta hutang tersebut juga merupakan hutang dari PT Ganda Kekar Santosotex.

Penyimpangan yang diselesaikan lewat pengadilan ini menurut Wagiyo sungguh sangat merugikan terhadap prospek PT Ganda Kekar Santosotex karena banyak menyita waktu, memakan tenaga dan biaya. Bisa dibayangkan selama kurun waktu 6 tahun mengurus perkara ini sejak tahun 1989 sampai dengan turunnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada tahun 1996 perkembangan PT Ganda Kekar Santosotex turun drastis bahkan pada tahun 1999 PT Ganda Kekar Santosotex secara tidak resmi tutup hanya tinggal nama saja dan 2000 karyawannya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini dikarenakan Wagiyo selaku pengurus PT tidak konsentrasi lagi mengurus manajemen PT sementara itu biaya cukup banyak untuk menyelesaikan perkara ini. Karena itu penyimpangan yang dilakukan oleh Joko Lampito ini sangat merugikan perkembangan perseroan.

Demikian pula halnya yang terjadi pada PT Medco Jakarta. Ketika mencuat perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pendirinya yang diduga melakukan penyimpangan maka kredibilitas PT Medco dihadapan koleganya mengalami erosi hal ini dapat dirasakan oleh PT Medco sebab sejak perkara itu di publikasikan lewat media massa PT Medco mendapat warning dari para kreditur yang belum jatuh tempo dimana hal semacam ini tidak pernah dialami sebelumnya oleh PT Medco.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan tersebut diatas maka dapat diuraikan pembahasan sebagai berikut :

### 1. Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri.

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bila kita perhatikan lagi pasal 10 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

"Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyer-taan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian".

dan pasal 11 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

"Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
- b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan atau
- c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan".

maka dari kata sebelum perseroan didirikan dan sebelum perseroan disahkan kita akan mengenal adanya 2 (dua) perbuatan hukum yang dilakukan pendiri yaitu :

- a. pada saat sebelum perseroan didirikan, dan
- b. pada saat sesudah perseroan didirikan tapi belum disahkan sebagai badan hukum.

#### a. Pada saat sebelum perseroan didirikan.

Telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUPT bahwa per-

seroan terbatas terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak yang telah sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas ini disebut sebagai pendiri. Pada awalnya para pendiri dapat melakukan persiapan persiapan yang diperlukan untuk pendirian perseroan tersebut, baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan. Pada masa persiapan ini para pendiri sudah mulai melakukan perbuatan hukum yang nantinya akan mempunyai akibat pada perseroan yang didirikannya itu dan juga akan membawa akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan mengingat sudah adanya hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut.

Pada fase ini, penyetoran saham (inbreng) yang dilakukan oleh pendiri dalam bentuk lain yang tidak berupa uang tunai, misalnya gedung beserta tanahnya, demikian pula pembelian barang barang yang dilakukan oleh pendiri, misalnya pabrik beserta perlengkapannya, semata mata dilakukan dengan tujuan untuk memberikan modal (harta kekayaan) pada perseroan dan memisahkannya dari harta kekayaan pribadi masing masing para pendirinya.

Penyetoran saham seperti itu yang berupa gedung, pabrik dan perlengkapannya akan menimbulkan suatu hak yang oleh doktrin di Nederland<sup>76</sup> dinamakan hak milik ekonomi

---

76. Herlien, *Pendirian, Fungsi Fungsi Anggaran Dasar Dan Struktur Permodalan Suatu Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya Undang*

(economische eigendom) dari para pendiri PT tersebut. Seperti misalnya, didalam pendirian PT Ganda Kekar Santosotex, ketiga orang pendirinya sepakat mendirikan perseroan yang bergerak dibidang pertextilan dan Wagiyo Hadristiono menyetorkan saham nya berupa gedung dan tanahnya yang tertulis atas namanya, maka Joko Lampito dan Herry Santoso bersama sama mempunyai pula hak ekonomi atas gedung tersebut. Disini terjadi suatu pemilikan bersama (mede eigendom) dari para pendiri atas barang barang dan hak hak yang telah dimasukkan atau dimaksudkan sebagai modal oleh para pendiri. Modal tersebut merupakan suatu kesatuan (gemeenschap) dan ditempatkan sebagai kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan masing masing pendiri.

Pitlo,<sup>77</sup> membedakan antara pemilikan bersama yang bebas dan pemilikan bersama yang mengikat dengan batasan bahwa pada pemilikan bersama yang bebas, tujuan dari para pemiliknya tidak lain hanya karena ingin memiliki benda tersebut bersama sama, sedangkan pada pemilikan bersama yang mengikat adalah suatu akibat saja. Dengan demikian para pemilik dalam pemilikan bersama yang bebas, masing masing bebas untuk menguasai dan mengalihkan haknya atas kepemilikan bersama tersebut, sebaliknya dalam pemilikan bersama yang mengikat, masing masing pemilik tidak bebas

---

...Continued...

*Undang nomor 1 tahun 1995, (Bandung, Makalah Seminar Tentang Antisipasi Berlakunya Undang Undang nomor 1 Tahun 1995 Terhadap Perkembangan Dunia Usaha, 1995), hal.16*

77. *Ibid.* hal.20

menguasai bendanya dan melakukan pengalihan haknya. Pendapat ini mewakili pendapat klasik yang selama ini diikuti dalam ilmu hukum.

Lain lagi Schoordijk,<sup>78</sup> pendapatnya boleh dikata progresif, ia membedakan ada atau tidaknya harta bersama yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya. "Pemilikan" bersama yang mengikat ditandai dengan adanya sifat kebadan hukum (rechtspersoonlijkheid). Selanjutnya pemilikan bersama tersebut dibagi menjadi pemilikan bersama yang sederhana atas satu benda atau lebih, dimana tidak adanya pemisahan harta kekayaan pribadi masing masing, dan pemilikan bersama atas seluruh benda dimana dikenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi masing masing.

Sehubungan dengan berbagai pendapat tersebut diatas, pemilikan bersama yang terjadi dalam masa persiapan pendirian suatu PT kiranya dapat digolongkan kedalam pendapat Pitlo yaitu dalam pemilikan bersama yang bebas karena pada masa persiapan ini apa yang dilakukan pendiri semata mata merupakan perjanjian pendahuluan dan PT nya sendiri belum terbentuk, dimana pada azasnya setiap hak yang dimiliki seseorang dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam keadaan ini tujuan para pihak adalah untuk bersama sama memiliki. Oleh karena itu pendiri dalam masa persiapan pendirian PT ini belum mempunyai kedudukan apapun dan bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

---

78. *Ibid.* hal.21



Namun demikian, dalam kaitannya dengan akibat yang tertuju pada perseroan dengan adanya perbuatan hukum dari pendiri itu, perbuatan mana dilakukan sebelum adanya perseroan (perseroan belum berdiri), perlu diketahui sejauh mana perbuatan itu mengikat perseroan.

Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995), bahwa menurut undang undang ini, kelak perseroan akan terikat pada perbuatan hukum para pendiri apabila dipenuhi syarat syarat, perbuatan hukum para pendiri selain harus dicantumkan dalam akta pendirian sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) tersebut diatas, juga pada pasal 10 ayat (2) yang menyatakan :

"Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada akta pendirian".

menurut ketentuan pasal ini ada suatu keharusan bahwa naskah asli atau akta otentik mengenai perbuatan hukum dari para pendiri itu dilekatkan menjadi satu pada akta pendiriannya. Kelalaian melakukan keharusan itu akan berakibat perseroan tidak terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) yang berbunyi :

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan".

Sehubungan dengan itu berkaitan dengan kasus yang diteli-

ti persyaratan yang diminta oleh pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan tersebut telah terpenuhi karena melalui akta pendirian yang dibuat oleh notaris R. Suhariman Yatawijaya pada tanggal 3 September 1987 selaku pendiri Wagiyo Hadiristiono telah mengalihkan seluruh aset dari CV Budi Santoso miliknya menjadi saham pada PT Ganda Kekar Santosotex dan seluruh aktiva dan pasiva serta ijin ijin dari CV Budi Santoso telah dimasukkan kedalamnya. Demikian pula pesero lainnya yaitu Joko Lampito dan Herry Santoso juga telah memisahkan harta kekayaannya untuk saham pada PT Ganda Kekar Santosotex masing masing senilai Rp.200 juta dan Rp.325 juta. Dengan saham yang telah diberikan oleh para pendirinya ini PT Ganda Kekar Santosotex telah mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya. Dengan demikian pada saat berdirinya PT Ganda Kekar Santosotex ini para pendiri adalah merupakan pemegang saham yang pertama kali pada perseroan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan, yaitu hak atas jumlah saham saham yang diserahkan oleh para pendirinya dan kewajiban untuk memberi keuntungan kepada para pemegang sahamnya (pendiri).

- b. Pada saat sesudah perseroan didirikan tapi belum disahkan sebagai badan hukum.

Didalam keadaan PT sudah didirikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris namun belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, kepemilikan bersama tersebut (saham

saham yang telah ditempatkan) bersifat mengikat, dimana keadaan pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT nya dan dapat disamakan kedudukannya dengan suatu firma. Dengan demikian para pendiri tidaklah bebas untuk mengadakan pemisahan dan pembagian.

Walaupun didalam pasal 11 UUPT ayat (1) sebagaimana telah dikutip diatas dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan akan mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila perseroan secara tegas menerima, mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum dari para pendiri tersebut, akan tetapi masih perlu dipertanyakan keterikatan perseroan mengenai perbuatan hukum yang bersifat perikatan karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab hukumnya, misalnya kalau oleh pendiri telah dilakukan sewa gedung sebelum perseroan disahkan, apakah setelah dilakukan penerimaan, pengambil alihan atau pengukuhan oleh PT, maka PT yang sudah disahkan menjadi badan hukum itu dengan sendirinya menjadi penyewa dari gedung tersebut ? Dan berarti pula perjanjian itu berlaku surut ?

Konstruksi hukum seperti ini dapat diterima, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT disahkan berlaku surut sejak PT disahkan sebagai badan hukum karena pengesahan oleh Menteri Kehakiman juga berlaku surut.<sup>79</sup>

---

79. *Ibid.* hal.19

Hal yang demikian ini kiranya yang mendasari pemikiran dari PT Bank Bapindo cabang Yogyakarta sehingga kredit itu di berikan kepada Joko Lampito selaku pendiri dari PT Ganda Kekar Santosotex. Meskipun pinjaman itu diberikan kepada Joko Lampito (tergugat II) pada akhirnya nanti ketika PT Ganda Kekar Santosotex telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum tentunya hutang tersebut menjadi tanggung jawab perseroan karena pengesahan oleh Menteri Kehakiman berlaku surut yaitu sejak akta pendiriannya dibuat oleh notaris. Oleh karena itu didalam jawaban atas gugatan Wagiyo Hadiristiono selaku Direktur yang mewakili PT Ganda Kekar Santosotex, PT Bank Bapindo Cabang Yogyakarta mendalilkan bahwa PT Ganda Kekar Santosotex tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya terhadap hutang yang dibuat oleh pendirinya yaitu tergugat II yang dibuat ketika penggugat belum berstatus badan hukum. Hal ini mendasarkan pada pengesahan badan hukum yang diberikan oleh Menteri kehakiman adalah berlaku surut yaitu sejak dibuatnya akta pendiriannya. Oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh Joko Lampito sebenarnya adalah juga perbuatan hukum dari perseroan yang didirikannya.

Akan tetapi tergugat I (PT Bank Bapindo Cabang Yogyakarta) tidak memperhatikan bahwa sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) pengalihan tanggung jawab pendiri kepada perseroan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya tidaklah secara otomatis artinya tidak dengan sendirinya apa yang telah dilakukan oleh pendiri

pada waktu perseroan belum berstatus badan hukum akan mengikat perseroan. Masih diperlukan tindakan dari perseroan itu sendiri ketika sudah menyangkut badan hukum yaitu adanya pernyataan yang tegas untuk menerima semua perjanjian yang telah dibuat oleh pendiri, mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan. Apabila hal itu tidak dilakukan oleh perseroan maka menurut Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) maka masing masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sehingga memenangkan penggugat PT Ganda Kekar Santosotex.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT yang menyatakan :

"Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan".

memberikan pengertian yang jelas bahwa kedudukan pendiri sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum adalah sebagai pemegang saham yang pertama kali, sebagai pihak yang memberikan modal kepada PT, modal mana terpisah dari harta kekayaan para pendirinya.

Pasal 7 ayat (2) UUPT tersebut mengharuskan setiap

pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, dengan demikian jelas bahwa pengambilan saham (penyetoran modal) adalah pada saat pendirian perseroan bukan pada saat pengesahannya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pendiri adalah juga para pemegang saham dalam perseroan terbatas namun para pendiri masih harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya karena perseroan belum disahkan sebagai badan hukum.

2. Kedudukan dan tanggung jawab pendiri setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum.

Berkaitan dengan kedudukan hukum Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) dan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengajukan Arifin Panigoro dalam kapasitasnya selaku pendiri PT Medco sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PT Medco, bagaimanakah kedudukan pendiri dan tanggung jawabnya setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum khususnya ketika perseroan diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga ?

Bila kita mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) kedudukan pendiri pada saat perseroan didirikan tak lain adalah pemegang saham.

Dan bila hal ini kita kaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya".

maka dapat dikatakan bahwa pendiri adalah pemegang saham pada perseroan baik pada saat perseroan belum disahkan sebagai badan hukum maupun sesudah perseroan berstatus badan hukum dengan tanggung jawab yang berbeda. Perbedaannya ialah apabila keadaan perseroan belum disahkan menjadi badan hukum maka tanggung jawab pendiri mengikuti ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) :

"Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :

- a. perseroan secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
- b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan atau
- c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan".

Pasal 11 ayat (2) :

"Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul".

Jadi dalam keadaan perseroan belum disahkan sebagai badan hukum tiap tiap pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dan tanggung jawab

ini akan beralih pada perseroan setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum dan kemudian melakukan tindakan *menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis* semua perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri. Apabila perseroan tidak melakukan tindakan menerima, mengambil alih atau mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum yang dilakukan pendiri maka perseroan tidak terikat dan masing masing pendiri bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya itu.

Kalau perbuatan hukum yang dilakukan pendiri dalam keadaan perseroan belum disahkan sebagai badan hukum, untuk terlepasnya tanggung jawab secara pribadi dari pendiri pada saat perseroan telah disahkan sebagai badan hukum diperlukan tindakan dari perseroan seperti diuraikan diatas, sebaliknya dalam keadaan perseroan telah disahkan sebagai badan hukum, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan perseroan untuk melepaskan tanggung jawab pendiri secara pribadi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang saham perseroan. Oleh karena itu tanggung jawab pendiri sebagai pemegang saham mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya".

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pendiri selaku pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas segala



perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dan pendiri selaku pemegang saham tidak dapat dibebani kewajiban membayar kerugian yang diderita perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berapapun jumlah kerugian yang diderita perseroan, pendiri selaku pemegang saham hanya akan membayar kerugian itu sebatas nilai saham yang telah diambilnya.

Namun demikian Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) tidak menutup kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* (penerobosan tanggung jawab).

Pemegang saham akan bertanggung jawab secara pribadi apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, demikian ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) a yang berbunyi :

"Ketentuan pemegang saham yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak terpenuhi ";

Satu satunya syarat untuk memperoleh status badan hukum adalah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (6) yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

"Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri".

Selama belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, perseroan terbatas belum bisa dikatakan sebagai badan hukum

sehingga pada dasarnya tidak berbeda dengan firma, oleh karena itu seluruh pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan atau tindakan perseroan.

Akan tetapi walaupun perseroan terbatas telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, pemegang saham masih juga harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, c, dan d apabila :

1. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata mata untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi apabila pemegang saham menggunakan perseroan sebagai alat untuk memenuhi ambisinya sehingga tidak terpisahkan lagi antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadinya.
2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Disini yang melakukan perbuatan hukum adalah perseroan itu sendiri, sedangkan pemegang saham hanya ikut terlibat saja.
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Disini pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan secara tidak sah sehingga perseroan tidak dapat melunasi hutangnya.

Disamping ketentuan ketentuan mengenai tanggung jawab pemegang saham seperti tersebut diatas, masih ada beberapa ketentuan yang mengatur hak hak yang dimiliki pemegang saham

diantaranya adalah merupakan hak hak baru yang diberikan Undang Undang Perseroan Terbatas (Undang Undang No.1/1995) yang sebelumnya tidak didapati dalam peraturan lama (KUHD). Sebelum kita membahas hak hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang saham, ada baiknya terlebih dahulu dibahas tentang istilah pemegang saham yang digunakan dalam bahasa Indonesia terhadap para pemilik saham, sebagaimana terdapat dalam beberapa terjemahan KUHD antara lain dari Subekti dan Tji-trosudibyo<sup>80</sup> pada Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi :

"Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil-2 itu".

Didalam Engelbrecht<sup>81</sup>, bahasa asli yang digunakan dalam Pasal 40 ayat (2) Wetboek van Koophandel berbunyi sebagai berikut :

"De vennoten of houders dier actien of aandelen zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle beloop derzelve".

Sedangkan dalam KUHD dan Peraturan Kepailitan terjemahan Soemarti<sup>82</sup> Pasal 40 ayat (2) tersebut diterjemahkan sebagai berikut :

---

80. R.Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Dagang Dan Undang Undang Kepailitan*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1977), hal.15

81. Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet Van Republiek Indonesie*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1989), hal.953

82. Siti Soemarti Hartono, *KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*, (Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hal.16

"Pesero-pesero atau pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh dari saham saham itu".

Dari beberapa terjemahan tersebut houder dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi pemegang saham dalam bahasa Indonesia.

Persoalannya sekarang, apakah pemegang saham dimaksud adalah juga sebagai pemilik saham (*eigenaar*) ? Padahal didalam bahasa Belanda ada 3 (tiga) istilah yang erat kaitannya dengan kepemilikan atau penguasaan sesuatu benda yaitu : *houden*, *bezitten* dan *eigendom*.

Untuk menjawab persoalan tersebut beberapa sarjana berpendapat :

*Houden*, oleh Algra dan Gokkel<sup>1</sup> diartikan sebagai memegang sesuatu benda secara nyata. Apabila memegang secara nyata tersebut dengan maksud untuk memilikinya maka dikatakan sebagai *bezitten* (menguasai).

Demikian pula Mijnsen dan Schut<sup>2</sup> mengartikan *houden* sebagai menguasai atau memegang sesuatu benda secara nyata.

Lebih lanjut dikatakan bahwa *houden* itu mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu menguasai atau memegang sesuatu benda secara nyata untuk dirinya sendiri (*bezit*) dan menguasai atau memegang sesuatu benda secara nyata untuk orang lain.

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya antara *houden* dan *bezit* mempunyai pengertian yang sama.

---

1. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.76

2. *Ibid.* hal.76

Sedangkan menurut Pasal 529 KUH Perdata yang dimaksud dengan bezit adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang menguasainya, baik sendiri atau dengan perantaraan orang lain seolah olah itu adalah kepunyaan sendiri.

Menurut Soedewi<sup>85</sup> syarat syarat adanya bezit ialah :

1. Corpus, harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya ;
2. Animus, hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang terebut. Dan kehendak ini adalah kehendak yang sempurna.

Pasal 638 KUH Perdata menjelaskan, bezit atas sesuatu benda itu diperoleh dengan tindakan berupa menempatkan sesuatu benda didalam kekuasaannya dengan maksud untuk tetap mempertahankannya bagi diri sendiri.

Terhadap bunyi pasal ini menurut Soedewi<sup>86</sup>, para ahli banyak yang keberatan karena pertama, ternyata tidak semua bezit itu diperoleh dengan tindakan. Contohnya terhadap harta peninggalan (warisan), ahli waris dari orang yang meninggal tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk menguasai harta peninggalan dari orang yang meninggal itu, karena secara hukum dengan sendirinya akan memperoleh bezit dari harta peninggalan (warisan) itu.

Kedua, istilah kekuasaan itu seharusnya diartikan luas,

---

85. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hal.84

86. *Ibid.* hal.87

tidak perlu merupakan kekuasaan langsung, misalnya seorang pesuruh yang mengerjakan sesuatu untuk kita, itu juga berarti menempatkan benda dalam kekuasaannya. Ketiga, mengenai istilah memiliki (*behouden*) itu juga kurang tepat, karena perolehan bezit tidak perlu dengan maksud untuk tetap memilikinya bagi diri sendiri.

Selanjutnya masih menurut Soedewi<sup>87</sup>, berdasarkan keberatan keberatan tersebut, untuk memperoleh bezit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Dengan jalan *occupatio*, (mendaku atau menduduki bendanya). Memperoleh bezit dengan cara seperti ini dapat dikatakan juga memperoleh bezit secara *origineel* (asli), artinya diperoleh secara mandiri tanpa bantuan dari bezitter yang terdahulu. Bisa tertuju pada benda bergerak maupun tak bergerak dan bila tertuju pada benda yang bergerak bisa terhadap benda yang tak ada pemiliknya, misalnya ikan di sungai, burung dan buah buahan di hutan dan lain lain.

2. Dengan jalan *traditio* (penyerahan bendanya).

Memperoleh bezit dengan cara ini dapat dikatakan memperoleh bezit yang bersifat *derivatif*, artinya memperolehnya dengan bantuan bezitter yang terdahulu, dari tangan bezitter yang lama ke tangan bezitter yang baru.

Akan tetapi menurut Soedewi, pengertian mengenai bezit itu sendiri didalam praktek antara para ahli sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Mereka hanya sependapat pada satu hal,

---

87. *Ibid.* hal.88

yaitu bahwa persoalan mengenai bezit termasuk hal yang paling sukar.

Sementara itu Arrest HR 12 Juni 1906 dan 10 Mei 1929 sebagai yang dikutip oleh Vollmar dan Adiwimarta<sup>88</sup>, agar bezit sebagai alas hak yang sempurna, disyaratkan adanya itikad baik. Sedangkan didalam arrest stroman (HR 4 Juni 1920) ditentukan bahwa yang menurut Pasal 2014, disamakan dengan peserta ialah bezitter yang memegang sero itu, sebagai kepunyaannya, sebagai hal yang menjadi haknya.

Selanjutnya mengenai istilah eigendom, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria, yang mencabut semua hak hak kebendaan yang bertalian dengan tanah dari buku II KUH Perdata maka pembahasan masalah eigendom (hak milik) dibatasi pada hak milik selain tanah. Menurut Algra dan Gokkel<sup>89</sup> eigendom diartikan sebagai "absoluut, meest om vattende recht op een zaak".

Artinya eigendom sebagai hak untuk menguasai atau memegang sesuatu benda secara mutlak (absolut).

Demikian juga pendapat Vollmar dan Adiwimarta<sup>90</sup> yang mengatakan bahwa hak eigendom adalah hak yang paling luas yang dapat dimiliki seseorang terhadap suatu benda.

Pada azasnya si pemilik (eigenaar) itu dapat berbuat apa saja dengan benda itu dan kedudukannya adalah lebih kuat

---

88. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal. 79

89. *Ibid.* hal.80

90. *Ibid.* hal.80

dengan orang yang memegang (bezit) benda itu. Bezitter hanyalah mempunyai suatu bayangan daripada hak.

Simorangkir<sup>91</sup>, dalam buku kamus hukum, menterjemahkan eigen-dom sebagai milik, hak atas sesuatu barang yang paling sempurna dan kuat, dapat dikatakan hak mutlak. Sedangkan menurut Pasal 570 KUH Perdata yang dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang undang.

Dari rumusan Pasal 570 KUH Perdata tersebut Soedewi<sup>92</sup> menyimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak hak kebendaan yang lain. Karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas bebasnya.

Dengan dikenalnya 2 (dua) jenis saham didalam UUPT, yaitu saham atas nama dan saham blanko atau saham atas tunjuk, menjadikan orang tidak begitu mudah mengetahui apakah seseorang sebagai pemegang saham yang atas tunjuk atau orang

---

91. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), Hal.55

92. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit.* hal.42



yang memegang saham untuk kepentingan orang lain (stroman), namun ia adalah orang yang benar benar memiliki dalam arti eigenaar dari saham tersebut. Demikian pula terhadap saham atas nama seperti yang diperjual belikan dilantai bursa, apakah pemegang saham yang terakhir yang belum sempat dibalik nama adalah dapat disebut sebagai eigenaar ?

Padahal ia secara nyata adalah sebagai houder atau bezitter.

Oleh karena itu menurut Vollmar dan Adiwimarta<sup>93</sup> dalam teori hukum dikenal adanya teori legitimasi yang menurut sejarahnya dikenal lebih dulu dalam persoalan eigendom. Menurut teori legitimasi ini seorang yang secara nyata memegang sepucuk saham atas tunjuk atau saham blanko dengan etikad baik, maka ia dilegitimasi oleh hukum bahwa ia adalah orang yang berhak atas saham tersebut. Dengan legitimasi ini ia dinyatakan sebagai eigenaar dari saham tersebut, semula ia hanya sebagai houder kemudian dilegitimasi menjadi eigenaar. Keadaan seperti ini kiranya yang menjadi alasan pembentuk Kitab Undang Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel mempergunakan istilah houder (pemegang saham) dalam memberikan kedudukan hukum kepada pemilik saham.

Kembali kepada masalah hak hak pemegang saham, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No 1/1995), mula mula diatur dalam Pasal 44 yang menentukan bahwa kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 44 tersebut dika-

---

93. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.81

takan bahwa bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham sedangkan bukti pemilikan saham atas nama diserahkan kepada para pihak dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Hal demikian ini memberikan kebebasan pada perseroan untuk menentukan bukti kepemilikan saham atas nama selain dalam bentuk surat saham asal diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan, misalnya daftar nama yang ada dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang disahkan oleh Direksi. Selain hak pemegang saham seperti telah disebutkan dalam Pasal 44 tersebut diatas masih banyak hak yang diberikan undang undang kepada pemegang saham antara lain ialah :

1. Berhak menggugat perseroan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 54 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No1/1995) menyatakan bahwa :

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris".

2. Berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) menyebutkan bahwa :

"Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. perubahan anggaran dasar ;
- b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan ;
- c. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan".

3. Berhak atas deviden.

Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU NO.1/1995) :

"Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden".

4. Berhak meminta diselenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No 1/1995) menyatakan bahwa :

"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseoran yang bersangkutan".

5. Berhak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara.

Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU no 1/1995) menyatakan bahwa :

"Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya".

Berkaitan dengan hak suara, Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No 1/1995) menentukan bahwa pada dasarnya 1 (satu) saham, untuk 1 (satu) suara dengan tidak menutup kemungkinan anggaran dasar menentukan lain. Dalam hubungan dengan hak suara tersebut, Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) menentukan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

6. Berhak diangkat oleh RUPS untuk mewakili perseroan dalam hal anggota direksi terkena larangan mewakili perseroan.

Pasal 84 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) menyatakan bahwa :

"Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan".

7. Berhak menggugat direksi atau komisaris ke Pengadilan Negeri.

Pasal 85 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No 1/1995) menyatakan bahwa :

"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan".

Pasal 98 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) menyatakan bahwa :

"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan".

8. Berhak untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar

Pemegang Saham, risalah dan pembukuan perseroan.

Pasal 86 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995) menyatakan bahwa :

"Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

9. Berhak memohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan.

Pasal 110 Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995) menyatakan bahwa :

ayat (1) : Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau
- b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga.

ayat (2) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan pemeriksaan, atau
- c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

10. Berhak memohon pada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan.

Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No 1/1995) menyatakan bahwa :

"Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah".

11. Berhak menerima kekayaan hasil likuidasi.

Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995) menyatakan bahwa :

"Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham".

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pemegang saham disamping mempunyai tanggung jawab juga mempunyai hak hak yang diberikan oleh undang undang. Dan masih ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham yaitu kewajiban kewajiban yang harus dilakukannya.

Pada dasarnya kewajiban pemegang saham terhadap perseroan ialah :

1. Mematuhi undang undang, anggaran dasar serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perseroan yang bersangkutan.
2. Melunasi pembayaran atas modal yang dikeluarkan dan seharusnya sudah disetorkan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa tidak semua dari modal dasar perseroan harus dikeluarkan pada saat pendirian PT, dan tidak semua modal yang dikeluarkan sudah harus disetorkan pada saat dikeluarkan saham. Mengenai masalah ini Pasal 26 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa pada saat pendirian PT, paling sedikit 25% dari modal dasar sudah harus ditempatkan. Kemudian pasal 26 ayat (2) UUPT menyambung bahwa setiap penempatan modal dimaksud harus telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
3. Membayar lunas seluruh harga saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (3) UUPT yang menyebutkan bahwa seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat perseroan disahkan menjadi badan hukum. Berkaitan dengan pembayaran saham ini perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 28 UUPT yang menegaskan bahwa pemegang

saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya.

Dalam kasus PT Medco (PT Meta Epsi Drilling Company) Arifin Panigoro yang diajukan sebagai tersangka adalah pemegang saham dan juga pendiri dari PT Medco tersebut. Dalam kepengurusan perseroan Arifin Panigoro berkedudukan sebagai komisaris utama PT Medco. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum antara lain menyebutkan bahwa Arifin Panigoro selaku boss (pemilik) PT Medco telah melakukan korupsi senilai Rp. 1.8 triliun melalui penerbitan promisory notes group PT Medco yang dibeli oleh PT Jasa Asuransi Indonesia (PT. Jasindo) badan usaha milik negara.

Disini Jaksa berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai pemilik dari PT Medco, hal ini ditinjau dari sisi economic (non yuridis) memang benar karena terdakwa adalah orang yang mendirikan PT Medco dan pemegang saham terbesar pada perusahaan itu sehingga dapat dikatakan dialah pemilik perusahaan minyak PT Medco tersebut. Namun demikian dilihat dari kedudukannya sebagai pemegang saham (secara yuridis) tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan perseroan yang melawan hukum dan merugikan pihak ketiga sebab pemegang saham bukanlah orang yang mewakili perseroan terhadap pihak ketiga baik didalam maupun diluar pengadilan. Hal ini jelas diatur didalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Perseroan

Terbatas (UU No.1/1995) yang mengatakan bahwa :  
Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas Direksi ialah mengurus perseroan.

Menurut teori organisme dari Otto von gierke sebagai yang dikutip oleh Suyling<sup>94</sup>, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ organ tubuh misalnya, kaki, tangan, dan lain sebagainya itu geraknya diperintah oleh otak manusia, demikian pula gerak dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu.

Didalam penjelasan resmi dari Pasal 79 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari hari dari perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi oleh karena itu harus dilihat dalam Anggaran Dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari hari itu walaupun tidak mungkin disebutkan secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata mata adalah tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Disamping itu Pasal 82 UUPT tersebut diatas juga memberikan pedoman kepada Direksi agar didalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.

---

94. Nindyo Pramono, *op.cit.* hal.86



Hal ini menurut Emmy,<sup>95</sup> dapat diduga latar belakang adanya ketentuan itu adalah karena kepentingan perseroan serta tujuan perseroan disatu pihak suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham.

Ketentuan mengenai Direksi yang dalam melaksanakan tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta tujuan daripada perseroan rupa rupa didasarkan pada faham yang oleh sementara orang disebut sebagai faham institusi atau pandangan bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan Direksi. Demikian pula Pasal 85 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan, juga termasuk pada pandangan faham institusi yang disebut diatas. Itikad baik Direksi untuk menjalankan/mengurus perseroan secara profesional dengan skill dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan usaha perseroan termasuk pula kepentingan para pemegang saham.

Sehubungan dengan itu, menurut Paul Scholten dan Bregstein,<sup>96</sup> Pengurus adalah mewakili badan hukum. Analog dengan pendapat Gierke dan Paul Scholten maupun Bregstein tersebut diatas, maka Direksi bertindak mewakili PT sebagai badan hukum. Kewenangan perwakilan dari Direksi PT ini timbul karena adanya pengangkatan dari RUPS dan akan berak-

---

95. Emmy Pangaribuan, *op.cit.* hal.5

96. Nindyo Pramono, *op.cit.*, hal.87

hir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili itu ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHD yo. Pasal 80 ayat (3) UUPT yang intinya menyebutkan bahwa Direksi tidak boleh diangkat tanpa kemungkinan untuk di cabut kembali.

Seperti telah di kemukakan diatas bahwa pengangkatan Direksi dilakukan oleh RUPS akan tetapi untuk pertama kalinya pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendiriannya.

Ketentuan seperti ini dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perseroan Terbatas.

Direksi dapat diangkat dari orang pemegang saham atau bukan bahkan menurut Prasetyo<sup>97</sup> pemegang jabatan Direksi sekaligus sebagai pemegang saham hanyalah suatu kebetulan karena didalam praktek sering dijumpai Direksi PT adalah orang luar, bukan pemegang saham.

Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan sampai dimana kewenangan direksi dalam menjalankan tugasnya. Pasal pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa PT diurus oleh pengurus yang diangkat oleh para pemegang saham, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai luas, isi maupun ruang lingkup pengurusan itu. Demikian pula rincian tugas direksi didalam Undang Undang No.1 Tahun 1995 tidak dapat diketahui. Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perseroan Terbatas hanya menyatakan bahwa pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang

---

97. Rudhi Prasetya, *op.cit*, hal.17

setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi ditetapkan oleh RUPS. Dan dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS tersebut dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS.

Jadi untuk mengetahui rincian tugas direksi harus dilihat dalam anggaran dasar PT dan pada umumnya berkisar pada :

1. Mengurus segala urusan ;
2. Menguasai harta kekayaan perseroan ;
3. Melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPdt, yaitu :
  - a. memindah tangankan hipotik pada barang barang tetap ;
  - b. membebankan hipotik pada barang barang tetap ;
  - c. melakukan *dading* ;
  - d. melakukan perbuatan lain mengenai hak milik ;
  - e. mewakili perseroan dimuka dan diluar pengadilan ;
4. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, direksi mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.
5. Dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma norma pembukuan yang lazim.

Tiap tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan, direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. Bahkan menurut ketentuan pasal 59 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, direksi perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan penerahan dana masyarakat seperti usaha perbankan, usaha asuransi dan lain sebagainya atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang seperti misalnya perseroan yang menerbitkan obligasi dan perseroan terbuka atau PT Terbuka diwajibkan menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa. Jika hal ini tidak dipenuhi maka RUPS tidak boleh mensahkan laporan tersebut. Laporan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan telah disahkan oleh RUPS tersebut wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Direksi bertanggung jawab pada RUPS atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya atas nama perseroan. Pemeriksaan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh RUPS atau oleh dewan komisaris apabila anggaran dasar mengatur demikian.

6. Melaksanakan pendaftaran dan pengumuman.

Jika akta pendirian perseroan sudah mendapat pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka pendiri, dalam hal ini direksi pertama dari perseroan tersebut diwajibkan mendaftarkan akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman tersebut kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia. Demikian pula bila terjadi perubahan dalam syarat syarat pendirian atau perpanjangan jangka waktu perseroan, direksi wajib mendaftarkan dan mengumumkan persetujuan Menteri Kehakiman tentang hal itu.

Uraian tugas tersebut hanya merupakan gambaran umum yang termuat dalam anggaran dasar perseroan. Dalam hal hal tertentu seperti misalnya dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, disamping harus mengacu kepada tujuan perseroan dapat pula ditentukan harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari komisaris yang telah diberi mandat oleh RUPS. Biasanya perbuatan hukum yang harus mendapat persetujuan dari komisaris ini ialah perbuatan hukum yang berkaitan dengan penguasaan terhadap sesuatu benda. Disamping itu menyelenggarakan dan memimpin RUPS tahunan dan juga RUPS lainnya merupakan tugas direksi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 66 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1995.

Mengenai kewajiban direksi, biasanya telah diatur dalam anggaran dasar perseroan, antara lain meliputi :

- a. Menyusun anggaran belanja perseroan untuk tahun yang akan datang. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan datang dimulai, anggaran belanja perseroan sudah harus dibicarakan dan selanjutnya dimintakan pengesahan pada RUPS.
- b. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan tugas direksi dalam hal mengurus dan menguasai perusahaan atau

tentang neraca triwulan atau tahunan yang disampaikan kepada dewan komisaris.

- c. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi. Menurut pasal 56 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, neraca dan perhitungan laba rugi tersebut harus dibuat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapaty pengesahan.
- d. Membuat daftar inventarisasi atas semua harta kekayaan perseroan serta pelaksanaan pengawasannya.
- e. Menyelenggarakan RUPS minimal satu kali dalam setahun atau pada saat saat yang diperlukan dan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- f. Memberi keterangan keterangan yang diperlukan oleh dewan komisaris pada saat pemeriksaan. Dalam praktek sering terjadi dewan komisaris menggunakan jasa akuntan publik untuk memeriksa pembukuan dan direksi wajib memberikan keterangan yang diminta oleh akuntan publik tersebut.
- g. Menyelenggarakan RUPS luar biasa pada setiap waktu yang dipandang perlu oleh direksi atas usul atau permintaan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.
- h. Mengumumkan secara resmi baik dalam surat kabar maupun dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, bilamana direksi akan mengeluarkan duplikat duplikat saham

yang hilang.

- i. Menyediakan buku daftar pemegang saham dan daftar khusus di kantor perseroan untuk para pemilik saham. Penyelenggaraan buku daftar pemegang saham dan daftar khusus ini harus dilaksanakan sebaik baiknya. Buku daftar pemegang saham dan daftar khusus ini erat kaitannya dengan kedudukan hukum pemilik atau pemegang saham. Buku daftar pemegang saham dan daftar khusus ini dapat menjadi indikator kepemilikan atas saham suatu perseroan dan ada tidaknya hubungan afiliasi antara direksi dan keluarganya dengan perseroan yang dikelolanya. Nama nama yang tercatat dalam buku daftar pemegang saham atau daftar khusus adalah orang orang yang secara yuridis diakui sebagai pemilik saham. Hal ini bertujuan agar ada transparansi perseroan dalam upaya menjamin perlindungan hukum pihak ketiga.
- j. Dalam hal pembubaran perseroan, direksi wajib melakukan likuidasi melalui seorang likuidator dan biasanya dibawah pengawasan dewan komisaris.

Untuk menjalankan tugas kewajiban tersebut dan sesuai dengan prinsip manajemen perusahaan, direksi mempunyai wewenang atau otoritas yang oleh Winardi<sup>98</sup> diartikan sebagai kekuasaan resmi atau legal untuk menyuruh pihak lain bertindak dan taat kepada pihak lain yang memilikinya.

---

98. Winardi, *Asas Asas Manajemen*, (Bandung, Alumni, 1983)  
hal.239

Sementara itu menurut Rido<sup>99</sup> wewenang direksi yang lazim terdapat didalam anggaran dasar perseroan, antara lain ialah :

- a. Apabila pengeluaran saham saham telah jatuh tempo dan masih diperlukan perpanjangan waktu maka direksi diberi wewenang untuk memohonkan perpanjangan waktu kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman.
- b. Apabila dalam waktu satu bulan setelah direksi memberitahukan pengeluaran saham saham tersebut tidak ada yang membelinya, maka direksi dengan persetujuan komisaris mempunyai wewenang untuk menjual saham saham itu kepada siapa saja.
- c. Direksi bersama sama dengan dewan komisaris berwenang menanda tangani surat surat saham.
- d. Bila ada suat saham atau talon yang rusak hingga tak dapat dipakai lagi, maka direksi berwenang mengeluarkan duplikatnya atas permintaan yang berkepentingan setelah aslinya dimusnahkan oleh direksi dihadapan yang berkepentingan tersebut.
- e. Demikian pula apabila surat saham atau talon yang asli tadi hilang maka dengan bukti yang cukup serta jaminan jaminan yang dianggap perlu direksi mempunyai wewenang untuk memberikan duplikatnya.
- f. Direksi mempunyai wewenang untuk menahan keuntungan keuntungan atas saham, dan melarang mengeluarkan suara atas saham tersebut, jika ternyata dalam suatu peminda-

---

99. Ali Rido, *op.cit.* hal.300



han hak, tidak dipenuhi kewajiban kewajibannya.

- g. Direksi atas tanggung jawabnya sendiri diberi kewenangan untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat syarat dan kekuasaan kekuasaan yang ditentukan secara tertulis.
- h. Direksi mempunyai wewenang mewakili perseroan dimuka dan diluar pengadilan serta berhak melakukan perbuatan pengurusan dan pemilikan atau penguasaan (beheer en beschkking) dengan batasan batasan tertentu.
- i. Mempunyai wewenang memimpin dan mengetuai RUPS.
- j. Mempunyai wewenang untuk mengadakan rapat umum luar biasa pemegang saham setiap waktu bila dipandang perlu.
- k. Mempunyai wewenang untuk menanda tangani notulen rapat, jika notulen tidak dibuat dengan proses verbal notaris.

Dalam hal wewenang direksi untuk mewakili perseroan di luar pengadilan, anggaran dasar sering memberikan pembatasan pembatasan antara lain sebagai berikut :

- a. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari dewan komisaris apabila ia akan melakukan tindakan tindakan :
  - 1. Meminjam uang atas nama perseroan atau meminjamkan uang kepada pihak lain dalam jumlah tertentu.
  - 2. Mengikat perseroan sebagai penjamin hutang.
  - 3. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau mengalihkan barang barang tetap milik perseroan atau membebani barang barang milik perseroan tersebut dengan hutang.
  - 4. Menggadaikan barang barang bergerak milik perseroan yang bernilai tinggi.

- b. Dalam hal mengangkat dan memberhentikan seorang kuasa untuk mewakili perseroan harus dilakukan oleh dua orang anggota direksi atau apabila direksi itu terdiri hanya seorang direktur maka harus dilakukan bersama sama dengan komisaris.
- c. Direksi harus bekerja sesuai dengan rencana kerja yang telah di setujui oleh dewan komisaris atau RUPS.
- d. Tiap anggota direksi wajib meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada anggota direksi lainnya apabila akan melakukan tindakan yang menurut kebiasaan dalam dunia usaha dianggap sebagai hal yang penting bagi perseroan.
- e. Pembagian pekerjaan direksi dalam lingkungan perseroan antara para anggota direksi diatur dan ditentukan sendiri oleh para anggota direksi itu.

Dari perincian tugas dan wewenang direksi, pada umumnya telah ditentukan dalam pasal 85 Undang Undang No.1 Tahun 1995 yang antara lain ditentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan etiked baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya setiap anggota direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruhnya.

Sebagai orang yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang kuasa dari

perseroan, disamping tentunya segala perikatan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai pemegang kuasa menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum, direksi masih diberi tanggung jawab juga dalam hal hal sebagai berikut :

- a. Bagi direksi yang bukan sebagai pemegang saham, menurut ketentuan pasal 82 Undang Undang No.1 Tahun 1995 mengatakan bahwa : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Selanjutnya menurut pasal 85 Undang Undang No.1 Tahun 1995, direksi wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan etika baik dan penuh tanggung jawab. Kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas akan dikenai sanksi pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Hal demikian dahulu juga diatur didalam pasal 45 ayat (1) KUHD yang menentukan bahwa tanggung jawab direksi tidak lebih dari pada pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya. Mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak pihak ketiga berdasar perikatan perikatan yang dilakukan atas nama perseroan.
- b. Bagi direksi yang merangkap sebagai pemegang saham, disamping tanggung jawab yang diberikan sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang Undang No.1 Tahun 1995 tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Jadi tanggung jawab direksi selaku juga sebagai pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang telah diambilnya.

- c. Dalam hubungannya dengan keharusan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, menurut ketentuan pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, bila sebelum pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan, perseroan telah melakukan perbuatan hukum maka direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ini timbul apabila direksi yang memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya. Agar direksi sebagai orang yang sehari hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi yang besar maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>100</sup>

Idealnya, jika wewenang itu dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

---

100. Winardi, *op.cit.* hal.144

Dengan demikian orang satu satunya yang dapat diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan perseroan adalah direksi. Apapun kedudukan pendiri pemegang saham didalam kepengurusan perseroan, bila ia tidak menjabat sebagai direksi maka ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan karena dakwaan jaksa salah alamat (error impersona). Bukan terdakwa yang harus bertanggung jawab terhadap penerbitan promisory notes yang diterbitkan oleh PT Medco karena terdakwa bukanlah direksi, seharusnya direksilah yang diajukan sebagai terdakwa sebab menurut undang undang direksilah yang mengurus perseroan dan mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan bila terdapat dugaan perseroan yang diurusnya (dipimpinnya) melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Dalam hal ini promisory notes diterbitkan oleh PT Medco suatu perseroan yang telah mempunyai status badan hukum bukan oleh terdakwa. Sebagai badan hukum PT Medco adalah subyek hukum yang diakui dalam lalu lintas hukum. Oleh karenanya PT Medco mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana orang yang bisa dituntut dan bisa menuntut dimuka pengadilan. Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya agar perseroan (PT Medco) dapat bertindak sebagaimana orang, PT Medco diwakili oleh direksinya, bukan terdakwa meskipun secara ekonomis terdakwa adalah pemilik dari PT Medco dan mempunyai kedudukan sebagai komisaris utama dalam kepengurusan PT Medco tersebut.

Lain halnya apabila terdakwa selaku pendiri dan pemegang saham ikut terlibat dalam perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan maka sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat (b) dan (c) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) seperti telah dikutip diatas maka pemegang saham dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi berdasarkan asas pierching the corporate veil (penerobosan tanggung jawab).

Kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, kedudukan hukum pendiri berubah menjadi pemegang saham pada perseroan tersebut dan tanggung jawabnya di samping tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga (kreditur) juga tidak dapat dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya atas kerugian yang diderita perseroan. Selaku pemegang saham yang tidak berkedudukan sebagai direksi tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan yang diduga melawan hukum. Direksi adalah satu satunya orang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan dan merugikan pihak ketiga.

### 3. Pengaruh penyimpangan yang dilakukan pendiri terhadap perkembangan usaha perseroan.

Hal ini patut disayangkan sebab dengan mendirikan perseroan terbatas guna menjalankan modalnya pilihan tergugat II ini sudah tepat. Perseroan Terbatas merupakan institusi yang

mampu memberikan keuntungan bagi pendiri pemegang sahamnya sebab PT merupakan badan usaha yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan badan usaha dalam bentuk lainnya.

Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki PT sebagai pelaku bisnis yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain diantaranya adalah :

- a. Ditinjau dari kedudukan hukumnya, PT merupakan badan usaha yang mempunyai status badan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Konsekuensi dari status badan hukum yang disandang PT ini menjadikan PT merupakan subyek hukum dan eksistensinya diakui dalam lalu lintas hukum. Artinya keberadaan PT diakui dan dipersamakan sebagaimana orang yang mampu mendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya ia mampu melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan. Sebagai subyek hukum yang berkecimpung dalam dunia bisnis PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari para pendirinya, kekayaan mana dipakai sebagai modal dalam melakukan aktifitas usahanya dan merupakan jaminan bagi pihak ketiga yang menjalin hubungan usaha dengan PT

sehingga tuntutan pihak ketiga yang berhubungan dengan PT itupun harus ditujukan kepada PT itu sendiri bukan kepada pendirinya (pemilik modal).

Kekayaan PT untuk pertama kali diperoleh dari para pendirinya yang menyisihkan harta kekayaannya dan disetor kepada PT sebagai saham. Oleh karena itu para pendiri ini juga berkedudukan sebagai pemegang saham yang pertama kali sebab ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU NO.1/1996) mewajibkan para pendiri PT mengambil bagian sahamnya ketika perseroan didirikan. Jadi pada saat perseroan didirikan dengan akta notaris para pendiri wajib mengambil sahamnya dengan menyelor modal kedalam PT yang dipisahkan dari harta kekayaannya. Keuntungan yang dinikmati oleh pendiri pemegang saham adalah deviden yaitu keuntungan atau laba yang diperoleh PT dan dibagikan kepada para pemegang sahamnya.

- b. Ditinjau dari sisi resiko, PT mampu meminimalkan resiko sebab menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat perseroan dan tidak akan dibebani membayar kerugian yang dialami perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Seandainya didalam melakukan kegiatan usaha itu PT mengalami kebangkrutan maka pemegang saham hanya bertanggung jawab membayar kerugian yang diderita PT sebatas nilai saham yang diambilnya dan tidak dapat dituntut melebihi jumlah itu.



Berbeda dengan badan usaha berbentuk Firma, disini setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan perikatan persekutuan (Titel ketiga bagian kedua Pasal 18 KUHD).

- c. Ditinjau dari sisi pengawasan, maka PT lebih mudah dipantau perkembangan usahanya sebab Pasal 86 ayat (1.b) dan ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) memberikan kewajiban kepada pengurus PT (Direksi) untuk menyelenggarakan pembukuan yang setiap saat dapat dilihat oleh pemegang saham. Dengan demikian pemegang saham senantiasa dapat mengawasi perkembangan usaha yang dijalankan PT dari waktu ke waktu.
- d. Ditinjau dari sisi tanggung jawab, pendiri (dalam persekutuan dengan firma sama kedudukannya dengan para sekutu) dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada perseroan setelah perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum sebagai akibat adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri pada waktu perseroan belum disahkan sebagai badan hukum untuk kepentingan perseroan walaupun perbuatan hukum itu dilakukan tidak dengan atas nama perseroan. Jadi disini sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU NO.1/1995) perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan mengikat perseroan setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum. Akan tetapi pengalihan tanggung jawab itu harus memenuhi

syarat syarat yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, b dan c yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
- b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri walaupun perjanjian dilakukan tidak atas nama perseroan ; atau
- c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

e. Ditinjau dari sudut permodalan, ternyata PT lebih mampu dan lebih mudah untuk mengadakan penambahan modal (kapitalisasi) sebab PT mempunyai peluang untuk melakukan penawaran umum saham sahamnya melalui Pasar Modal, peluang mana tidak dimiliki oleh badan usaha dalam bentuk lainnya. Guna menambah modal PT dapat menawarkan sahamnya kepada investor melalui mekanisme di Pasar Modal. Dengan peluang ini berarti PT telah melakukan efisiensi dalam perencanaan modalnya sebab mendapatkan penambahan modal melalui penjualan saham sahamnya di Pasar Modal jauh lebih menguntungkan dari pada mendapatkannya dari sumber sumber pembiayaan lainnya seperti Bank misalnya. Modal yang didapat dari Pasar Modal tidak perlu menyediakan agunan, tidak perlu membayar bunga, cukup dengan membayar

deviden saja bahkan deviden ini tidak perlu dibayarkan apabila PT menderita kerugian. Deviden dibayarkan hanya pada saat PT memiliki keuntungan (laba). Lain halnya apabila sumber pembiayaan itu didapat dari Bank, di samping harus menyediakan agunan juga diwajibkan membayar bunga secara teratur dalam waktu tertentu apapun yang terjadi pada kondisi PT itu.

Dari uraian tersebut diatas terlihat ada keistimewaan PT yang menjadikan PT mempunyai kelebihan dibanding dengan badan usaha dalam bentuk lainnya. Kelebihan inilah yang menjadikan PT sebagai badan usaha yang banyak dipilih oleh para pemodal (investor) termasuk Wagiyo Hadiristiono cs. untuk menjalankan modalnya dan mengembangkan usahanya.

Menurut Undang Undang Perseroan Terbatas (UU NO.1/1995) didalam penjelasan pasal 13 perseroan terbatas terbagi menjadi dua jenis yaitu PT tertutup dan PT terbuka. Perbedaan antara kedua jenis PT ini ialah apabila PT tertutup merupakan PT yang belum atau tidak melakukan penawaran umum atas saham sahamnya. Saham sahamnya hanya dimiliki oleh para pendirinya dan tidak atau belum dijual kepada umum melalui Pasar Modal. PT Ganda Kekar Santosotex termasuk kedalam jenis perseroan yang tertutup karena saham sahamnya hanya dimiliki oleh para pendirinya yaitu Wagiyo Hadiristiono, Joko Lampito dan Herry Santoso. Sedangkan yang dimaksud dengan PT terbuka adalah PT yang sudah melakukan penawaran umum atas saham sahamnya melalui mekanisme Pasar Modal.

Istilah PT terbuka dikenal setelah berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Terhadap PT

terbuka ini banyak orang mengistilahkannya dengan PT yang "go public" artinya bahwa PT tersebut telah melakukan penjualan saham sahamnya kepada masyarakat luas. Penjualan saham saham ini dilakukan melalui pasar modal dengan memenuhi proses tertentu. Untuk dapat memasyarakatkan atau menawarkan saham sahamnya kepada masyarakat harus dipenuhi persyaratan persyaratan tertentu yang sebelum adanya deregulasi pasar modal yang dikenal dengan Paket Deregulasi 1990, diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987, Tanggal 23 Desember 1987 Tentang Emisi Efek Melalui Bursa. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990, Tanggal 4 Desember 1990 Tentang Pasar Modal, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991, Tanggal 30 Nopember 1991, Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990, Tentang Pasar dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 tersebut dinyatakan dicabut, kecuali Pasal 2, Pasal 4, pasal 6 dan Pasal 12 ayat (2) berturut turut Pasal yang mengatur tentang emiten, persyaratan emisi dan tata cara emisi.

Menurut ketentuan ketentuan didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 langkah langkah untuk "go public" dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengadakan RUPS terlebih dahulu.

Dalam melaksanakan keinginan go public maka PT calon emiten pertama tama harus menyelenggarakan RUPS terlebih

dahulu untuk mendapatkan kesepakatan diantara para pemegang sahamnya. Hasil keputusan didalam RUPS itu dibuatkan berita acara yang biasanya dibuat oleh notaris karena dianggap lebih ahli didalam hal hal seperti itu. Tujuan RUPS adalah untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang sahamnya terhadap maksud perseroan yang hendak go public, sebab go public hanya bisa dilakukan oleh perseroan apabila para pemegang sahamnya menyetujui perseroan menjual sahamnya kepada masyarakat atau menerbitkan saham baru yang dijual kepada masyarakat luas. Faktor kehendak dari pemegang saham ini kelihatannya merupakan pertimbangan yang tidak mudah, sebab kemungkinan pengurangan dari kontrol kepengurusan perusahaan serta sarat sarat keterbukaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham. Hal ini adalah dampak dari PT yang semula tertutup kemudian harus berubah menjadi PT terbuka dengan datangnya pemegang saham baru dari masyarakat. Oleh karena itu perlu pertimbangan yang mendalam untuk sampai pada keputusan "go public". Memang bila dilihat dari sisi pengerahan dana untuk penambahan modal pengembangan usaha terhadap perusahaan yang bersangkutan, maka go public adalah salah satu alternatif penambahan modal jangka panjang yang dapat diperoleh melalui penjualan saham di pasar modal. Namun perlu dipertimbangkan pula oleh direksi perusahaan yang ingin go public bahwa sebelum memutuskan untuk adanya rencana go public maka direksi seyogyanya secara moral sudah berpikir tentang aspek perlindungan pihak ketiga

atau investor yang nantinya akan membeli saham yang akan ditawarkannya. Pemikiran aspek perlindungan terhadap investor ini harus diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi perusahaan yang dilandasi kejujuran. Sebab aspek keterbukaan dan kejujuran inilah yang memberikan kepercayaan kepada pihak investor di kemudian hari. Jika hal seperti ini sudah sejak dini diperlihatkan oleh perusahaan calon emiten, tentu perkembangan jumlah PT yang akan go public akan semakin meningkat dimasa masa mendatang dan disatu sisi peran pasar modal sebagai salah satu lembaga penghimpun dan pengerah dana masyarakat dan sarana investasi serta sarana pemerataan pendapatan masyarakat akan semakin tinggi.

## 2. Pernyataan Kehendak (Letter of intent)

Segera, setelah keinginan go public disepakati dan diputuskan dalam RUPS, kemudian direksi mengajukan surat pernyataan kehendak (letter of intent) kepada Bapepam. Surat tersebut wajib dilengkapi dengan data umum mengenai perusahaan, besarnya jumlah saham yang akan dijual, rencana penggunaan hasil penjualan saham dimaksud, serta masalah masalah yang dihadapi perusahaan guna memungkinkan Bapepam memberikan bantuan pemecahannya.

Pada waktu sekarang setelah bursa efek dikelola oleh swasta, yaitu PT Bursa Efek Jakarta, letter of intent ini harus diajukan pada PT Bursa Efek Jakarta lebih dulu, baru pernyataan pendaftaran emisi efeknya diajukan kepada Bapepam yang sekarang bukan lagi sebagai lembaga pelaksana pasar modal akan tetapi beralih fungsi menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

### 3. Penunjukan Penjamin Emisi

Dalam suatu emisi, bagi emiten kepastian tersedianya dana dalam jumlah dan waktu yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan konsep pembelanjaan perusahaan yang mengharuskan arus dana yang masuk itu pasti. Untuk itu lembaga penjamin emisi sebagai salah satu lembaga penunjang pasar modal sangat diperlukan. Penjamin Emisi Efek menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 adalah lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang diterbitkan emiten. Dalam perkembangannya setelah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 Tentang Emisi Efek melalui bursa tersebut mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal, penjamin emisi efek mengalami pula perubahan pengertiannya.

Lembaga penjamin emisi (underwrite) menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990, Tentang Pasar Modal diartikan sebagai pihak yang telah mengadakan kontrak untuk membeli efek dari emiten, pihak pengendali yang mempunyai affiliasi dengan emiten, atau penjamin efek lainnya untuk dijual dalam rangka penawaran umum. Dengan keluarnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, penjamin emisi dalam undang undang tersebut diberikan batasan pengertian sebagai berikut, Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

#### 4. Penunjukan Akuntan Public

Untuk melengkapi persyaratan go public, emiten harus menunjuk akuntan publik untuk memeriksa pembukuan atau laporan keuangan emiten dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut. Hasil pemeriksaan akuntan yang memenuhi syarat untuk go public adalah pendapat wajar tanpa syarat atau unqualified opinion untuk minimal tahun buku terakhir. Tujuan dari pemeriksaan akuntan tersebut adalah untuk mengetahui kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh emiten, sehingga tersedia informasi yang jujur, independen, dan dapat dipercaya khususnya bagi kepentingan investor. Pendapat akuntan ini sangat menentukan apakah suatu PT itu memenuhi syarat atau tidak untuk go public. Akuntan sebagai lembaga profesi penunjang pasar modal diharapkan memberikan pernyataan dan informasi keuangan selengkap mungkin. Informasi dan pernyataan yang tidak benar atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diungkapkan sudah barang tentu akan menyesatkan dan merugikan berbagai pihak khususnya investor yang akan membeli saham yang ditawarkan oleh emiten tersebut. Untuk itulah didalam era deregulasi dibidang pasar modal sejak tahun 1990, akuntan yang ditunjuk sebagai profesi penunjang pasar modal dilibatkan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap isi prospektus yang dibuat oleh emiten sebatas pada informasi yang diberikannya.

Ketentuan yang demikian diatur didalam pasal 214 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal sebagai yang telah diubah dengan



Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 Tanggal 30 Desember 1995, SK Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 yang terakhir telah diubah dengan SK Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 dinyatakan dicabut. Pencabutan ini sudah seharusnya terjadi, karena jika melihat materi SK Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 sepertinya merupakan embrio materi yang diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

#### 5. Penunjukan Perusahaan Penilai

Dalam kaitannya dengan rencana PT go public melalui pasar modal, perusahaan penilai berfungsi sebagai lembaga yang menilai kewajaran harta kekayaan perusahaan yang akan go public. Penilaian itu meliputi tanah, bangunan, mesin mesin, dan sarana pelengkap lainnya seperti kendaraan, inventaris kantor, dan lain lain termasuk apakah harta kekayaan calon emiten itu telah digunakan sesuai dengan tujuan semula. Hasil penilaian kembali aktiva tetap ini akan dimuat dalam prospektus agar masyarakat calon investor dapat menilai keadaan dan kemampuan emiten. Keberadaan perusahaan penilai ini dahulu diatur didalam Surat Keputusan menteri Keuangan Nomor 695/KMK.011/1985 yo. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S.141/PJ/1982 Tanggal 8 Februari 1982. Sekarang fasilitas penilaian kembali aktiva tetap ini tidak berlaku lagi.

#### 6. Penunjukan Konsultan Hukum

Untuk mempersiapkan perjanjian perjanjian emisi saham diperlukan adanya pernyataan pendapat dari konsultan hukum yang ditunjuk oleh calon emiten, mengenai :

- a. Anggaran dasar dari PT yang akan go public (emiten) beserta perubahan perubahannya ;
- b. Ada tidaknya izin usaha dan izin-izin lainnya yang wajib dimiliki oleh calon emiten ;
- c. Bukti pemilikan dan penguasaan atas harta kekayaan calon emiten ;
- d. Ada tidaknya gugatan atau tuntutan dalam perkara perdata maupun pidana yang menyangkut calon emiten atau pribadi pengurusnya.

Keabsahan atau legalitas suatu perusahaan perseroan terbatas dengan segala perubahan, kekayaan, transaksi-transaksi yang dibuat oleh perusahaan, kemungkinan keterlibatan anggota direksi dalam perkara perdata maupun pidana, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan dengan anggaran dasarnya, kesemuanya akan diteliti oleh konsultan hukum. Seperti halnya akuntan maka konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal juga akan dikenai sanksi hukum yang berlaku jika dari pendapat hukumnya yang dimuat dalam prospektus ternyata merugikan pihak ketiga atau investor dikemudian hari.

#### 7. Penunjukan Notaris

Sehubungan dengan pembuatan akta akta notariel yang diperlukan dalam rangka emisi, emiten perlu menghubungi notaris untuk pembuatan akta akta dokumen maupun akta

akta perjanjian yang diperlukan, seperti misalnya akta notariel Berita Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi persetujuan dari para pemegang saham yang menyetujui perseroan go public. Dan satu hal penting yang perlu ditulis dalam berita acara keputusan rapat tersebut ialah adanya keputusan yang memberikan kewenangan kepada direksi emiten untuk melakukan tindakan persiapan go public. Kewenangan ini diperlukan untuk memberikan pembuktian yang legal atas perbuatan hukum yang dilakukan direksi dalam upaya mempersiapkan go public sehingga perbuatan yang dilakukan direksi itu adalah sah. Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal kualifikasi notaris dimasukkan sebagai lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang juga akan dikenakan sanksi yang sama seperti profesi penunjang pasar modal lainnya jika perbuatannya dalam rangka menjalankan profesinya di lingkup pasar modal ternyata merugikan pihak ketiga atau investor.

#### 8. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek

Setelah tahap persiapan emisi selesai dilakukan, maka calon emiten harus mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada Bapepam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 Tentang Emisi Efek Melalui Bursa, Emisi saham dilakukan dalam pecahan Rp.1000.-(seribu rupiah), jika direncanakan adanya emisi saham atas tunjuk, maka menurut Pasal 6 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 Tentang Emisi Efek Melalui Bursa tersebut, saham atas tunjuk diterbitkan dalam jumlah

sebanyak banyaknya 49 % (empat puluh sembilan persatus) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 Tentang Emisi Efek Melalui Bursa, dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, emiten wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. rancangan prospektus, iklan, surat edaran atau selebaran selebaran yang digunakan untuk menawarkan efek;
- b. Salinan akta pendirian perusahaan atau anggaran dasar beserta perubahan perubahannya ;
- c. laporan keuangan emiten untuk 2 (dua) tahun terakhir yang disusun sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia disertai laporan akuntan publik atau akuntan negara ;
- d. laporan konsultan hukum ;
- e. dokumen lainnya.

9. Dengar pendapat terbatas (limited hearing)

Jika berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian yang dilakukan oleh Bapepam ternyata emiten yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka sebagai proses akhir emisi dilakukanlah dengar pendapat terbatas (limited hearing), yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dalam proses emisi. Sebelum adanya deregulasi di bidang pasar modal pada tahun 1990, sebagai proses akhir emisi maka dilakukan dengar pendapat akhir (final hearing) yang bersifat terbuka untuk umum. Pelaksanaan final hearing ini relatif mudah karena hanya semacam acara ijab kabul belaka. Setelah diadakan final hearing

kemudian ketua Bapepam atas nama Menteri Keuangan memberikan izin emisi efek kepada emiten yang bersangkutan. Sekarang dengan adanya deregulasi di bidang pasar modal sejak tahun 1990, dengan pendapat akhir ini tidak diadakan lagi, karena emiten yang akan go public sudah tidak disyaratkan harus memperoleh izin dari ketua Bapepam. Bapepam hanya berfungsi hanya semacam wasit dalam penyelenggaraan bursa saham yang dikelola oleh PT Bursa Efek Swasta, seperti PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES).

#### 10. Penawaran Umum (Pasar Perdana)

Setelah surat izin emisi efek diterima oleh emiten, maka emiten melalui penjamin emisi efek dan agen penjual melakukan penjualan perdana atas saham saham yang diterbitkan di luar bursa. Penjualan efek pada pasar perdana dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang kurangnya 6 (enam) hari kerja. Pada kesempatan inilah masyarakat investor diberi kesempatan membeli saham secara langsung kepada penjamin emisi atau agen penjual, tanpa dipungut provisi pembelian.

#### 11. Pencatatan (Listing)

Jika penjualan saham pada pasar perdana telah selesai maka emiten wajib mencatatkan efeknya di Bursa selambat lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat izin emisi efek dikeluarkan. Saham yang telah dicatatkan di Bursa hanya dapat diperdagangkan di Bursa, oleh anggota Bursa. Dengan keluarnya S.K Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.010/1992 Tentang Pencabutan S.K Menteri Keuangan Nomor 842/KMK.013/1989 Tentang

Biaya Pencatatan dan Perdagangan di Bursa Efek Jakarta, S.K Menteri Keuangan Nomor 1253/KMK.013/1989 Tentang Perdagangan Efek di Bursa Jakarta dan S.K Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 Pasal 2,4,6 dan 12 Tentang Emisi Efek Melalui Bursa juncto Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep.01/BEJ/1992 Tentang Peraturan Bursa Efek Jakarta maka pencatatan efek di Bursa Efek Jakarta harus mengikuti peraturan yang baru tersebut.

Seluruh transaksi efek di bursa adalah transaksi tunai yang harus dibuktikan dengan nota transaksi dan atau akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh penjual dan pembeli atau kuasanya. Sebelum 1987 seluruh emisi saham diterbitkan dalam jenis saham atas nama (op naam). Dengan keluarnya S.K Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 Tentang Emisi Efek Melalui Bursa yang memberikan kemungkinan diterbitkannya saham atas tunjuk (aan toonder), maka setelah itu emisi saham dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama dan saham atas tunjuk.

Dengan berakhirnya pasar perdana dan saham telah dicatatkan di bursa maka segera setelah itu dimulailah perdagangan efek di pasar sekunder. Ada 2 (dua) aspek utama yang membedakan pasar perdana dengan pasar sekunder yaitu hal penetapan harga saham dan prosedur transaksi jual beli yang harus dianut.

Di pasar perdana harga saham ditetapkan oleh underwriter dan emiten sedangkan di pasar sekunder yang menetapkan harga saham di Bursa adalah para brokers yang mewakili dari segi demand dan brokers yang mewakili dari segi supply. Penawaran efek di pasar perdana berdasarkan

selling documents yakni berupa prospektus yang memudahkan investor dan para analis efek yang mewakili investor mendapatkan keterangan yang lengkap dan benar mengenai emiten. Sebaliknya di pasar sekunder terutama dengan berjalannya waktu maka data yang terdapat di dalam prospektus kurang dapat dipakai lagi. Oleh sebab itu penetapan harga di pasar sekunder didasarkan pada data terakhir mengenai emiten.

Meskipun PT Ganda Kekar Santosotex merupakan jenis PT yang tertutup namun diawal berdirinya sudah termasuk perusahaan yang tergolong besar dan sudah beroperasi dengan omzet yang besar pula. Hal ini karena PT Ganda Kekar Santosotex adalah merupakan perubahan bentuk badan usaha dari CV Budi Santoso suatu perusahaan tekstiel yang berkembang pesat di daerah Pedan Klaten Jawa Tengah yang didirikan oleh Wagiyo Hadiristiono sejak tahun 1982. Pendirian PT Ganda Kekar Santosotex sebenarnya oleh Wagiyo Hadiristiono dimaksudkan untuk lebih meningkatkan lagi perkembangan usaha dari CV Budi Santoso. Pengembangan usaha ini akan lebih mudah dicapai bila lembaga yang menjalankan modalnya adalah lembaga mandiri yang mampu mendukung hak dan kewajibannya yaitu lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum. Satu satunya lembaga usaha yang mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum adalah PT (Perseroan Terbatas) karena PT adalah merupakan badan hukum. Namun kedudukan PT sebagai subyek hukum tidak serta merta begitu PT didirikan dengan akta notariel lalu menjadi suatu institusi yang berbadan hukum (menjadi subyek hukum). Untuk menjadi institusi yang bebadan hukum akta pendiriannya masih memerlukan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Selama teng-

gang waktu dari dibuatnya akta pendirian oleh notaris sampai kepada pengesahannya inilah merupakan waktu yang sangat riskan dengan berbagai peristiwa (perbuatan) hukum yang dilakukan oleh para pendirinya dan mempunyai implikasi terhadap perkembangan perseroan. Bila peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pendiri ini meskipun tidak mengatas namakan perseroan memberikan manfaat dan untuk kepentingan perseroan tentu akan mempengaruhi perkembangan perseroan secara positif. Sebaliknya bila didalam tenggang waktu tersebut pendiri melakukan perbuatan hukum yang tidak untuk kepentingan perseroan dan tidak memberikan manfaat bagi perseroan maka akan mempengaruhi perkembangan perseroan menjadi negatif artinya perkembangan perseroan tidak menjadi lebih baik tetapi justru akan merugikan perseroan sebagaimana dapat dilihat dari kasus PT Ganda Kekar Santosotex tersebut. Dengan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pendiri PT Ganda Kekar Santosotex (tergugat II) yang dilakukan pada waktu akta pendiriannya belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman telah menjadikan PT Ganda Kekar Santosotex gulung tikar (tutup hanya tinggal nama saja) dan 2000 karyawannya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebab Wagiyo Hadiristiono selaku Direksi dari PT Ganda Kekar Santosotex harus menyelesaikan penyimpangan itu melalui pengadilan yang menyita tenaga waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga perseroan tidak terurus dengan baik.

\*\*\*\*\*



## BAB IV

### P E N U T U P

Berpijak dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian seperti telah dikemukakan diatas dari pembahasan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Pendiri bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pada waktu perseroan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum apabila perseroan ketika telah mendapat pengesahannya sebagai badan hukum tidak secara tegas menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau perseroan secara tegas tidak mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan atau perseroan tidak mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan.
2. Kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum semata mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dan sejak saat itu perseroan terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum

yang dilakukannya. Dengan demikian kedudukan pendiri terlepas sama sekali dari tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan hukum perseroan dan kedudukan pendiri beralih menjadi pemegang saham dan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebab pemegang saham bukanlah pihak yang mewakili perseroan dalam sehari-hari sehingga kepadanya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan yang dianggap melawan hukum dan merugikan pihak ketiga.

3. Sebelum perseroan mendapatkan status badan hukum kepentingan perseroan diurus oleh para pendirinya sehingga maju mundurnya perkembangan perseroan pada waktu belum menjadi badan hukum ditentukan oleh para pendirinya. Dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendirinya ini nantinya akan mengikat perseroan setelah disahkan sebagai badan hukum. Penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh pendirinya dengan melakukan perikatan atau perjanjian kredit untuk kepentingan pribadi pendiri dengan mengatas namakan perseroan berpengaruh negatif (merugikan) bagi perkembangan perseroan bahkan dapat menjadikan perseroan tinggal nama saja sehingga maksud dan tujuan didirikannya perseroan terbatas guna mendapatkan keuntungan tidak tercapai.

#### B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perseroan terbatas adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan aktifitas usaha (bisnis) guna mendapatkan keuntungan (laba). Melalui perseroan terbatas inilah para pengusaha investor (pemodal) menjalankan modalnya, misi yang diemban perseroan terbatas adalah misi untuk mencari keuntungan bagi pemodalnya yang nota bene adalah pendiri dan pemegang saham dari perseroan tersebut. Oleh karena itu hendaknya pengusaha pendiri perseroan terbatas dapat menempatkan perseroan terbatas pada kedudukan yang proporsional didalam menjalankan aktifitasnya sebagai pelaku usaha artinya janganlah pendiri memanfaatkan perseroan terbatas hanya untuk kepentingan pribadinya. Sebab bila hal itu terjadi bukan saja akan merugikan pendiri sendiri lebih dari itu citra perseroan terbatas dapat menjadi buruk dimata masyarakat sehingga tujuan dari didirikannya perseroan terbatas yaitu mengemban misi untuk mencari keuntungan (laba) tidak tercapai.

2. Sebagai badan hukum perseroan terbatas adalah merupakan subyek hukum yang bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya terlepas dari pendiri dan atau pemegang sahamnya. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan perseroan terbatas dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum. Mengenai hal ini kiranya perlu dipahami oleh berbagai kalangan khususnya bagi aparat penegak hukum sehingga didalam suatu kasus dapat dibedakan mana yang harus dipertanggung jawabkan oleh perseroan terbatas dan mana yang harus dipertanggung jawabkan oleh

pendiri dan mana yang harus dipertanggung jawabkan oleh pemegang saham. Dengan demikian didalam suatu kasus dapat secara jelas ditentukan siapa yang harus bertanggung jawab.

3. Sehubungan dengan itu agar tidak terjadi kerancuan hukum, juga demi aspek perlindungan hukum bagi investor (pemodal) yang menggunakan perseroan terbatas sebagai sarana dalam menjalankan modalnya yang secara tidak langsung juga demi menjaga kredibilitas perseroan terbatas sebagai pelaku usaha maka lahirnya Undang Undang Perseroan Terbatas (U.U. No. 1 Tahun 1995) harus benar benar mampu sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai acuan didalam penegakan hukum perseroan pada khususnya dan hukum ekonomi pada umumnya agar kehadiran undang undang tersebut benar benar mampu memberikan aspek perlindungan hukum yang memadai bagi pemodal (investor) dan pelaku usaha secara keseluruhan.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1979, *Hukum Dagang Tentang Surat Surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- , 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ichsan, 1976, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali Ridho, 1986, *Badan Hukum Dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.
- , 1988, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam PT dan Penswastaan BUMN*, Remaja Karya, Bandung.
- Annie Waworuntu, 1995, *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi serta perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dengan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, Bandung.
- Bagir Manan, 1995, *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas* Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta.
- , 1995, *Antisipasi Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perkembangan Dunia Usaha*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, Bandung.
- Bernard S Philips, 1971, *Social Reseach Strategy And Tactics*, Medilland, New York, diterjemahkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto.
- Bohar Suharto, 1993, *Pengertian Fungsi Format Bimbingan Dan Cara Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis) ilmu Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Chidir Ali, 1976, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 1982, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung.
- Djoko Prakosa dan Imam Prayoga Suryohadibroto, 1987, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, *Hukum Dagang Surat Surat Berharga*, Cet.II, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1994, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Mengenai Trust*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungannya Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta.
- Engelbrech, 1989, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 1995, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta.
- Fakultas Hukum USU, 1984, *Laporan Penelitian Tentang Mekanisme Usaha Perusahaan (negara) Perseroan (pesero) dengan Kedudukan Hukum Karyawan Perusahaan Perseroan*, Lokakarya BPHN-PT Tambang Timah.
- Felix O Soebagjo, 1995, *Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Ditinjau Dari Sudut Undang Undang Nomor 1/1995 dan Peraturan Perundang Undangan Dibiidang Pasar Modal*, Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta.
- Hartono Suryopratiknyo, 1982, *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*, Seksi Notarial Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Tanggung Jawab Direksi Dan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas*, Makalah pada seminar sehari Hukum Perseroan Dan Hukum Pertanggungan (Asuransi) Dalam Kenyataan Dan Harapan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Herlien, 1995, *Pendirian, Fungsi Anggaran Dasar Dan Struktur Permodalan Suatu Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, Bandung.

- Heru Soeprapto, 1995, *Pengaruh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perkembangan Dunia Perbankan*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, Bandung.
- I Nyoman Tjager, 1995, *Beberapa Catatan Mengenai UUPT*, Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta.
- Kansil, 1985, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Pokok Pokok Hukum Perseroan Terbatas (Tahun 1995)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Komar Kantaatmadja, 1995, *Undang Undang Perseoran Terbatas 1995 Dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, Bandung.
- M. Zaini Hasan, tanpa tahun, *Karakteristik Penelitian Kualitatif*, Tidak Dipublikasikan, IKIP Malang.
- Man S Sastrawidjaja, 1995, *Eksistensi dan Peranan Direksi, Komisaris, RUPS dan Pemegang Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, Bandung.
- Maria SW Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1991, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-hambtanya Dalam Praktek Di Medan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mas'ud Machfoedz, 1995, *Undang Undang Perseroan-1995 Dan Perlindungan Minoritas Dari Praktik Bisnis (Pasar Modal) Yang Tidak Sehat*, Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta.
- Michael V Haribowo, 1994, *Usaha Usaha Perusahaan Dalam Rangka Memenuhi Harapan Investor*, Makalah pada Seminar Nasional Perkembangan Pasar Modal Pasca Deregulasi Paket Desember 1990 (Pakdes 1990), Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Moch. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Zain, 1995, *Peranan Profesi Akuntan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Dalam Rangka Transparansi Tanggung Jawab Keuangan Perusahaan*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, Bandung.
- Mudofir Hadi, 1992, *Peranan Notaris Dalam Proses Go Public Suatu Perseroan Terbatas*, Makalah, (Tidak Dipublikasikan).

- Nindyo Pramono, 1997, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ninik Suparmi dan Andi Hamzah, 1990, *KUHD Dan Kepailitan*, terjemahan dari Wet Boek van Koophandel en Faillissement Verordening, Rineka Cipta, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Panji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multi Nasional Dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Purwodarminto, WJS, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwo Sutjipto HMN, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Bentuk Perusahaan, Bagian Pertama*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Rai Wijaya IG, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ratnawati Prasodjo, 1995, *Pokok Pembaharuan Undang Undang Perseroan Terbatas Dan Pelaksanaanya*, Seminar Nasional Di Semarang.
- Rochmat Sumitro, 1979, *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang Undang Pajak Perseroan*, Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ruddy Prasetyo, 1983, *Kedudukan Mandiri Dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Pers, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Kedudukan Peran Dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar Hukum Dagang Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.



- \_\_\_\_\_, 1988, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas*, Makalah, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Perbandingan Antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Dengan Ketentuan Dalam KUHD Tentang Perseroan Terbatas*, Seminar Nasional Di Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Imu Hukum*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Satrio, J., 1991, *Cessie, Subrogatie, Notarie, Konpensatie & Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 1992, *Perkembangan Perseroan Dewasa Ini (Suatu Analisis Yuridik Terhadap Anggaran Dasar PT)*, Dalam Majalah Pro Yustitia Nomor 4 Tahun X Oktober 1992.
- Setiawan, 1989, *Aspek Aspek Hukum Pemilikan Saham, Penyalahgunaan Badan Hukum Dan Penyitaan Saham*, Tidak Dipublikasikan.
- Simorangkir JTC, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Siti Sumarti Hartono, 1982, *KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) dan PK (Peraturan Kepailitan)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Perseroan Terbatas Dalam Pendirian, Kertas Kerja Dalam Seminar Sehari Hukum Perseroan Dan Hukum Pertanggungan (Assuransi) Dalam Kenyataan dan Harapan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Soebekti & Tjitrosudibyo, 1977, *Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, terjemahan dari Wetboek van Koophandel en Faillissement Verordening, Pradnya Paramitra, Jakarta.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekardono, 1982, *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selekta*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Dagang Jilid I Bagian II*, Rajawali Press Jakarta.

- Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.
- Soeryono Soekanto Dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soeryono Soekanto Dan Pamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soeryono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1980, *Hukum Dan Metode-Metode Kajiannya*, Makalah disajikan pada "Pembinaan Tenaga Peneliti" yang diselenggarakan oleh BPHN Dep.Kehakiman RI, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perutangan*, Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1980, *Hukum Perutangan*, Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1987, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan Indonesia*, Pusat Studi Hukum Perdata Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Beberapa Aspek Permodalan Pada Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1995, *Komentor Atas Undang Undang PT (Baru) Tahun 1995 Nomor 1, Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemantoro, 1988, *Aspek Aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sukar Samsudi, 1995, *Kesiapan Dunia Usaha Dalam Mengantisipasi Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar Sehari, UNPAD, Bandung.

Sutantyo R Hadikusuma dan Soemantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia* Rajawali Pers, Jakarta.

Syahrir, 1995, *Tinjauan Pasar Modal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tom Gunadi, 1981, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung.

Winardi, 1983, *Asas Asas Manajemen*, Alumni, Bandung.

Wiryono Prodjodikoro, 1964, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Cet.Ke-V, Sumur, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1985, *Hukum Perkumpulan, Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Vredenberght. J, 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Stb.1847 : 23).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara menjadi Undang Undang.

Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01.HT.01.01. Tahun 1987 Tentang Pedoman Pemakaian Nama Perseroan terbatas.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 Tentang Emisi Efek Melalui Bursa.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 842/KMK.013/1989 Tentang Biaya Pencatatan dan Perdagangan di Bursa Efek Jakarta.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1253/KMK.013/1989 Tentang Perdagangan di Bursa Efek Jakarta.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 Tentang Pencabutan Surat Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987 kecuali pasal 2,4,6 dan 12 ayat (2) Tentang emiten, persyaratan emisi dan tata cara emisi.

Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep.01/BEJ/1992 Tentang Peraturan Bursa Efek Jakarta.

\*\*\*\*\*